

346.0182

KAR

p c1



**PERLINDUNGAN HUKUM DIBIDANG HAK CIPTA  
TERHADAP PELUKIS  
DI DAERAH IBU KOTA JAKARTA**

**TESIS**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Pesyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**Drs. K a r j o n o, SH  
NIM. B4A099091**

**Pembimbing**

**Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I  
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2001**

**PERLINDUNGAN HUKUM DIBIDANG HAK CIPTA  
TERHADAP PELUKIS  
DI DAERAH IBU KOTA JAKARTA**

**Disusun Oleh  
Drs. K a r j o n o, SH  
NIM.B4A099091**

**Dipertahankan didepan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 10 Desember 2001**

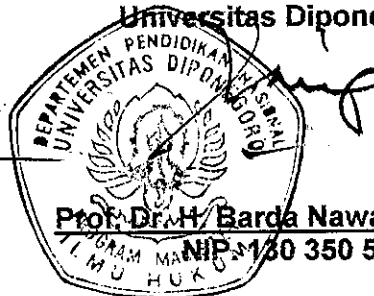
**Tesis ini telah diterima  
sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar  
Magister Ilmu Hukum**

**Pembimbing**

  
**Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH**  
**NIP. 130 368 053**

**Mengetahui**

**Ketua Program Magister Ilmu Hukum  
Universitas Diponegoro**

  
**Prof. Dr. H/ Barda Nawawi Arief, SH**  
**NIP. 130 350 519**

## ABSTRACTION

Nowdays, in globalization era that signed with the rapid change in information, technology, communication and transportation, makes the boundary a country has not seen any more. On one side, globalization in realm of economy in national trade and investment is so fast that should be balanced with the development of better law, it means that the rule of law in advance country should gradually will be followed by developing country.

The development of globalization brings Indonesia to deal with International agreement in trade (*World Trade Organization/ WTO*), one of its enclosure is *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs)*, including the copy right rules, the regulations of copy right that ruled in TRIPs, its protection extended on expression, not on ideas, procedures, method for operation or concept, so that its covering more extended.

The written law of painting in Indonesia included in the copy right law, in the time of the dutch colonization, the copy right rules regulated based on *Auteurswet 1912* ( Staatsblad number 600 1912) that related with creation of science, art and literature, the copy right based on *Auteurswet 1912* is an absolute right and it regulated by law number 12, 1997, the copy right.

The protection law for the painters involve three aspects, they are rule of law, apparatus of uphold law, the culture of painters and their community to adhere the decision of copyright.

The protection law that given by the regulation law covers the law that derived from other countries are TRIP and Berne convention, and the rule of law from Indonesia it self involve the law of copyright, the government regulation, the presidential decree an minister regulation. The law of copyright is more emphasized on the settlement of civil case and more influenced the law that derived from different other countries by using the system of Indonesia law.

The protection given by the apparatus of uphold law are PPNS copyright, police, attorney, and judge. The authority given for investigation process is less, while it is in settlement on the court level, it is exceed when the case should have got decision about 150 days.

The painters in Jakarta have a customs more valued the certificate that formalized or produced by institution of painters community and curators than registered their paintings to copyright office.

The parameter of crime in painting can be measured when the criminal copy, duplicate, make a change of paintings for commercial and announce without permission the owner painting.

## Abstrak

Era globalisasi saat ini yang di tandai dengan derasnya arus informasi, teknologi, komunikasi dan transportasi mengakibatkan tapal batas suatu negara sudah tidak nampak lagi. Disatu sisi globalisasi dibidang ekonomi dalam perdagangan nasional dan investasi begitu cepat, hal ini harus dimbangi dengan perkembangan dibidang hukum yang memadai, artinya bahwa pengaturan hukum di negara maju secara perlahan lahan akan diikuti oleh negara sedang berkembang.

Perkembangan globalisasi membawa Indonesia untuk ikut dalam perjanjian Internasional dibidang perdagangan salah satu lampirannya adalah *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*, diantaranya mengatur tentang Hak Cipta, Ketentuan tentang Hak Cipta yang diatur dalam *TRIPs*, bahwa perlindungannya diperluas atas ekspresi dan bukan atas gagasan, prosedur, metode untuk operasi atau konsep, sehingga cakupannya akan lebih luas.

Hukum tertulis mengenai lukisan di Indonesia termasuk didalam hukum Hak Cipta, pada masa penjajahan Belanda, ketentuan Hak Cipta diatur berdasarkan *Auteurswet 1912* (*Staatsblad* nomor 600 tahun 1912), yang berkenaan dengan penciptaan dibidang ilmu pengetahuan kesenian dan kesusasteraan, hak cipta berdasarkan *Auteurswet 1912* merupakan hak mutlak, dan berakhir diatur dengan Undang-undang nomor 12 tahun 1997 tentang Hak Cipta.

Perlindungan Hukum bagi pelukis menyangkut tiga aspek yaitu aturan hukum, Unsur aparat penegak hukum Hak Cipta dan budaya pelukis dan komunitasnya dalam mentaati ketentuan hukum Hak Cipta.

Perlindungan yang diberikan oleh Aturan hukum meliputi Hukum yang berasal dari mancanegara yaitu *TRIP* dan *Convensi Berne*, dan Aturan Hukum dari Indonesia sendiri meliputi Undang-undang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan keputusan menteri dibidang Hak Cipta. Dalam aturan hukum Hak Cipta lebih menekankan pada penyelesaian perkara melalui perdata dan lebih diwarnai hukum yang berasal dari mancanegara yang berbeda dengan sistem hukum Indonesia.

Perlindungan yang diberikan oleh Unsur aparat penegak hukum yaitu oleh PPNS Hak Cipta, Polisi, Jaksa dan Hakim. Kewenangan yang diberikan dalam proses penyidikan sangat minim, sedang dalam proses penyelesaian ditingkat pengadilan sangat berlebihan dimana perkara harus sudah selesai sampai upaya hukum terakhir memakan waktu 150 hari.

Budaya para pelukis didaerah Jakarta mempunyai kebiasaan lebih menghargai sertifikat yang dikeluarkan oleh institusi komunitas pelukis dan kurator dari pada mendaftar karya lukisnya ke Kantor Hak Cipta.

Dalam menentukan para meter kejahatan dibidang lukisan yaitu jika pelaku tindak kejahatan melakukan perbanyakan, penggandaan, mengalihwujudkan suatu lukisan dan mengumumkan dengan tujuan komersial tanpa ijin pemilik lukisan.

## **Kata Pengantar**

Pertama tama kami panjatkan puji syukur kehadiran Allah, Swt yang telah memberikan Rachmat, Taufik, Hidayah dan Inayah Nya, sehingga kami dapat menyusun dan menyelesaikan tugas akhir thesis ini dengan baik, bahwa penyelesaian tugas ini bukanlah merupakan akhir dari suatu study, namun merupakan suatu fase dari perjalanan untuk menempuh dan mendalami ilmu yang pada hakekatnya masih sangat luas dan tak terbatas.

Selanjutnya dalam menyelesaikan tugas ini, tidak terlepas dari bimbingan, dorongan dan bantuan berbagai pihak, berkenaan dengan hal tersebut pertama tama kami haturkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat :

Ibu Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH atas kesediaannya memberikan dorongan, meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk membimbing kami, ditengah kesibukan beliau yang begitu padat.

Bapak Rektor Universitas Diponegoro, Semarang. atas segala fasilitas dan kesempatan yang diberikan untuk menyelesaikan studi di Universitas Dioponegoro.

Bapak Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, SH. Selaku Ketua program magister Ilmu Hukum, dan Bapak Budiarto, SH, MS sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, beserta seluruh staf kami haturkan terima kasih atas segala bimbingan dan pengarahannya sampai akhirnya dapat menyelesaikan study dengan baik.

Bapak Prof. Dr. Muladi, SH., Bapak Prof. Dr. Yusril Esamahendra, SH, LL.M., Bapak Prof. Dr. Baharuddin Lopa, SH., selaku Menteri Kehakiman Republik Indonesia beserta ELIPS yang telah memberikan segala fasilitas baik materiel maupun kesempatan mengikuti study pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Bapak Dr. Ir. Dicky Rezady Munaf, MS.MCE beserta keluarga. Deputi Pendayagunaan dan Pemasyarakatan Iptek, yang telah memberi dorongan materiel maupun spirituil dan kesempatan untuk keberhasilan dan selesainya study di Universitas Diponegoro.

Kepada Bapak Drs. Candra Manan Mangan, MSc., Asisten Deputi Pendayagunaan dan Pengembangan HaKI dan Standardisasi, Ibu Dra. Setowati, Ir. Rudiama. MSc, Ir. Retno Sumekar, Ismed Yus Putra, SE, OK. Sofyan, SE, Sabar Tua Tampubolon, SH, Sigit Subarja, SE, Iis, Vina, Danang, SE, Anton, dan seluruh staf Deputi PPI yang tidak dapat kami sebut satu persatu, dan seluruh staf Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi umumnya, yang telah memberi dorongan dan kesempatan untuk keberhasilan dan selesainya kami dalam menempuh study di Universitas Diponegoro.

Kepada Bapak Drs. Hasanuddin, Bc IP., Bapak Adi Suyatno, Bc IP,SH., selaku Sekretaris Jenderal dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM beserta seluruh pejabat dan staf yang telah memberikan kesempatan dan dorongan dalam menyelesaikan study.

Kepada Ibu Prof. Dr. Esmi Warassih, SH. MS, dan Bapak Maringan Lumban Raja, SH, MH. yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan tesis khususnya mengenai Metode Penelitian dan materi yang akhirnya dapat berhasil penulisan ini.

Bapak Zen Umar Purba, SH, LLM Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Ibu Emawati Yunus, SH Direktur Hak Cipta, Surahno, SH., Slamet Yuswanto, SH dan Zaki Septiono, SH, Drs Slamet Riyadi, Sukarni, Yanto, Drs. Hendi, Ir. Mahruzar, Ir. Aribudi, Antok, Drs. Yahya, Salam, SH dan seluruh keluarga besar Ditjen HKI. Juga kepada Kepala Kantor Pemerintah Daerah di Daerah Ibukota Jakarta, Biro Pusat Statistik, tempat dimana penulis mendapatkan data dan informasi untuk bahan analisa dan pembahasan.

Bapak dan Ibu Dosen Universitas Diponegoro khususnya Bapak Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH., Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH., Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, SH., Prof. Purwahid Patrik, SH (Almarhum), Dr. Insan Budi Maulana, SH, LLM., Dr. IS Susanto, SH., Prof. Sutandyo Wignyosoebroto, MPA, Prof. Dr. Miyasto, Prof. Dr. Gunawan Setiardjo, Prof. Rony Hanitijo Soemitro, SH., Drs. Wiratno, Mec., Dr. Esmi Warassih, SH, MS., Dr. Moempuni Martoyo, SH., Prof. Dr. Suyudi Mangunwihardjo., Prof. Dr. Erman Rajaguguk., Victor Umar Purba, SH, LLM, MSc., Arief Hidayat, SH, MH., Dr. Cita Citrawindapriapantja, SH.MIP., Ita Gambiro, SH., Eko Soponyono, SH, MH, Budiharto, SH, MS., Prof. Dr. Muladi, SH., yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan semasa study.

Rekan-rekan Bapak Ir. Koentjahjo Pamboedi, MSc, Efridani Lubis, SH, Dr. Komari, Dr. Andi Eka Sakya, Hotman Sitorus, SH. Suwarno, SH. Yani Firdaus, SH. Yayuk Saptaningsih, SH. Juwariyah, SH. Ir. Ir. Sumarni Mien Rukmini, Tri Dewi Tyarini, dan rekan-rekan lainnya yang tidak dapat kami sebut satu persatu, atas dorongan dan bantuan doa, sehingga kami dapat menyelesaikan study.

Kedua orang tua tercinta almarhum Bapak Sudirman Atmo Harsono dan Ibu Samsimah Atmoharsono, serta Bapak Sarno dan Ibu Sularmi (mertua), yang telah memberikan dorongan dan doa restu, serta kakak Sukoyo, Sukadi, dan dik Nanang Lasono. Juga adik-adik Drs. Sri Mulyono beserta isteri, Sri Sulastri, SH beserta suami, Edi Hartono beserta isteri, Nanik Sri Mulyani, Amd, dan Agus Budiyo, Amd atas doanya sehingga kami dapat menyelesaikan study.

Saudara saudara kami Bapak / Ibu / adik / kakak Drs. Sukardjo, BSc. Soetoto, Woehono, Slamet Tulus, Kamsini, Romuzi Amran, SH, MM, Santoso, M. Yusuf, BA, Drs. Gatot Nyamat MM, Suwarno, SH, Kartono, SH, Wahadi, Hardo Karsono, Gito, Dadang dan saudara lainnya yang tidak dapat kami sebut satu persatu satu atas bantuan dan doanya yang akhirnya kami dapat menyelesaikan study.

Isteri Sri Wiyati, SPd beserta ananda Anna K. Amalia, Muchlis Bovandra dan Achmad Luthfi Nugroho atas dorongan, pengorbanan dan bantuannya yang tak terhingga sehingga kami menyelesaikan study ini dengan baik dan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah ikut berperan untuk mendukung keberhasilan dalam study, dan penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan, berkenaan dengan hal tersebut kami sangat mengharap masukan untuk kesempurnaan penulisan ini.

Jakarta, 10 Desember 2001

Penyusun

**K a r j o n o**



## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Abstraktion.....	iii
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	ix
Bab I Pendahuluan .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan .....	17
C. Tujuan penelitian.....	17
D. Kontribusi Penelitian.....	19
E. Metode Penelitian.....	20
F. Kerangka Teori .....	27
G. Sistematika Penulisan.....	38
Bab II Tinjauan Pustaka.....	40
A. Kajian Hak kekayaan Intelektual .....	40
B. Berbagai Ketentuan mengenai Hak Cipta.....	47
1. Pengaturan Hak Cipta.....	47
2. Ruang Lingkup Hak Cipta.....	55
3. Subyek Hak Cipta.....	59
4. Ciri – ciri Hak Cipta .....	63
5. Hak Ekonomi, Hak Moral dan Salinan karya Cipta.....	65
6. Pendaftaran Hak Cipta .....	76
7. Sejarah dan Periodeisasi Perkembangan Hak Cipta.....	77
8. Perkembangan Hak Cipta Dalam Seni Rupa .....	85
C. Perlindungan Hukum Dibidang Hak Cipta	
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	89
2. Perlindungan Hukum Hak Cipta .....	93
3. Fungsi Aparat Penegak Hukum Hak Cipta .....	95

4. Perjanjian Internasional dibidang Hak Cipta .....	97
D. Perlindungan Hukum Terhadap Pelukis dan karya Seni Rupa.....	102
1. Arti PentingnyaPerlindungan bagi Pelukis.....	102
2. Pengertian Seni, Seni Rupa .....	103
3. Pengertian Pelukis, dan Kepemilikan Hak Karya Lukis .....	115
4. Parameter Pelanggaran di bidang Karya Seni Rupa .....	117
5. Bentuk perlindungan Terhadap pelukis .....	118
Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	120
A. Hasil Penelitian .....	120
1. Aturan Hukum Hak Cipta Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pelukis.....	120
2. Perlindungan Hukum yang Dilakukan oleh Unsur Aparat Penegak Hukum .....	139
3. Pemahaman Pelukis di Daerah Jakarta kurang memberikan tempat bagi berlakunya Undang-undang Hak Cipta.....	145
4. Menentukan Parameter Dalam Hal Terjadinya kejahatan oleh Pelukis.....	188
B. Pembahasan.....	189
1. Aturan Hukum Hak Cipta Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pelukis.....	189
2. Perlindungan Hukum yang Dilakukan oleh Unsur Aparat Penegak Hukum .....	199
3. Pemahaman Pelukis di Daerah Jakarta kurang memberikan tempat bagi berlakunya Undang-undang Hak Cipta.....	219
4. Menentukan Parameter Dalam Hal Terjadinya kejahatan oleh Pelukis.....	232
Bab IV Kesimpulan.....	241
Daftar Pustaka.....	244

## **Bab I**

### **Pendahuluan**

#### **A. Latar Belakang**

Era globalisasi saat ini yang ditandai dengan derasnya arus informasi, teknologi, komunikasi dan transportasi yang dapat mengakibatkan tapal batas suatu negara sudah tidak nampak lagi. Disatu sisi globalisasi dibidang ekonomi dalam perdagangan nasional dan investasi begitu cepat, hal ini harus dimbangi dengan perkembangan dibidang hukum yang memadai, artinya bahwa pengaturan hukum di negara maju secara perlahan lahan akan diikuti oleh negara sedang berkembang.

Kenyataan yang terjadi ketentuan hukum yang berasal dari negara maju tidak semuanya dapat diterapkan di negara sedang berkembang. Indonesia misalnya, karena adanya perbedaan sistem kultur, budaya, politik, hukum, dan pengaturan yang sama belum tentu dapat menjamin dan memberikan hasil yang sama dengan hasil yang diperoleh dari negara maju tersebut, dan aturan dari negara maju belum tentu dapat diterapkan begitu saja di semua lini negara, masyarakat dan bangsa disuatu tempat.

Perkembangan globalisasi membawa Indonesia untuk ikut dalam perjanjian Internasional dibidang perdagangan, salah satu lampirannya

adalah *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs)*, diantaranya mengatur tentang Hak Cipta, Ketentuan tentang Hak Cipta yang diatur dalam *TRIPs*, bahwa perlindungannya diperluas atas ekspresi dan bukan atas gagasan, prosedur, metode untuk operasi atau konsep, sehingga cakupannya akan lebih luas.

Ketentuan hukum tertulis mengenai lukisan di Indonesia pertama kali diatur masuk didalam ketentuan hukum Hak Cipta, pada masa penjajahan belanda, ketentuan Hak Cipta diatur berdasarkan *Auteurswet 1912 (Staatsblad nomor 600 tahun 1912)*, yang berkenaan dengan penciptaan dibidang ilmu pengetahuan kesenian dan kesusasteraan, hak cipta berdasarkan *Auteurswet 1912* merupakan hak mutlak.<sup>1</sup>

Aturan Hak Cipta tersebut berlaku sampai dengan Indonesia merdeka, bahkan setelah merdeka *Auteurswet 1912* mengenai Hak Cipta masih tetap berlaku sebagai hukum positif, ketentuan hukum ini berdasarkan pada Undang undang Dasar 1945, pada pasal dua aturan peralihan, menjelaskan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar.<sup>2</sup> Maka *staatsblad 1912 nomor 600* mengenai Hak Cipta tersebut tetap berlaku, namun dalam rangka pembangunan

---

<sup>1</sup> Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Hak Ayas kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hal. 3-4.

<sup>2</sup> Lihat penjelasan Undang-undang Dasar 1945 pada pasal 2 aturan peralihan.

dibidang hukum, demi mendorong dan melindungi karya cipta, penyebarluasan hasil karya ilmu, seni dan sastra serta percepatan pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa dan untuk menyesuaikan kebutuhan serta cita-cita hukum nasional, maka pada tanggal 12 April 1982, di tetapkan Undang-undang nomor 6 tahun 1982, tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982, nomor : 15, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor : 3217), dan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap Hak Cipta dan untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Dan semakin meningkatnya pelanggaran pembajakan yang sudah membahayakan dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat pada minat untuk mencipta khususnya, maka disesuaikan ketentuan Hak Cipta tersebut pada tanggal 19 September 1987 ditetapkan Undang-undang nomor 6 tahun 1987 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987, nomor : 42 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3362).

Perubahan tersebut dilakukan karena Undang-undang yang lama sudah tidak sesuai dengan kebutuhan, pada *Auterswet* 1912 belum mencakup hak cipta pada bidang teknologi serta tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional, karena jika dihubungkan dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 33 UUD 1945 tidak mengenal adanya hak Mutlak yang

dimiliki oleh *Auterswet* 1912, melainkan mempunyai fungsi sosial.<sup>3</sup> Alasan lain untuk dilakukan terhadap *Auterswet* 1912, antara lain telah timbul suara masyarakat yang mensinyalir adanya perbedaan nasib yang kurang memuaskan antara pencipta dengan orang-orang yang mempergunakan ciptaan itu, belum adanya suatu badan atau organisasi yang memperjuangkan hak pencipta serta Peraturan yang berlaku tentang Hak cipta belum dikenal masyarakat.<sup>4</sup>

Perubahan tersebut diakibatkan adanya perkembangan dan perubahan keadaan diantaranya pengumuman suatu hak cipta sama dengan pendaftaran. Adanya Dewan Hak cipta, dan dalam pendaftaran Hak Cipta tidak diwajibkan namun, jika didaftarkan akan memudahkan dalam pembuktian, dan sistem pendaftaran Hak cipta adalah Negatif Deklaratif artinya Hak Cipta didaftar atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Perubahan Undang-undang Hak Cipta selanjutnya adalah berubah untuk disesuaikan situasi dan kondisi baik yang datang dari dalam negeri maupun dari mancanegara, dengan adanya tuntutan dari negara di dunia yang menyesuaikan dengan ketentuan *World Trade Organisation (WTO)*, yang diantaranya mengatur tentang *Trade Related aspects of*

---

<sup>3</sup> Laden Marpaung, *ibid* hal. 11

<sup>4</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya Dalam Pembangunan Akademika*, Presindo, Jakarta, 1996, hal. 102.

*Intellectual Property Right (TRIPs)*, dan ketentuan mengenai *TRIPs* berisi tentang Hak Cipta, Desain Industri, dan Rahasia Dagang<sup>5</sup>, untuk selanjutnya lahirilah undang-undang nomor 12 tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 6 tahun 1987 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, nomor : 29, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor : 3679).

Persetujuan *TRIPs* yang merupakan bagian dari *General Agreement On Tariff and Trade (GATT)* atau *World Trade Organization (WTO)* mengatur tentang perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) dan Indonesia telah meratifikasinya melalui Undang-undang nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Perdagangan Dunia *Agreement Stablising The World Trade Organization*.<sup>6</sup> Aturan yang ada dalam *TRIPs* telah menjadi bagian dari produk hukum Indonesia, yang konsekwensinya harus ditaati dan dilaksanakan, dan berkaitan dengan Hak cipta maka Indonesia harus tunduk pada ketentuan konvensi Berne yang meliputi setiap karya kesusasteraan penguasaan Ilmu pengetahuan dan kesenian.<sup>7</sup> dan suatu karya cipta diungkap dalam

<sup>5</sup> S. Kayatmo, Problem Pendaftaran dan Pengawasan HAKI, Makalah Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 6 Desember 1997, hal. 2

<sup>6</sup> Lihat Undang-undang nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Stablising The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), disahkan dan diundangkan pada tanggal 2 Nopember 1994 dalam Lembaran Negara R.I tahun 1994 nomor 5, menjelaskan WTO sebagai organisasi perdagangan dunia yang menggantikan GATT.

<sup>7</sup> Konvensi Berne, Pasal 2 ayat (1).

berbagai bentuk dan inilah yang dilindungi.<sup>8</sup> dan konvensi Paris, Putaran Uruguay, serta *Convention Establising The World Intellectual Property Organization (WIPO)*, sedang tujuan *WIPO* dibidang Hak cipta adalah membantu perolehan dan mendorong kreasi.<sup>9</sup>

Kondisi semacam ini menunjukkan tidak keberdayaan hukum nasional terhadap hukum Internasional yang telah mengubah budaya dan kebiasaan masyarakat untuk tunduk dan taat kepada hukum baru tersebut, namun masyarakat khususnya para pelukis belum tentu melaksanakan ketentuan yang baru tersebut.

Perlindungan hukum atas Hak Cipta merupakan bagian dari perlindungan hukum terhadap persaingan curang yang merupakan pelanggaran dan kejahatan dibidang perdagangan, secara garis besar perlindungan hukum dibidang hak cipta ditujukan dua kepentingan yaitu kepentingan terhadap pemilik Hak Cipta, dan kepentingan konsumen.

Secara umum kepentingan yang hendak dilindungi oleh Hak Cipta dapat dibagi sebagai berikut :

- a. Kepentingan pemilik hak cipta untuk tidak diganggu gugat dalam hubungannya dengan konsumen, yang telah berjalan baik dalam

---

<sup>8</sup> Suryana, op. cit hal 19.

<sup>9</sup> Taryana Soenandar, *Perlindungan Hak Milik Intellektual di Negara Negara Asean*, Sinar Grafica, Cetakan 1, Jakarta 1996, hal. 9.



pasar, yang menunjukkan kepada konsumen bahwa pemilik Hak Cipta adalah produsen atau sipencipta.

- b. Kepentingan para produsen atau para pencipta lainnya yang saling berprestasi untuk mencapai karya terbaik, dan tidak boleh melakukan monopoli oleh siapapun sehingga para pencipta tidak dirugikan dan melakukan persaingan yang jujur.
- c. Kepentingan para konsumen yang dilindungi untuk dilindungi terhadap praktek-praktek yang cenderung menciptakan kesan yang menyesatkan dan menipu atau membingungkan konsumen dengan cara mempengaruhi konsumen bahwa karya cipta yang original banyak dipalsukan dan karya cipta yang palsu dipromosikan dengan mengatakan bahwa karya cipta palsu tersebut original.
- d. Kepentingan umum untuk memajukan perdagangan yang jujur dipasar dan untuk mencegah timbulnya praktek-praktek yang tidak jujur dan norma kepatutan dalam perdagangan.

Perlindungan hukum erat kaitannya dengan penegakan hukum (*Law Inforcement*), karena perlindungan yang diberikan dibidang Hak Cipta adalah meluruskan dan menempatkan hukum yang benar untuk ditaati dan dijadikan budaya oleh masyarakat pada umumnya, perlindungan hukum itu sendiri menyangkut tiga aspek penting yaitu budaya hukum masyarakatnya, unsur aparat penegak hukum dan aturan hukum.

Aturan Hak cipta yang ada dalam hukum positif lebih nampak diwarnai oleh konsep dari manca negara yang lebih mengedepankan dan menekankan materialistis. Sedang masyarakat Indonesia pada umumnya lebih banyak mementingkan kebersamaan dan merupakan masyarakat komunal, yang selalu hidup bermasyarakat dan saling ketergantungan. Ada sebagian kaum intelektual yang meragukan atas peranan undang-undang Hak Cipta yang keberadaannya dinegara berkembang hanya menguntungkan terhadap perusahaan besar, dan hubungannya dengan negara lain yaitu perusahaan trans nasional yang mendapat perlindungan hukum di negara berkembang itu sendiri. Keberadaan Undang-undang HKI diragukan dapat mendorong para ahli Indonesia untuk menemukan atau menciptakan sesuatu yang baru untuk mendorong pengelolaan industri.<sup>10</sup> Disisi lain Undang-undang Hak cipta dimaksudkan untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil kebudayaan dibidang karya ilmu, seni dan sastra, serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa.<sup>11</sup>

Hak cipta sebagai hak manual eksklusif terdiri dari dua macam hak yaitu hak ekonomi (*economic Right*), dan hak moral (*moral right*).<sup>12</sup> hak ekonomi tersebut berkembang dengan pemanfaatan hak secara

<sup>10</sup> Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, BPHN, Departemen Kehakiman R.I 1988, hal. 142.

<sup>11</sup> Lihat ketentuan menimbang Undang-undang nomor 12 tahun 1997 tentang Hak Cipta.

<sup>12</sup> Sanusi Bintang, Hukum Hak Cipta, PT. Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 4.

komersial, suatu ciptaan memerlukan pengorbanan waktu, tenaga. Maka hasil suatu ciptaan dikelola secara komersial untuk dapat mengembalikan modal dan memperoleh keuntungan, pendapat tersebut dikuatkan oleh Komen dan Varlande yang mengkwalikasikan dari hak ekonomi menjadi hak reproduksi yaitu memperbanyak dan menerbitkan. Hak eksklusif yaitu memainkan dan mempertunjukkan. Hak Adopsi yaitu memindahkan dan mengalihkan, dan hak interpretasi yaitu menerjemahkan atau mengalihkan bahasa.<sup>13</sup> dalam hak moral right lebih ditunjukkan kepada manifestasi dari adanya pengakuan terhadap hasil karya orang lain yang tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi lebih berwujud wewenang dan kekuasaan serta perasaan naluri apabila seseorang melanggar atau menambah dari suatu karya cipta.

Seni lukis diatur dalam Undang-undang Hak cipta tercantum pada bagian kelima pasal 11 ayat 1, huruf e yang menjelaskan Ciptaan yang di lindungi hak cipta adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang meliputi segala bentuk seni rupa seperti seni lukis, seni pahat, seni patung dan kaligrafi yang perlindungannya dilakukan oleh negara atas ciptaan yang tidak diketahui penciptanya terhadap luar negeri.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> JTC Simorangkir, Undang-undang Hak Cipta dengan Komentarnya, Penerbit Jambatan, Jakarta, 1998, hal. 62.

<sup>14</sup> Lihat Undang-undang nomor 12 tahun 1997 tentang Hak Cipta.

Seniman dalam menyongsong datangnya era globalisasi dibidang *Intellectual Property Rights* (Hak Atas Kekayaan Intellektual), khususnya terhadap para pelukis dalam melindungi karya cipta lukisannya, dengan berlakunya aturan yang selalu berubah ubah dan berkembang, baik untuk melengkapi, menyempurnakan dan menambah dari ketentuan hukum tersebut, maupun karena adanya pengaruh dari manca negara, kenyataannya banyak perbedaan persepsi yang mendasar antara ketentuan hukum yang ada di Undang-undang yang sudah dimodifikasi dengan aturan manca negara, dengan pendapat dan kebiasaan para pelukis.

Seniman khususnya pelukis, ada di Indonesia sejak dahulu kala, dari waktu ke waktu selalu mengalami perkembangan dan perubahan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor dari pelukis sendiri, dari adanya aturan yang selalu berkembang, dan berubah ubah baik yang datang dari pengaruh adat, maupun aturan yang datang dari mancanegara, sehingga akan dapat menimbulkan persepsi yang berbeda terhadap aturan tersebut baik mengenai perlindungan hukum maupun jenis pelanggaran dan kejahatan, dari unsur aparat penegak hukum.

Pelanggaran yang terjadi dibidang seni lukis sangat bervariasi yang sangat jeneral, adapun bentuk kejahatan tersebut diantaranya adalah meniru, menjiplak, memperbanyak atau menggandakan tanpa ijin pemilik, mencuri karya dan mengalih wujudkan, yang pada dasarnya merupakan

perbanyak lukisan dari aslinya tanpa sepengetahuan penciptanya untuk kepentingan komersial, dan yang di maksud dengan perbanyak adalah menambah jumlah suatu ciptaan dengan perbuatan hampir sama atau menyerupai ciptaan tersebut mempergunakan bahan yang sama maupun tidak sama termasuk mengalihwujudkan suatu ciptaan.

Mengalihwujudkan adalah transformasi seperti patung menjadi lukisan, cerita roman menjadi drama, drama biasa menjadi drama radio, dan mengalihwujudkan merupakan kejahatan.

Realitanya bahwa pelukis yang ada di Jakarta, berpandangan berbeda tentang mengalihwujudkan suatu lukisan, alasan dan pertimbangannya adalah bahwa dalam melukis yang lebih ditekankan adalah kreatifitas dan imajinasi dari seorang pelukis serta gaya dan kreasi dalam menuangkan kanfas.

Observasi awal terungkap bahwa perihal mengalihwujudkan karya seni dari suatu bentuk tertentu beralih ke lukisan, atau dari lukisan yang sudah terkenal dan mempunyai nilai seni dan ekonomi yang cukup tinggi, untuk digandakan menjadi beberapa lukisan, ternyata oleh pelukis permintaan dari konsumen dilakukan dan menurutnya bahwa perbuatan tersebut tidak melanggar hukum. Alasannya bahwa kreatifitas dan gaya goresan serta corak dari seorang pelukis adalah tidak sama antara pelukis yang satu dengan lainnya, karena itu sudah menyatu dengan jiwa

dan bakat dari seorang pelukis, dan hasil akhir berbeda, kecuali diperbanyak dengan teknologi yang sama benar dengan lukisan aslinya.

Pelukis dalam mengalihwujudkan dan menggandakan dengan melihat suatu lukisan tidak saja merupakan kejahatan, namun bahwa ide dalam suatu lukisan boleh sama, tetapi ekspresinya harus berbeda, hal ini tidak merupakan kejahatan. Karena ketrampilan seniman tidak semata mata badani yaitu tangan, mata mulut serta telinga, melainkan kemampuan untuk menggunakan segenap sarana yang ada pada diri seniman tersebut pada akal, rasa, iman secara tanggap, peka, tajam, efektif serta dinamikanya tetap didalam rangka menuangkan kreasi dari seorang seniman, dan pelukis yang terlalu terampil sampai menjangkau Virtuositas tertentu dengan kombinasi sifat lain menjadikan lukisannya itu menjadi predikat.<sup>15</sup> Sedang proses kreatif adalah sebagai suatu fonemena / gejala yang selalu menyibukkan seniman, yang mendapat pengaruh dari lingkungan internal, eksternal dan instrinsic internal, pengaruh dari sarana menghasilkan ketrampilan, karena itu mampu bekerja yang gilirannya mendorong dan berpengaruh kepada proses interaksi antara karya dengan sarana yang membuahkan originalitas.<sup>16</sup>, dengan demikian maka mengalihwujudkan dan memperbanyak lukisan yang idenya sama namun

---

15. Agus Sachri, Seni, Desain dan Teknologi ( Anologi, Kritik, opini dan filosofi ), Volume I, Penerbit Pustaka Bandung, 1986, hal. 9.

<sup>16</sup> Ibid hal. 10-12.

ekspresinya berbeda serta hasil dari lukisan tersebut sesuatu yang original, maka pendapat para pelukis khususnya yang ada di Jakarta tidak melakukan pelanggaran. Seperti misalnya beberapa pelukis melihat suatu obyek lukisan terkenal atau obyek benda tertentu yang sangat terkenal, indah dan mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi, dan para pelukis tersebut setelah sampai di rumah mereka melukis sesuai dengan apa yang di lihatnya, dan ini tidak merupakan kejahatan karena baik hasil maupun bentuk serta paduan warna dan gaya lukisannya, antara pelukis yang satu dengan pelukis yang lain akan berbeda, yang dilindungi dari Hak Cipta adalah ekspresinya dari sebuah ide, jadi bukan melindungi ide itu sendiri, dengan demikian yang di lindungi merupakan bentuk nyata sebagai sebuah ciptaan.<sup>17</sup>

Kantor Pos daerah Pasar Baru Jakarta Pusat misalnya, para seniman khususnya pelukis disitu, mayoritas melakukan aktifitas dalam profesinya seperti apa yang disampaikan yaitu melakukan pengalihwujudan maupun menerima beberapa pesanan dari konsumen untuk melukiskan sesuai dengan permintaannya, dan yang lebih unik, adalah apabila hasil lukisannya telah selesai, dan oleh sipemesan dengan minta ijin kepada pelukis untuk membubuhkan tanda tangan di dalam

---

<sup>17</sup> J. Taylor dalam Djumhana dan Djubaidillah, Hak Milik Intellektual Teori dan Prakteknya di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal. 46.

lukisan yang sudah selesai, atau kadang sipelukis menawarkan kepada pemesan untuk menandatangani lukisan yang sudah jadi, dan mayoritas para pelukis tersebut dengan rela dan senang hati hasil lukisannya di tanda tangani oleh orang lain.

Pelukis di daerah Mampang, Jakarta Selatan juga berpendapat yang sama dengan para pelukis di daerah Pasar Baru, begitu juga yang ada di anjungan pasar seni di Ancol, Jakarta Utara. Dan untuk pelukis yang mempunyai sanggar atau tempat yang nyaman dalam menuangkan idenya, mereka selangkah lebih maju dalam melindungi hasil karya lukisannya, dengan tidak membolehkan para pemesannya untuk mencantumkan tanda tangannya dalam lukisan, namun mereka jika ditanya bagaimana cara dan tehnik melukis yang baik dan yang dapat menghasilkan serta mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, mereka dengan rela dan senang untuk menjelaskannya, bahkan ada kesamaan dengan pelukis yang ada di Pasar Baru, Mampang Prapatan serta Pasar Seni Ancol, yaitu bahwa para pelukis tidak keberatan apabila dilihat bagaimana teknis dan cara melukis baik gaya maupun cara pencampuran bahan pewarnanya.

Uniknya mereka terbuka untuk menjelaskan proses suatu lukisan, dengan alasan itu merupakan amal soleh, darma dan ilmu yang harus diberikan kepada sesama, dan mereka senang karena satu-satunya yang mereka bisa dapat di tularkan dan di mengerti oleh pihak lain, dan para



pelukis tidak akan khawatir, jika ide dan ekspresinya dicuri, dengan alasan bahwa ide dan kreasi yang dimiliki jauh lebih banyak, sehingga buat apa memperlmasalahkan atau menggugat terhadap lukisannya yang diperbanyak atau di gandakan atau dicuri ide maupun ekspresinya, karena lebih baik melukis lagi untuk dapat nilai tambah, dari pada mempersoalkan yang belum tentu akan mendapat kemenangan dan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.

Pelukis di daerah Jakarta dalam melindungi karya lukisannya, selangkah lebih maju dibandingkan dengan para pelukis yang ada di daerah, di karenakan di kota ini lebih banyak di warnai dengan tuntutan ekonomi. Namun dalam realitanya bahwa para pelukis juga belum mengetahui banyak tentang mana lukisan yang sudah menjadi milik umum (*public domain*), dan lukisan yang masih dilindungi oleh pemiliknya yang menurut Undang-undang Hak Cipta bahwa masa perlindungan terhadap Hak Cipta adalah selama hidup pencipta ditambah 50 tahun, setelah pencipta meninggal dunia. Sedang masalah Hak Cipta Pendaftarannya dengan sistem Negatif Deklaratif artinya boleh didaftar, dan boleh tidak di daftar di kantor Hak Cipta, dengan kata lain di daftar atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang sama, sedang para pelukis lebih enggan untuk mendaftarkan ciptaannya, sehingga para pelukis akan sulit untuk mengklarifikasikan mana yang menjadi *public domain* dan yang tidak. Serta terhadap karya seni yang tidak diketahui siapa

penciptanya, dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama termasuk seni lukis di pelihara dan di lindungi dan sebagai pemegang hak cipta terhadap luar negeri adalah negara, sehingga akan sulit untuk mengetahui suatu ciptaan siapa pemiliknya dan kapan mulai di ciptakan, serta kapan menjadi publik domain.

Perlindungan Hukum di bidang Hak Cipta yang perlu diperhatikan menyangkut tiga aspek yaitu Aturan Hukumnya dan Unsur aparat penegak hukum serta budaya hukum masyarakat, dalam aturan hukumnya masih perlu penyempurnaan dikarenakan belum semua permasalahan dibidang hak cipta dapat tertampung bahkan masih terdapat aturan yang belum dapat dijadikan pegangan, seperti dalam aturan hak cipta bahwa pelanggaran dibidang hak cipta merupakan kejahatan, sehingga konsekwensinya apabila ada pelanggaran, maka unsur penegak hukum harus bertindak, namun yang terjadi saat ini Unsur penegak hukum lebih banyak menunggu laporan, dan orang yang melaporpun belum dapat diberikan pelayanan yang layak oleh Penyidik khususnya Penyidik Pegawai negeri dibidang Hak Cipta, sehingga lebih terlihat bahwa pelanggaran hak cipta lebih tertuju pada delik aduan, begitu juga unsur aparat penegak hukum khususnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil Hak Cipta kecuali masih terbatas jumlahnya, juga dalam melaksanakan tugasnya masih dirangkap dengan jabatan lain.

Permasalahan yang timbul seperti diatas, menjadi dasar penulis untuk melakukan penelitian terhadap komunitas pelukis, didaerah Jakarta. Dan dengan menggali budaya dan kebiasaan para pelukis dalam melindungi karyanya, diharapkan akan dapat memberikan masukan terhadap aturan hukumnya dan unsur aparat penegak hukumnya, sehingga dapat mengelidindingkan suatu temuan baru yang dapat menambah, merubah atau menjadi bahan masukan dalam hukum positif.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Aturan Hukum Hak Cipta memberikan perlindungan Hukum terhadap Pelukis ?
2. Bagaimanakah Perlindungan Hukum yang dilakukan oleh Unsur Aparat Penegak Hukum ?
3. Mengapa pemahaman pelukis di daerah Jakarta kurang memberikan tempat bagi berlakunya Undang-undang Hak Cipta ?.
4. Bagaimanakah menentukan parameter dalam hal terjadinya kejahatan oleh pelukis ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Rumusan tentang tujuan penelitian seyogyanya dikaitkan sifat dan fungsi penelitian yang bersifat eksploratif (menemukan), developmental

(mengembangkan). Berkaitan dengan hal tersebut, maka tujuan dari penelitian ini dapat penulis uraikan adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui Perlindungan hukum dibidang hak cipta, yang diatur dalam Undang-undang, dimana dari waktu ke waktu selalu mengalami perubahan dan lebih banyak di pengaruhi dari hukum yang berasal dari mancanegara yaitu *TRIPS*, *Convensi Berne*, disatu sisi Indonesia mempunyai ciri khas hukum yang berkembang dan berlaku di masyarakat, dan terdapat aturan yang berkembang untuk menyesuaikan dengan kondisi yang semakin berubah dalam menuju kesesuaian keadaan,
2. Mengetahui perlindungan hukum dibidang Hak Cipta terhadap Pelukis yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dibidang Hak Cipta, Polisi, Jaksa dan Hakim, dikarenakan aturan yang mengatur tentang PPNS antara instansi yang satu dengan lainnya berbeda dan bervariasi.
3. Menemukan nilai-nilai yang merupakan dasar kultural Sistem pemberian tempat pada perlindungan hukum Hak Cipta sebagai keputusan budaya pelukis, untuk menolak atau menerima tawaran kepastian hukum dari institusi hukum tersebut.
4. Dapat menemukan bentuk dan corak pelanggaran, sekaligus menentukan parameter kejahatan dibidang Hak Cipta oleh pelukis di daerah ibu kota Jakarta.

#### **D. Kontribusi Penelitian**

Berangkat dari tujuan penelitian diatas, apabila dapat dilaksanakan dan tercapai sesuai dengan harapan, maka dalam melakukan penelitian ini di harapkan akan memberikan kontribusi dan kegunaan sebagai berikut :

1. Mendapatkan kejelasan aturan yang dapat di jadikan pedoman oleh pelukis dalam melindungi karyanya, dan perlindungan hukum yang diberikan oleh aturan Hak Cipta tersebut kepada pencipta atau pelukis, dapat menambah perbendaharaan konsep, metode ataupun pengembangan teori dalam kasanah studi hukum dan masyarakat, yang mengakomodasikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, dan hukum yang berasal dari mancanegara, dibidang Hak Cipta dalam melindungi terhadap keberadaan komunitas pelukis.
2. Memberikan masukan kepada unsur aparat penegak dibidang Hak Cipta, dalam menjalankan perlindungan kepada pencipta sesuai dengan aturan yang benar dan adil.
3. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk bahan pertimbangan bagi penyusun kebijakan, untuk lebih memperhatikan pemahaman pelukis terhadap Undang-undang Hak Cipta, untuk terciptanya hukum positif yang dapat mengakomodir keselarasan pelukis dalam melindungi karya lukis.

4. Memberikan masukan dalam menentukan parameter kejahatan Hak Cipta oleh Seniman, khususnya pelukis dan komunitasnya di daerah ibu kota Jakarta.

## E. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan :

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif<sup>18</sup>, dalam metode ini dilakukan dengan pendekatan *sosio-legal research* dan dengan pendekatan normatif<sup>19</sup>.

Dengan menggunakan pendekatan sosio-legal di karenakan bahwa hukum tidak dipandang sebatas peraturan atau kaidah-kaidah, dan norma-norma saja, namun juga meliputi bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat, dalam perspektif yang demikian maka perlindungan hukum dibidang Hak Cipta terhadap pelukis di Daerah Ibukota Jakarta, dapat diukur melalui budaya dan pendapat pelukis menurut Undang-undang melakukan pelanggaran. Namun hal itu belum tentu merupakan pelanggaran sesuai dengan rasa kebenaran dan keadilan, konsekwensinya adalah dituntut untuk melakukan sosialisasi kepada pelukis untuk melakukan perubahan terhadap budaya menyimpang yang tidak sejalan dengan hukum Hak Cipta.

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Pers, Jakarta, 1986.

<sup>19</sup> Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir abad ke 20, Alumni Bandung, 1994, hal. 142.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan secara normatif, adalah mencakup tentang Azas-azas hukum, Sistematika Hukum, Traf Sinkronisasi Hukum, Sejarah Hukum, Perbandingan hukum<sup>20</sup> yang juga didukung metode diskriptif dengan tujuan memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini dan melihat kaitan antara variable-variable yang ada<sup>21</sup>.

Langkah yang dilakukan dengan melihat permasalahan yang di bahas dan keterkaitannya dengan budaya pelukis, yang secara langsung juga akan membahas tentang Azas, sistematika, sejarah dan perbandingan yang diatur dalam Undang-undang Hak Cipta.

## 2. Sumber Data :

### a. Data primer :

Data ini di dapat dan diambil dari seniman, pencipta karya lukis, dan juga pelukis, kurator di daerah Jakarta, dosen seni lukis serta komunitas pelukis dan galeri-galeri yang tersebar di Ibukota Jakarta.

### b. Data Sekunder

adalah data yang bersumber dari kepustakaan, yang berisikan pengetahuan ilmiah, dan berbenrtuk Undang-undang nomor 12

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, CV. Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 14-15

<sup>21</sup> Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hal. 28

tahun 1997, Rancangan Undang-undang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, serta peraturan lainnya yang merupakan produk Legislatif dan Eksekutif, *TRIPs*, Konvensi Berne Perjanjian Internasional dibidang Hak Cipta

### 3. Teknik Pengumpulan Data :

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dan study kepustakaan artinya bahwa penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati langsung terhadap fenomena komunitas pelukis di daerah Jakarta, dengan cara melakukan wawancara, menggali pendapat dan kebiasaannya dalam menyongsong berlakunya Undang-undang Hak Cipta, serta mencari data pada kantor instansi pemerintah (Pemerintah daerah, Departemen Pendidikan Nasional, dan Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektua serta organisasi lainnya yang terkait), dan melakukan studi kepustakaan.

### 4. Teknik Pengecekan Keabsahan Data :

Pengecekan keabsahan data dimulai dari pemilihan sampel dan penentuan instrumen pengumpulan data serta penentuan indikasi dan konsep operasional yang jelas ditambah dengan teknik penginterpretasian data yang cermat, hal ini dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi, artinya bahwa pemeriksaan keabsahan data memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.



Menyebutkan bahwa triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi, yang diperoleh melalui waktu dan alat. Hal ini dapat dicapai dengan jalan sebagai berikut :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu,
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan,
5. membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.<sup>22</sup>

#### 5. Analisis Data.

Analisa dalam ilmu sosial, umumnya memakai fikiran yang logis termasuk dalam pengertian yang *logical analysis*, dan analisa dapat dilakukan dengan :

---

<sup>22</sup> Lihat Triangulasi Sumber yang ditulis Pottou dalam *Qualitative Data Analysis, A Source book of New Methods*, sebagaimana dikutip oleh Lexi J. Moleong dalam bukunya *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1995, hal. 178.

1. *The Clasification of data,*
2. *The Isolation of Patterns or trends, The determination of cause and effect relationship.*

Pembahasan dalam penelitian ini dilakukan dengan kajian secara normatif dan empirik, karena dalam analisa yang berkaitan dengan Aturan hukum dan unsur aparat penegak hukum dilakukan secara normatif, dan pembahasan terhadap komunitas pelukis dilakukan dengan empirik. Serta untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai Perlindungan hukum dibidang Hak Cipta terhadap komunitas pelukis, didaerah khusus Ibukota Jakarta. pendekatan yang dilakukan adalah Sosio – legal Research dimaksudkan untuk menjelaskan permasalahan yang diteliti dan hasil penelitian yang diperoleh dalam hubungan aspek hukumnya, menjelaskan realita empirik yang terjadi dalam masyarakat, dan *sosio-legal Approach* artinya hukum tidak hanya dipandang sebagai aturan atau kaidah-kaidah saja, akan tetapi juga meliputi bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat serta bagaimana hukum berinteraksi dengan lingkungan dimana hukum itu diberlakukan.

Penelitian dilakukan untuk mencari data dalam menangani masalah yang timbul dan yang diteliti, pada hakekatnya memberikan pedoman mengenai tata cara untuk mempelajari dan memahami

lingkungan-lingkungan yang dihadapi.<sup>23</sup> Dan metode penelitian hukum dapat memberi gambaran sebagai cara dan langkah yang berulang kali, sehingga menjadi pola untuk menggali pengetahuan tentang suatu gejala hukum.<sup>24</sup>

Adapun beberapa hal yang berkaitan dengan metode penelitian ini adalah :

1. Jenis Penelitian :

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, artinya memberikan gambaran seteliti mungkin, sementara jenis penelitian ini adalah dikategorikan sebagai penelitian hukum yang empirik, karena lebih cenderung tertuju pada budaya pelukis, sedang jenis data adalah data kualitatif, dan normatif karena menganalisa tentang aturan hukum positif.

2. Lokasi Penelitian :

Penelitian ini dilakukan di Daerah Ibukota Jakarta, pemilihan wilayah ini didasarkan bahwa kota Jakarta, merupakan sentral berbagai budaya dari daerah dan merupakan pusat pengembangan seni, yang mendapat pengaruh dari berbagai manca negara, serta merupakan pusat perekonomian dan perdagangan internasional, sehingga sangat

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Pers, Jakarta, 1994

<sup>24</sup> Joko Purwono, Metode Penelitian Hukum, Penerbit UNS Pers, 1995

potensi untuk terjadinya pelanggaran dibidang hak cipta, dan menarik untuk dijadikan penelitian.

Sedang analisa data adalah segenap rangkaian perbuatan pemikiran yang menelaah suatu hal secara mendalam, terutama mempelajari bagian-bagian dari suatu kebulatan, untuk mengetahui ciri-ciri masing-masing bagian, hubungannya satu sama lain dan perannya dalam keseluruhan yang bulat tersebut. Adapun teknik analisa data yang dilakukan dalam penulisan ini adalah dengan cara taksonomis artinya penelaahan dilakukan dengan lebih rinci dan mendalam yang difokuskan pada masalah-masalah tertentu, dan pentahapan analisis dilakukan dengan :

- a. Analisis deskriptif sebagai tahap awal untuk menentukan katagori.
- b. Menentukan domain-domain tertentu.
- c. Mencari atau menghubungkan domain yang satu dengan lainnya, yang didalamnya ada unsur keterkaitan, hubungan kontras dan sebab akibat, sehingga akan diketahui secara mendalam obyek yang diteliti.

Analisa dalam penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif, artinya dengan hasil katagori-katagori kualitatif, tetapi dapat juga berarti analisis dalam rangka penelitian kualitatif, analisa dengan katagori kualitatif misalnya pengkatagorian dalam bentuk pandangan lukisan oleh pria, wanita, jenis kelamin, tinggi rendahnya pendidikan,

sedangkan analisis pilihan – pilihan data dapat pula dikerjakan kearah terjadinya katagori yang kualitatif, artinya kearah terjadinya katagori kualitas yang tidak hanya saja memperlihatkan perbedaan nominal dan jenjang urutannya yang ordinal saja, namun kuantum jarak perbedaan antar katagori yang konsisten. Analisa kualitatif kaitannya dengan perlindungan hukum bagi pelukis, terutama pada penelitian masyarakat komunitas pelukis melihat keberadaan Unsur Aparat Penegak Hukum, dan Aturan hukumnya.

#### **F. Kerangka Teori.**

Ada empat syarat yang harus dipenuhi agar suatu aturan hukum tergolong eginar yaitu 1. Penggambaran yang baik dari suatu situasi yang dihadapi. 2. Analisa terhadap penilaian-penilaian dan menemukan jenjang nilai-nilai, 3. Ferifikasi dari hipotesa-hipotesa dan 4. Adanya pengukuran terhadap efek dari Undang-undang yang berlaku<sup>25</sup>. dan bagi Indonesia kebutuhan untuk memberi dasar filsafat bagi modernisasi, ingin tetap dikembalikan pada nilai-nilai seperti gotong royong, dan kekeluargaan, maka dengan segera akan dapat diketahui bahwa pandangan yang demikian tidaklah mudah, karena peranan culture lebih fungsional, relevansi pembinaan kebudayaan di tengah-tengah

---

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo, Pemanfaatan Sosial Bagi Pengetahuan Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1997, hal. 66

modernisasi industrialisasi lebih jelas, yaitu dalam mempertahankan stabilitas sosial<sup>26</sup>.

Pada dasarnya bangsa Indonesia adalah bangsa yang agraris, dan dalam mengembangkan segala bentuk aktifitasnya adalah dengan sistem komunal yang saling membutuhkan dan ketergantungan terhadap sesamanya, ditambah dengan situasi dan kondisi bangsanya yang berbeda-beda adat, kebiasaan, kulture, budaya, dan agama. Sehingga sangat kompleks keadaannya, untuk membuat aturan yang dapat mewadai, menjiwai dan dirasakan adil dan bena oleh masyarakatnya, perlu adanya penelitian sesuai dengan kondisi diatas.

Perubahan aturan HKI khususnya dibidang Hak Cipta dari waktu ke waktu mengalami perubahan, baik penambahan maupun pengurangan yang lebih didominasi oleh aturan yang berasal mancanegara datang dari negara maju, seperti dikemukakan oleh Wolfgung G. Friedman bahwa dinegara yang sedang berkembang kecenderungannya kurang diperhatikan, hukum dan ahli hukum lebih cenderung bertindak sebagai pembela kepentingan yang sudah mapan. Hal ini berbeda dengan negara demokratis modern yang telah menempatkan hukum dalam fungsinya yang sangat penting, dan berperan menonjol, hukum seharusnya hanya memberikan petunjuk saja, tetapi tidak dapat

---

<sup>26</sup> Satjipto Rahardjo, Hukum dan perubahan Sosial, Alumni, Bandung, 1983, hal. 49

menentukan jalan mana yang harus ditempuh<sup>27</sup>. disisi lain kerancuan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum, khususnya pada negara yang sedang berkembang antara lain, materi perundang-undangan tidak lengkap dan materi perundang-undangannya sudah tidak sesuai seyogyanya kecepatan perkembangan pembangunan dan masyarakat dapat diimbangi dengan pembuat Undang-undang, dengan demikian setiap anggota masyarakat dan setiap orang termasuk penyelenggara negara, bahwa pematuhan hukum merupakan hal yang terbaik<sup>28</sup>.

Dengan meminjam beberapa teori diatas, maka perubahan Undang-undang Hak Cipta dari waktu ke waktu yang lebih didominasi dari aturan yang berasal dari mancanegara dalam penerapannya belum sesuai harapan dan keinginan masyarakat, karena ternyata masih terdapat perbedaan persepsi yang diatur dalam undang - undang dengan persepsi dari seniman, khususnya komunitas pelukis. Langkah ideal yang diharapkan apabila hukum Hak Cipta dan materinya terkait dengan pelukis, digali dan berasal dari kebiasaan dan kondisi yang senyatanya pada komunitas pelukis yang dipadukan dengan aturan dari manca negara sehingga hukum itu digali dari masyarakat seniman untuk kemudian dituangkan dan diharapkan akan dapat menggelinding menjadi

---

<sup>27</sup> Todung Mulya Lubis dan Buxbaum Richard. M Peranan Hukum Dalam Perekonomian di Negara Berkembang, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1986, hal 2-3.

<sup>28</sup> Laden Marpaung, SH. Op cit hal. 4.

hukum positif. Hukum Hak Cipta selama ini lebih didominasi oleh aturan dari negara maju dan berasal dari mancanegara, dapat dijadikan pertimbangan setelah menemukan aturan yang digali dari nilai-nilai yang ada dimasyarakat, khususnya nilai pada komunitas pelukis, hal ini merupakan pandangan dari aliran *sociological of law* yang memandang bahwa untuk menentukan aturan sangat tergantung pada pilihan budaya dari masyarakat yang hendak menggunakannya, karena masyarakatlah yang menjadi sasaran, dan yang diatur oleh aturan tersebut. Masyarakat pada dasarnya memiliki klasifikasi abstrak mengenai nilai-nilai, norma-norma, teritorial, kepemimpinan, dan manajemen konflik lokal yang dalam banyak hal masih fungsional untuk menjawab kebutuhan komunitas<sup>29</sup>.

Komunitas pelukis di Jakarta dalam melindungi karyanya, khususnya pada masyarakat menengah kebawah lebih mengenyampingkan aturan Hak Cipta, dalam melakukan aktifitasnya lebih berprofesi sebagai tukang artinya kurang menghargai dan menjunjung tinggi keahlian dan kemampuan yang dimilikinya untuk dikomersilkan, hal ini karena faktor ekonomi, moral, agama, budaya, juga pada masyarakat tertentu walaupun sudah mengerti istilah original, namun merupakan tradisi seni, yang dimiliki dan merupakan sifat dari bangsa Indonesia secara umum. Misalnya seorang seniman di Bali akan sangat bersuka cita bila mana

---

<sup>29</sup> Soedjatmiko, Etika Pembebasan, LP3ES, Jakarta, 1994.



seninya diambil, diimitasi oleh orang lain, baik itu muridnya, atau sesama seniman, karena disini terjadi *act of giving* memberi yang berarti amalan terhormat dan mulia<sup>30</sup>

Disisi lain pada masyarakat menengah keatas seperti pelukis yang mempunyai pondok seni lukis, galeri, dan pelukis yang dalam menuangkan aspirasinya dengan fasilitas yang lebih, dalam melindungi karya cipta lukisnya selangkah lebih maju, jika dibandingkan dengan yang berprofesi sebagai tukang.

Dalam menentukan tolak ukur dan parameter kejahatan yang dilakukan oleh komunitas pelukis diantaranya dengan hukum positif yaitu Undang-undang Hak Cipta seperti diatur didalamnya bahwa Perbanyakan adalah menambah jumlah suatu ciptaan dengan perbuatan yang sama, hampir sama, menyerupai ciptaan tersebut dengan dengan menggunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk mengalih wujudkan sesuatu ciptaan. Mengalih wujudkan dimaksud adalah transformasi seperti patung dijadikan lukisan, cerita roman menjadi drama, drama bisa menjadi drama radio<sup>31</sup>

Persepsi mengalihwujudkan ada dua hal yang mendasari yaitu ide

---

<sup>30</sup> Agus Sachri, Seni, Desain, dan Teknologi, Pustaka, Volume I, Bandung, 1986, hal. 12.

<sup>31</sup> Lihat penjelasan Undang-undang nomor 12 tahun 1997, tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 6 tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 7 tahun 1987 tentang Hak Cipta.

dan ekspresi, hal ini senada dengan yang diatur dalam Undang-undang Hak Cipta bahwa Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara bersama sama atas inspirasinya, lahir suatu ciptaan benda serta kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Dalam bahasa hukum tersebut tidak ada kata ekspresi, namun yang dimaksud adalah ekspirasi.

Menurut J. Taylor yang dilindungi pada Hak Cipta adalah Ekspresinya dari ide, jadi bukan melindungi ide itu sendiri, sehingga yang dilindungi dalam bentuk nyata sebagai sebuah ciptaan, Ekspresi lebih dekat dengan kreatif yang menurut Hebert Read dalam bukunya *The Meaning Of Art ( A Pelican Book )*, sebagai *Will to Form* yang merupakan pancaran kepribadian seniman, *and there is no significant art with out this act of creative will.*<sup>32</sup> ( tidak ada kepastian seni tanpa aksi kemauan kreatif ), sedang proses kreatif yang selalu memiliki keinginan untuk membentuk dan selalu berada dalam kegiatan kreatif, pada proses kreatif ini seniman atau desainer terlihat dalam berbagai kegiatan yang dapat disingkat dalam periode-periode permulaan dan pengembangan, demikianlah kecenderungan yang diperkirakan selalu menyibukkan seniman. Sedangkan ketrampilan merupakan keahlian atau kreatifitas

---

<sup>32</sup> Ahmad Sadeli, Identitas seni dan Seni Bina Kebangsaan yang disampaikan dalam Seminar Kearah Identitas Kebangsaan Dalam Seni Bina, Kuala Lumpur, Januari 1981, halaman. 1

maksudnya menggunakan segenap sarana yang ada pada diri seniman tersebut pada halaman pertama (akal, rasa iman), secara tanggap, peka, tajam efektif, serta dinamikanya tetap didalam rangka ekonomi yang diharapkan dari seorang seniman.

Selanjutnya dalam menentukan tolak ukur dan parameter adanya pelanggaran dapat juga dilihat dari adanya suatu kasus yang terangkat di Pengadilan, disini akan terlihat pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan suatu perkara dibidang Hak Cipta, baik dalam kasus perdata maupun kasus pidana. Sehingga dari beberapa aturan yang diatur dalam Undang-undang dan pendapat para ahli seni ternyata terlihat dalam menentukan tolak ukur dan parameter dalam pelanggaran terhadap lukisannya yang diperbanyak atau digandakan atau dicuri ide maupun ekspresinya, karena lebih baik melukis lagi untuk dapat nilai tambah, dari pada mempersoalkan yang belum tentu akan mendapat kemenangan dan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.

Pelukis di daerah Jakarta dalam melindungi karya lukisannya, selangkah lebih maju dibandingkan dengan para pelukis yang ada didaerah, dikarenakan dikota ini lebih banyak diwarnai dengan tuntutan ekonomi. Namun dalam realitanya bahwa para pelukis juga belum mengetahui banyak tentang mana lukisan yang sudah menjadi milik umum (*public domain*), dan lukisan yang masih dilindungi oleh hukum dan masih ada pemiliknya yang menurut Undang-undang Hak Cipta

bahwa masa perlindungan terhadap Hak Cipta adalah selama hidup pencipta ditambah 50 tahun, setelah pencipta meninggal dunia. Sedangkan masalah Hak Cipta Pendaftarannya dengan sistem Negatif Deklaratif artinya boleh didaftar, dan boleh tidak didaftar dikantor Hak Cipta, dengan kata lain, bahwa didaftar atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang sama, sedang para pelukis lebih enggan untuk mendaftarkan ciptaannya, sehingga para pelukis akan sulit untuk mengklarifikasikan mana yang menjadi public domain dan yang tidak. Serta terhadap karya seni yang tidak diketahui siapa penciptanya, dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama termasuk seni lukis dipelihara dan dilindungi dan sebagai pemegang hak cipta terhadap luar negeri adalah negara, sehingga akan sulit untuk mengetahui suatu ciptaan siapa pemiliknya dan kapan mulai diciptakan, serta kapan menjadi publik domain.

Sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman terdiri dari tiga unsur<sup>33</sup>, yaitu substansi, struktur dan budaya hukum, dari ketiga unsur tersebut, maka budaya hukum yang paling menentukan dalam suatu system hukum akan berjalan atau tidak, dan budaya hukum mencakup tentang bagaimana persepsi masyarakat terhadap hukum, juga tentang peranannya dalam hukum, juga peranan masyarakat dalam menjaga ketertiban, dan hukum merupakan hak dari individu yang harus

---

<sup>33</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law* (New York – London : WW. Norton Company, 1984), hal. 218-230.

ditegakkan.

Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa tegaknya peraturan-peraturan hukum tergantung pada budaya masyarakatnya, dan budaya hukum masyarakat tergantung pada budaya hukum anggota-anggotanya, yang dipengaruhi oleh tradisi, agama, latar belakang pendidikan, lingkungan budaya, posisi atau kedudukan, dan kepentingan ekonomi. Budaya hukum disini adalah keseluruhan dari sikap-sikap warga masyarakat yang bersifat umum dan nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana hukum itu berlaku dalam masyarakat, dan hukum yang benar-benar diterima dan dipergunakan oleh masyarakat ataupun suatu komunitas tertentu sangat ditentukan oleh budaya hukum masyarakat komunitasnya.

Budaya hukum masyarakat Indonesia yang bersidat agraris, tidak bersumber pada nilai budaya yang berorientasi keberhasilan lewat karya manusia itu sendiri (tidak *Achievement oriented*), tetapi lebih terhadap amal dari pada karya untuk masyarakat dunia akherat<sup>34</sup>. Selanjutnya hal tersebut dijelaskan bahwa keadaan demikian tidak dijumpai pada masyarakat modern, dimana mobilitas sosial masyarakat menjadi semakin kompleks, pembagian kerja semakin meluas, individualitas menonjol, persaingan siantara sesama anggota masyarakat semakin

---

<sup>34</sup> Koentaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 1994, hal. 34-36.

kuat<sup>35</sup>.

Dalam memahami budaya hukum dalam suatu masyarakat dapat dilihat dari dua indicator yaitu :

1. Nilai-nilai yang berhubungan dengan sarana pengaturan dan penanganan Konflik, Nilai-nilai ini adalah dasar cultural dari system hukum dan Politik, religi, pada setiap tempat, dan waktu dalam suatu masyarakat,
2. Asumsi-asumsi dasar mengenai penyebaran dan penggunaan sumber daya yang ada dalam masyarakat, kebaikan dan keburukan sosial dlsb<sup>36</sup>.

Asumsi tersebut terdapat pandangan idiologi mengenai ekonomi, politik, dan sosial yang terus berubah-ubah, serta berbanding lurus dengan perubahan masyarakat, dengan kemungkinan secara kultural bersifat khusus atau sebaliknya, jika dihubungkan dengan penulisan ini maka budaya masyarakat seniman, khususnya pelukis didaerah Jakarta, dalam menghadapi berlakunya Undang-undang hak cipta, lebih cenderung berperilaku menyimpang artinya mereka menemukan kebiasaan tersendiri yang belum sesuai dengan tujuan dan cita-cita

<sup>35</sup> Cita Citrawinda Priapantja, Disertasi dalam mempertahankan gelar Doktor, dengan judul Budaya Hukum Indonesia, dalam menghadapi globalisasi Studi Kasus Perlidungan Rahasia Dagang Dibidang Farmasi, hal. 11.

<sup>36</sup> Daniel S. Lev, Lembaga Peradilan dan Budaya Hukum di Indonesia, yang ditulis dalam buku AG. Peters, Hukum dan Perkembangan Sosial ( Buku Sosiologi Hukum II ), Pustaka Sinar Harapan, 1998, hal. 192-193.

diberlakukannya Undang-undang Hak Cipta, karena perlindungan Hak Cipta Melingkupi Ekspresi dan bukan ide-ide, prosedur, metode-metode operasi, atau lingkup konsep-konsep matematika sebagaimana mestinya<sup>37</sup> yang secara normatif tidak diatur dalam Undang-undang Hak Cipta.

Permasalahan yang timbul, menjadi dasar penulis untuk melakukan penelitian terhadap pelukis, di daerah Jakarta, dan dengan menggali budaya serta kebiasaan para pelukis dalam melindungi karyanya, diharapkan dapat mengelidindingkan suatu temuan atau teori baru yang dapat menambah, merubah atau menjadi bahan masukan dalam hukum positif, sehingga hukum yang mengatur Hak Cipta, khususnya dibidang lukisan akan dapat menciptakan rasa aman antar komunitas pelukis dengan aturan hukum yang tertulis, dan pemberlakuannya di masyarakat komunitas pelukis dapat sejalan dengan kondisi dan situasi yang diharapkan, dan output dari penelitian ini juga dapat terwujudnya asosiasi pelukis yang dapat menyembadani pelukis dalam meningkatkan kualitas karya dan aspek ekonomi terutama royalti, serta dapat mengeluarkan sertifikasi, tanggapan kurator yang positif.

---

<sup>37</sup> Insan Budi Maulana, Kompilasi Undang-undang Hak Cipta, Paten, Merek dan Terjemahan Konvensi-Konvensi Dibidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 778.

## **G. Sistematika Penulisan :**

Gambaran penulisan thesis ini secara garis besar adalah sebagai berikut

### **Bab I : Pendahuluan**

Menguraikan mengenai Latar belakang, Permasalahan, Tujuan penelitian, Kontribusi Penelitian, Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini, Kerangka Teori, dan Sistematika Penulisan.

### **Bab II : Tinjauan Pustaka**

Menguraikan dan berisi tentang teori dan dasar-dasar pemahaman dalam menyatukan persepsi dan juga digunakan untuk membahas dan menganalisa hasil penelitian, mencakup tentang pengertian-pengertian, dan pendapat para ahli.

### **Bab III : Hasil Penelitian dan analisa / pembahasan.**

Merupakan sajian data dari hasil penelitian baik berupa data statistik, data quisioner dan dari study pustaka, yang dilakukan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Masyarakat komunitas pelukis, Pelukis, Pengadilan Niaga, Pemerintah Daerah Ibukota Jakarta, dan perlindungan hukum yang diatur dalam perjanjian internasional (TRIPs), dan aturan hukum tertulis yang berlaku di Indonesia, serta berisi tentang analisa dan pembahasan yang membahas dan



menjawab permasalahan, pembahasan ini didapat dari hasil penelitian, hal ini merupakan pengkajian dan penalaran serta penelusuran terhadap hasil penelitian tersebut.

#### **Bab IV : Penutup**

Berisi tentang Kesimpulan dari jawaban permasalahan sebelumnya yang menjadi obyek penelitian, yang dapat dimanfaatkan untuk langkah perbaikan serta Daftar Pustaka yang berisi tentang daftar urut dari literatur yang digunakan yang dapat berupa nama pengarang buku, Undang undang, Majalah serta bahan literatur lain yang mendukung dalam penulisan ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kajian Hak Kekayaan Intelektual :

Hak kekayaan Intellektual merupakan sumber daya yang mendasar dan sebagai parameter menandai tinggi rendahnya kemampuan kreatifitas sumber daya manusia suatu bangsa<sup>38</sup>. bahwa berpijak akan arti pentingnya HKI bagi suatu bangsa, maka langkah awal yang perlu dilakukan adalah dimengertinya cakupan HKI.

Aspek HKI sangat luas yang pada dasarnya terdiri atas :

- a. Hak Cipta (*Copy rights*).
- b. Hak Milik Industri yang terdiri atas :
  - Paten (*Patent*).
  - Merek (*Trade Mark*).
  - Rancangan Produk Industri (*Industrial Design*).
  - Informasi Rahasia Dagang (*Trade secret*).
  - Indikasi Geografis (*Geographical Indication*).
  - Denah Rangkaian Sirkuit (*Circuit Lay Out*).

---

<sup>38</sup> Dicky Rezady Munaf, Keynote Address disampaikan pada acara Simposium Nasional Hak Kekayaan Intelektual 200, Pembudayaan HKI di Lingkungan Pendidikan Menengah dan Kejuruan, diselenggarakan oleh Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi bekerjasama dengan Departemen Pendidikan Nasional, dan Departemen Kehakiman dan HAM, Jakarta, 22 Nopember 2000.

- Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)<sup>39</sup>

Dari uraian tersebut pengertian dan spesifikasi serta ciri obyek Hak Kekayaan Intelektual adalah sebagai berikut :

#### 1. Hak Cipta (*Copy rights*):

Hak Cipta adalah Hak khusus bagi penciptaan maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya ataupun memberi ijin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari uraian tersebut yang dimaksud dengan Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Dan yang dimaksud Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk khas ataupun juga dalam lapangan ilmu, seni dan sastra.

Pengumuman adalah pembacaan, penyuaran, penyiaran atau penyebaran suatu ciptaan, dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat oleh orang lain. Sedang memperbanyak adalah

---

<sup>39</sup> Chandra Manan Mangan, Retno Sumekar, Setyowati, Dody S. Budiwaskito, Rudyama Sugandi, Ismet Yusputra, Pembudayaan HKI Dalam Lingkungan Menengah dan Kejuruan, Program Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi Dalam Pembudayaan HKI disampaikan pada acara Simposium Nasional HKI 2000, Jakarta, 22 Nopember 2000.

menambah jumlah suatu ciptaan dengan perbuatan yang sama, hampir sama atau menyerupai ciptaan tersebut dengan menggunakan bahan bahan yang sama, maupun tidak sama termasuk mengalihwujudkan sesuatu ciptaan.

## **2. Paten (*Patent*) :**

Paten adalah Hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil invensinya dibidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Dari uraian tersebut yang dimaksud dengan Invensi adalah ide inventor yang dituangkan dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik dibidang teknologi dapat berupa proses, atau penyempurnaan, dan pengembangan produk atau proses. Sedang Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama sama melaksanakan ide yang dituangkan dalam kegiatan yang menghasilkan invensi.

Paten diberikan untuk invensi dengan syarat baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Langkah inventif artinya jika invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu dibidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga

sebelumnya. Sedang baru maksudnya adalah jika pada tanggal penerimaan, invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya artinya bahwa teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau diluar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan, atau melalui peragaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan invensi sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas<sup>40</sup>.

### 3. Merek (*Trade Mark*) :

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata huruf-huruf, angka-angka susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Dari uraian tersebut yang dimaksud dengan Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

---

<sup>40</sup> Undang-undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 13 tahun 1997 tentang Paten.

Hak Atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya<sup>41</sup>.

#### **4. Desain Industri (*Industrial Design*).**

Desain Industri adalah Suatu kreasi tentang bentuk , konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Hak Desain Industri adalah Hak yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesaian atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Sedang yang dimaksud dengan pendesaian adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan desain industri<sup>42</sup>.

#### **5. Rahasia Dagang (*Trade Secret*) :**

Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum dibidang teknologi dan atau bisnis mempunyai nilai ekonomi karena

---

<sup>41</sup> Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek.

<sup>42</sup> Undang-undang Nomor : 31 Tentang Desain Industri.

berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiannya oleh pemilik rahasia dagang. Sedang Hak Rahasia Dagang adalah hak atas rahasia dagang yang timbul berdasarkan Undang-undang.

Lingkup Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain dibidang teknologi dan / bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum<sup>43</sup>.

#### **6. Indikasi Geografis.**

Indikasi Geografis adalah tanda yang meng identifikasikan suatu barang sebagai berasal dari wilayah / daerah anggota peserta perjanjian Internasional, atau suatu daerah didalam wilayah tersebut, dimana tempat asal barang tersebut merupakan hal sangat penting bagi reputasi dari barang yang bersangkutan karena kualitas, dan karakteristiknya<sup>44</sup>.

#### **7. Desain Rangkaian Tata Letak Sirkuit Terpadu.**

Hak Desain tata Letak Sirkuit Terpadu adalah Hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesaian atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

---

<sup>43</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Tentang rahasia Dagang.

Dari uraian tersebut yang dimaksud dengan Pendesaian adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang didalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu didalam sebuah bahan semi konduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Sedang Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu<sup>45</sup>.

#### **8. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) :**

Perlindungan Varietas Tanaman adalah perlindungan Khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilaksanakan oleh Kantor Perlindungan Varietas

---

<sup>44</sup> Persetujuan Internasional Tentang Aspek-aspek Dagang Dari Hak Atas kekayaan Intelektual (Trade Related Aspec Of Intellectual Property Rights / TRIPs)

<sup>45</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu



Tanaman terhadap Varietas Tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.

Hak Perlindungan Varietas Tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan atau pemegang hak rekomendasi atas permohonan hak Perlindungan Varietas Tanaman. Dan Varietas yang dapat diberikan Perlindungan Varietas Tanaman adalah meliputi varietas dari jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil dan diberi nama<sup>46</sup>.

## **B. Berbagai Ketentuan Mengenai Hak Cipta**

### **1. Pengaturan Hak Cipta.**

Istilah yang berhubungan dengan hak cipta mempunyai pengertian dan pendapat yang berbeda beda antara para ahli yang satu dengan lainnya. Ada yang berpendapat istilah yang dimaksud adalah pencipta, pemegang hak cipta, Hak Cipta dan Ciptaan, mengumumkan ciptaan, memperbanyak ciptaan serta memberi ijin<sup>47</sup>

Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun untuk memberi ijin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan

---

<sup>46</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 29 tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

<sup>47</sup> Abdul Kadir Muhammad Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal. 324.

pembatasan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku. Dan hak khusus dari pencipta dimaksudkan tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu atau orang lain kecuali dengan ijin penciptanya<sup>48</sup>.

Hak Cipta adalah suatu hak yang memenuhi unsur :

- a. Adanya hak yang dapat dipindahkan atau dialihkan kepada pihak lain.
- b. Adanya hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun dan dengan jalan apapun tidak dapat lepas dari padanya<sup>49</sup>.

Hak Cipta didalam ilmu hukum dikenal sebagai hak kebendaan yang dikelompokkan dalam Hak kekayaan Intelektual, hak ini dapat memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda untuk dipertahankan kepada siapapun, dan hak kebendaan tersebut merupakan hak mutlak yang berarti obsolud, yang dipertentangkan atau dihadapkan dengan hak relatif yang hanya dapat dipertahankan kepada orang tertentu saja<sup>50</sup>

Dalam Kepustakaan hukum di Indonesia yang pertama dikenal adalah hak pengarang (*author right*) yaitu setelah berlakunya Undang-

<sup>48</sup> Gatot Supramono, Masalah Penangkapan, Penahanan dalam Tingkat Penyidikan Tindak Pidana Hak Cipta, Pustaka Kartini, Selayar, 1989. Hal. 7

<sup>49</sup> M. Hutahuruk. Peraturan Hak Cipta Nasional, penerbit irlangga, Jakarta, 1982, Hal. 11.

<sup>50</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata : Hukum Benda, Liberty, Jogjakarta, 1981, hal. 24.

undang Hak pengarang (*Auteurswet 1912 stb. 1912 No. 600*) dan kemudian menyusul istilah hak cipta, istilah Hak pengarang berkembang dari daratan Eropa yang menganut hukum sipil, sedang istilah hak cipta menganut sistem *Common law*.<sup>51</sup>

Secara haerfiah hak atas kekayaan intelektual Hak Cipta terdiri dari dua kata "hak" dan "Cipta", kata hak yang sering dikaitkan dengan kewajiban adalah suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas digunakan atau tidak. Sedang "Cipta" tertuju pada hasil kreasi manusia dengan menggunakan sumber daya yang ada padanya berupa pikiran, perasaan, pengetahuan, dan pengalaman, oleh karena itu Hak Cipta berkaitan erat dengan intelektual manusia itu sendiri yang berupa hasil kerja otak.

Hak Cipta disamping termasuk hak kebendaan juga mempunyai sifat *droit desuit*, yang senantiasa melekat dan tidak akan hilang sekalipun dibajak oleh pihak lain, termasuk pembajak dari luar negeri sekalipun, bahkan negara pencipta sekalipun tidak ikut dalam perjanjian internasional, maka sifat *droit desuit* tidak akan hilang, karena perjanjian internasional berfungsi untuk melindungi, sehingga kalau tidak menjadi anggota atau tidak meratifikasi konvensi

---

<sup>51</sup> Munawar Kholil, Sekilas Tentang Hukum Hak Cipta, disampaikan pada pelatihan dan Pemanfaatan HKI bagi mahasiswa yang mempunyai Karya Inovasi, UNS, Juli 1999, Surakarta.

internasional negara lain peserta konvensi, tidak wajib untuk melindungi<sup>52</sup>.

Hak cipta tidak terlindungi di negara lain bukan berarti bahwa *droit desuithnya* hilang, namun pemegang hak cipta dalam Undang-undang tidak memberikan jaminan terhadap pelanggaran yang terjadi, disini pemegang hak cipta akan mengalami kesulitan untuk melakukan gugatan jika terjadi pelanggaran hak oleh negara bukan peserta perjanjian.

Hak Cipta di Indonesia pertama kali dikemukakan melalui Kongres kebudayaan di Bandung tahun 1951, oleh Prof. Mr. Soetan Moh. Sjah, yang kemudian diterima sebagai pengganti istilah hak mengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya. Istilah hak mengarang merupakan terjemahan dari *Auteurs Rechts*, karena memberikan kesan bahwa ada penyempitan arti seolah olah yang dicakup hak pengarang itu hanyalah hak dari pengarang saja, atau yang ada sangkut putnya dengan karang mengarang, sedang istilah hak cipta itu lebih luas dan didalamnya mencakup tentang karang mengarang, sehingga istilah hak cipta digunakan dan dipakai dalam Undang-undang Hak Cipta Indonesia<sup>53</sup>.

---

<sup>52</sup> Mahadi, Hak Milik Imateriil, penerbit Badan Pembinaan Hukum Naional, Bina Cipta, Jakarta, 1985 hal. 75,.

LEPT-FCSTAK-UNDIP

Pengertian Hak Cipta menurut *Universal Copyright Convention /UCC* dalam pasal v disebutkan *Copyright shall include the exclusive right of the suthor to make, publish, and authorize the making and publikasion of translation of works protected under this convention*, Hak Cipta meliputi hak tunggal sipencipta untuk membuat menerbitkan dan memberi kuasa untuk membuat dan menerbitkan terjemahan daripada hanya yang dilindungi perjanjian ini<sup>54</sup>.

Hak cipta menurut UUC ini juga menjelaskan bahwa Hak Cipta merupakan hak monopoli yang diberikan kepada seorang pencipta suatu karya telah banyak dibatasi<sup>55</sup>. monopoli yang diberikan agar supaya dapat dikembangkan dan distimulir karya-karya pencipta demi kepentingan umum.

Hak kekayaan intelektual di Indonesia hukum *Intellectual Property Rights* yang pertama kali diterjemahkan menjadi Hak Milik Intelektual yang kemudian diterjemahkan menjadi Hak Atas Kekayaan Intelektual, atau HAKI, dan selanjutnya diubah dengan istilah Hak Kekayaan Intelektual atau HKI<sup>56</sup>, telah dimulai pada masa penjajahan Belanda

<sup>53</sup> Saidin, Aspek Hukum Hak kekayaan Intelektual, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal. 28.

<sup>54</sup> Terjemahan dikutip dari buku Hak Cipta, JCT. Simorangkir, Penerbit Jambatan Cetakan II, 1973, hal. 22

<sup>55</sup> Sunaryati Hartono, Pembahasan Mengenai Indonesia dan Konvensi-konvensi Internasional tentang Hak Cipta, Seminar badan Pembinaan Hukum Nasional, mengenai Hak Cipta, 1975.

<sup>56</sup> Edaran Dir Jen HKI.

dengan disyahrkannya *Octrooi Wet* nomor 136, tahun 1911 *Staatsblad* nomor 131 yang diikuti pula oleh *Industrial Eugendom Kolonien* 1912 yang memberikan perlindungan hukum pada Paten, Merek, dan desain<sup>57</sup>, dan menurut Undang-undang Hak Cipta 1912, yang dimaksud hak cipta adalah hak tunggal daripada pencipta, atau hak hak daripada yang mendapat hak-hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusasteraan, pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyaknya, dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan dalam Undang-undang<sup>58</sup>.

Hak Cipta menurut Konvensi Jenewa yang diselenggarakan pada tahun 1952, digambarkan sebagai hak tunggal dari pencipta untuk membuat, menerbitkan dan memberi kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang dilindungi.

Hak Cipta di Indonesia untuk pertama kali diatur sejak masa Hindia Belanda dengan Undang-undang Hak Cipta saat itu yaitu *Auteurswet* 1912 (*Staatsblad* No. 600), dan Indonesia baru berhasil menciptakannya melalui Undang-undang nomor 6 tahun 1982, tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 15, Tambahan

<sup>57</sup> Insan Budi Maulana, *Kompilasi Undang-undang Hak Cipta, Paten. Dan Merek, Terjemahan Konvensi-Konvensi Dibidang Hak Atas kekayaan Inteletual (HAKI)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal ix.

<sup>58</sup> JCT. Simorangkir, *Seminar Hak Cipta*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, PT. Bina Cipta, Bandung, 1975, hal. 44

Lembaran Negara 3217), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara No. 3362); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 12 tahun 1997 tentang Hak Cipta (lembaran negara tahun 1997 Nomor 29 dan Tambahan Lembaran negara nomor 3679),

Penyempurnaan ini dilakukan sehubungan dengan adanya perkembangan perekonomian yang berlangsung cepat ditingkat nasional maupun internasional, disamping itu juga dikarenakan Indonesia telah ikut dalam persetujuan mengenai Aspek-aspek dagang Hak Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, including Trade in Counterfeit Goods / TRIPs*) yang merupakan bagian dari persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*), dan secara rinci pengaturan Hak Cipta kecuali yang diuraikan diatas dasar hukum lainnya adalah :

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 14 Tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta.
- b. Peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penerjemahan dan atau Perbanyak Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, penelitian dan Pengembangan.

- c. Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor : M.01-HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan.
- d. Keputusan Menetri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.04.PW.07.03 Tahun 1988 tentang Penyidik Hak Cipta.
- e. Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor M.09-PR.07.06 tahun 1999 tentang Penunjukan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman untuk Menerima Permohonan Hak Atas kekayaan Intelektual.
- f. Keputusan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Inteletual, Nomor H.08.PR.07.10- Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksana Penerimaan Permohonan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual melalui Kantor Wilayah.

Perundang-undangan diatas sebagai sumber hukum Hak Cipta adalah *Yurisprodence* dan konvensi-konvensi Internasional, adapaun perjanjian multilateral dan bilateral yang berkaitan dengan Hak Cipta yang telah diratifikasi Indonesia diantaranya:

- a. Undang-undang Republik Indonesia nomor : 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Berne (*Berne Convention For the Protection of Literary and Arstistic Work*).



- c. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 1997 tentang Pengesahan Organisasi *WIPO (WIPO Copyright Treaty)*.
- d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 1988 tentang Pengesahan Persetujuan Peraturan Pemerintah republik Indonesia dengan Masyarakat Eropa mengenai Pemberian Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Atas Rekaman Suara (*Sound Recording*).
- e. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 1989 tentang Ratifikasi Persetujuan Perlindungan Hak Cipta antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Amerika Serikat.
- f. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 38 tahun 1993 tentang Ratifikasi Persetujuan Perlindungan Hak Cipta antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Australia.
- g. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 56 tahun 1994 tentang Ratifikasi Perlindungan Hak Cipta antara pemerintah republik Indonesia dengan Inggris.

## 2. Ruang Lingkup Hak Cipta

Hak Cipta merupakan bagian dari Hak milik intelektual, sedang istilah Hak milik intelektual merupakan terjemahan dari *Intellectual Property* juga dikenal dengan istilah *Intangible Property*, *Creative Property* dan *incorporeal Property*, di Perancis orang menyatakan

sebagai *Propriete Intellectuelle* dan *Propriete Industrielle*<sup>59</sup> dan di Belanda biasa disebut sebagai Milik Intelektual dan milik Perindustrian. Secara Tradisional Hak kekayaan Intelektual terdiri dari beberapa jenis dan menurut pengadministrasian dilakukan oleh *WIPO* yang dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu :

- a. Hak Cipta (*Copyright*).
- b. Hak Atas kekayaan Industri (*Industrial Property*), yang berisikan
  1. Paten (*Patent*).
  2. Merek (*Trademark*).
  3. Desain Produk Industri (*Industrial Design*).
  4. Penanggulangan Praktek Persaingan Curang (*repression Of Unfair Competition Practices*).<sup>60</sup>

*WIPO* adalah organisasi internasional yang mengadministrasikan Hak kekayaan Intelektual memakai istilah *Intellectual property* mempunyai pengertian yang luas mencakup antara lain karya kesusasteraan, artistik maupun ilmu pengetahuan (*scientific*), pertunjukan oleh para artis, kaset dan penyiaran audio visual, penemuan dalam segala bidang

---

<sup>59</sup> Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori, dan prakteknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 19.

<sup>60</sup> Bambang Kesowo, Pengantar Umum Mengenai Hak kekayaan Intelektual (HAKI) Di Indonesia, 1994, hal 23. menjelaskan bahwa pembagian Hak Kekayaan Intelektual tersebut didasarkan pada Konvensi Pembentukan The World Intellectual Property Organization (WIPO), yaitu Badan Khusus yang dibentuk PBB dengan tujuan untuk mengadministrasikan perjanjian multilateral mengenai HAKI.

usaha manusia, penemuan ilmiah, desain industri, merek dagang, nama usaha, dan penentuan komersial (*Commercial names and designnation*), dan perlindungan terhadap persaingan curang<sup>61</sup>, Namun demikian Hak milik intelektual juga merupakan suatu hak milik yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan maupun seni dan sastra. Pemilikannya bukan pada barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusianya, yaitu diantaranya berupa idea, dan informasi yang mempunyai nilai komersial atau nilai ekonomi<sup>62</sup>.

Hak kekayaan intelektual yang diuraikan diatas, salah satunya adalah bidang Hak Cipta yang mempunyai ruang lingkup sebagai berikut :

- (1) Hak Cipta adalah hak khusus bagi Pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pencipta dan atau penerima Hak Cipta atas karya film dan program komputer memiliki hak untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

---

<sup>61</sup> Muhamad Djumhana, R. Djubaedillah. Op cid. hal 18.

<sup>62</sup> WR. Cornish, Intellectual Property, Edisi ke-2, London : Swett and Maxwell, 1989, hal. 5.

- (3) Ketentuan mengenai hak untuk memberi izin atau melarang penyewaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku pula bagi produser rekaman suara.

Dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa :

- (1) Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak;
- (2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena:
- a. Pewarisan;
  - b. Hibah;
  - c. Wasiat;
  - d. Dijadikan milik Negara;
  - e. Perjanjian, yang harus dilakukan dengan akta, dengan ketentuan bahwa perjanjian itu hanya mengeani wewenang yang disebut didalam akta itu.

Dan yang diatur dalam Pasal 4

Hak Cipta yang dimiliki oleh Pencipta, demikian pula Hak Cipta yang tidak di umumkan yang setelah Penciptanya meninggal dunia menjadi milik atas warisnya atau penerima wasiat, tidak dapat disita<sup>63</sup>.

Ruang lingkup hak cipta yang dimaksud dalam penulisan ini adalah Ide dasar sistem hak Cipta untuk melindungi wujud hasil karya

---

<sup>63</sup> Lihat Rancangan Undang-undang Hak Cipta, pada pasal 2 sampai dengan pasal 4, dsism Bab II yang mengatur tentang ruang lingkup Hak Cipta.

manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya. Perlindungan hukum ini hanya berlaku kepada ciptaan yang telah berwujud secara khas, sehingga dapat dilihat, didengar atau dibaca.

### 3. Subyek Hak Cipta :

Pencipta dan kepemilikan adalah pokok utama dalam hukum hak cipta, karena seorang pencipta harus mempunyai kualifikasi tertentu agar hasil karyanya dapat dilindungi, dan seorang pencipta harus mempunyai identitas dan status untuk menentukan kepemilikan hak<sup>64</sup>.

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas yang bersifat pribadi, pencipta harus menciptakan sesuatu yang asli (*original*) dalam arti tidak meniru<sup>65</sup>.

Dalam konteks hukum yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan dan pengumuman resmi tentang pendaftaran pada Departemen Kehakiman (Kantor Hak Cipta, Ditjen HKI), dan atau orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta

---

<sup>64</sup> Muhamad Jumhana dan R Djubaidillah, op Cit. Hal. 62.

<sup>65</sup> CST. Kansil, Hak Milik Intelektual, (Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta), Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hal. 261.

pada suatu ciptaan, dan ceramah yang tidak tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa penciptanya, maka orang yang berceramah dianggap sebagai penciptanya<sup>66</sup>. Tujuan ketentuan ini untuk memberikan kejelasan dan Undang-undang nomor 12 tahun 1997 tentang Hak Cipta menentukan:

- a. Jika suatu penciptaan terdiri dari beberapa bagian tersendiri yang diciptakan dua orang atau lebih, maka yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang memimpin serta yang mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau jika tidak ada orang itu orang yang menghimpunnya, dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya.
- b. Jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain dibawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, maka penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan itu, Rancangan yang dimaksud disini adalah gagasan berupa gambar atau kata atau gabungan keduanya yang akan diwujudkan dalam bentuk yang dikehendaki pemilik rancangan. Oleh karena itu perancang disebut pencipta apabila rancangannya itu dikerjakan secara detail menurut desain yang sudah ditentukannya, dan tidak sekedar gagasan atau ide saja.

---

<sup>66</sup> Undang-undang nomor 12 tahun 1997 tentang Hak Cipta.

Sedang dibawah pimpinan dan pengawasan maksudnya dilakukan dengan bimbingan, pengarahan ataupun koreksi dari orang yang memiliki rancangan tadi baik secara langsung maupun tidak langsung.

- c. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, maka pihak yang untuk dan dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan adalah pemegang hak cipta, kecuali ada perjanjian lain antara kedua belah pihak, dengan tidak mengurangi hak sipembuat sebagai penciptanya apabila penggunaan ciptaan itu diperluas keluar hubungan dinas, yang dimaksud dengan hubungan dinas adalah hubungan kepegawaian negeri dengan instansinya.
- d. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, maka pihak yang membuat karya cipta itu sebagai pencipta adalah pemegang hak cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua belah pihak, yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah hubungan antara karyawan dengan pemberi kerja dilembaga swasta.
- e. Jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa suatu ciptaan berasal dari padanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai penciptanya, maka badan hukum tersebut dianggap sebagai

penciptanya, kecuali jika dibuktikan sebaliknya, badan hukum ini adalah instansi resmi.

- f. Negara memegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah dan benda budaya nasional lainnya.
- g. Hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, kareografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya dipelihara dan dilindungi oleh negara.
- h. Apabila suatu ciptaan sama sekali tidak diketahui penciptanya maka negara memegang Hak cipta atas ciptaan tersebut, kecuali terbukti sebaliknya, dalam hal ini harus didahului dengan upaya untuk mengetahui dan menemukan pencipta, baru setelah benar benar diyakini bahwa ciptaan yang bersangkutan tidak diketahui atau tidak ditemukan penciptanya, maka baru ditetapkan Negara sebagai pemegang Hak Cipta, ketentuan diatas dimaksudkan untuk menjaga kepentingan penciptanya. Dengan demikian bila penciptanya diketahui dan kemudian menyatakan bahwa ciptaan tersebut adalah karya lukisnya dengan disertai bukti-bukti yang syah dan meyakinkan melalui dokumen-dokumen yang dimiliki secara tersusun rapi, maka ketentuan dimaksud dalam pasal tersebut tidak berlaku.



#### 4. Ciri - ciri Hak Cipta :

Hak cipta adalah hak alam, dan menurut prinsip ini bersifat absolut, dan dilindungi haknya selama si pencipta hidup dan beberapa tahun setelahnya. Sebagai hak absolut maka hak itu pada dasarnya dapat dipertahankan terhadap siapapun, yang mempunyai hak itu dapat menuntut tiap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Dengan demikian suatu hak absolut mempunyai segi balik (segi pasif), bahwa bagi setiap orang terdapat kewajiban untuk menghormati hak tersebut.

Sifat hak cipta, adalah merupakan bagian dari hak milik yang abstrak (*incorporeal property*), yang merupakan penguasaan atas hasil kemampuan kerja, dari gagasan serta hasil pikiran. Dalam perlindungannya hak cipta mempunyai waktu yang terbatas, dalam arti setelah habis masa perlindungannya karya cipta tersebut akan menjadi milik umum<sup>67</sup>.

Pemilik hak cipta bersifat eksklusif. Hak ini mempunyai kemampuan melahirkan hak yang baru, jadi satu karya cipta mempunyai beberapa hak yang terikat pada satu ikatan hak. Hak yang banyak tersebut dalam pemakaiannya seperti dalam rangka pengalihan hak bisa dilakukan secara menyeluruh, maupun secara terpisah-pisah.

---

<sup>67</sup> Muhamad Djumhana, dan R. Djubaedillah, Op Cid. Hal. 55.

Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-undang No.6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, hak cipta adalah hak khusus bagi Pencita maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak khusus ini maksudnya adalah bahwa tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak-hak si pencipta kecuali dengan izinnnya.

Selanjutnya sebagai pengembangannya pada ketentuan pasal lainnya maka kita dapat mengenali ciri utama Hak Cipta, yaitu:

1. Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak (Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta).
2. Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya ataupun sebagaian karena : pewarisan, hibah, wasiat, dijadikan milik negara, perjanjian yang harus dilakukan dengan akta, dengan ketentuan bahwa perjanjian itu hanya mengenai wewenang yang disebut dalam akta tersebut (Pasal 3 ayat (2) Undang-undang No. 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta).
3. Hak yang dimiliki oleh pencipta, demikian pula Hak Cipta yang tidak diumumkan, yang setelah penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau penerima wasiat, tidak dapat disita (Pasal 4 Undang-undang No. 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta).

Ciri hak cipta lainnya adalah digolongkan sebagai hak milik perorangan yang tidak berwujud. Hak ini bersifat khusus karena hanya diberikan kepada pemilik atau pemegang hak yang bersangkutan untuk dalam waktu tertentu memperoleh perlindungan hukum guna mengumumkan, memperbanyak, mengedarkan, atau memberi ijin kepada orang lain untuk melaksanakannya<sup>68</sup>. pemegang Hak Cipta mempunyai hak yang disebut eksklusif yaitu menyampingkan orang lain untuk mengumumkan, memperbanyak atau mengedarkan kecuali atas ijin pemilik atau pemegang hak yang bersangkutan. Sedang ciri yang lebih baku dari hak cipta adalah bagian dari hak kekayaan intelektual yang menyangkut tentang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

## **5. Hak Ekonomi dan Moral serta Salinan suatu karya Cipta :**

### **5.1. Hak Ekonomi (*economic Right*).**

Hak cipta sebagai hak manual eksklusif terdiri dari dua macam hak yaitu hak ekonomi (*economic Right*), dan hak moral (*moral right*).<sup>69</sup> hak ekonomi tersebut berkembang dengan pemanfaatan hak secara komersial, suatu ciptaan memerlukan pengorbanan waktu, tenaga. Maka hasil suatu ciptaan dikelola secara komersial untuk dapat

---

<sup>68</sup> Bambang Kesowo, Pengantar Umum Mengenai Hak kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia, op cit. Hal. 26.

<sup>69</sup> Sanusi Bintang, Op Cid hal. 4

mengembalikan modal dan memperoleh keuntungan, pendapat tersebut dikuatkan oleh Komen dan Varlande yang mengkwalifikasikan dari hak ekonomi menjadi hak reproduksi yaitu memperbanyak dan menerbitkan. Hak eksklusif yaitu memainkan dan mempertunjukkan. Hak Adopsi yaitu memindahkan dan mengalihkan, dan hak interpretasi yaitu menerjemahkan atau mengalihkan bahasa<sup>70</sup>. dalam hak moral right lebih ditunjukkan kepada manifestasi dari adanya pengakuan terhadap hasil karya orang lain yang tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi lebih berwujud wewenang dan kekuasaan serta perasaan naluri apabila seseorang melanggar atau menambah dari suatu karya cipta.

Hak Ekonomi adalah Hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak ekonomi ini pada setiap Undang-undang Hak Cipta selalu berbeda, baik terminologinya, jenis hak yang diliputinya ruang lingkup dari tiap jenis hak ekonomi tersebut<sup>71</sup>. Sedang yang dimaksud dengan Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seseorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya, Secara umum setiap negara, minimal mengenal dan mengatur hak ekonomi, dan secara rinci pengaturannya dapat dibagi atas :

---

<sup>70</sup> JTC Simorangkir, Op Cid. hal. 62.

**a. Hak Reproduksi atau hak penggandaan (*reproduction right*).**

Pelaku memiliki hak khusus untuk melarang / memberi ijin penggandaan dalam segala bentuk dan cara baik langsung maupun tidak langsung karya pertunjukan yang telah diwujudkan dalam rekaman<sup>72</sup>. Dalam hal lukisan yaitu setelah suatu lukisan diwujudkan dalam bentuk jadi, maka pelukis dapat melarang atau memberi ijin kepada pihak lain untuk digandakan.

Hak pencipta untuk menggandakan ciptaannya, ini merupakan penjabaran hak ekonomi si pencipta, dalam istilah yang diatur dalam Undang-undang hak cipta istilah hak reproduksi sama dengan perbanyakan, yaitu menambah jumlah suatu ciptaan dengan pembuatan yang sama, hampir sama atau menyerupai ciptaan tersebut dengan mempergunakan bahan – bahan yang sama maupun tidak sama. Termasuk mengalihwujudkan suatu ciptaan. Bentuk penggandaan atau perbanyakan ini bisa dilakukan secara tradisional maupun melalui peralatan modern. Hak reproduksi ini juga mencakup perubahan bentuk ciptaan satu ke ciptaan lainnya. Misalnya rekaman musik, pertunjukan drama, juga pembuatan dublikat dalam rekaman suara dan film.

---

<sup>71</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah. Op Cid. Hal. 65

<sup>72</sup> Pengaturan neighboring Rights dalam WIPO Performance and Phonogram Treaty, Article 7 (WPPT 1996).

Hak ini dikenal dan diatur dalam Konvensi Berne maupun konvensi Universal, sehingga setiap negara yang memiliki Undang-undang Hak Cipta selalu mencantumkannya.

**b. Hak Adaptasi (*adaptation right*).**

Hak ini mengadakan adaptasi, dapat berupa penerjemahan dari bahasa satu ke bahasa lain, aransemen musik, dramatisasi dari non dramatik, mengubah menjadi cerita piksi dari karangan non fiksi, atau sebaliknya. Hak ini diatur dalam konvensi Berne maupun konvensi Universal (*Universal Copyright Convention*).

Karya cetak berupa buku misalnya novel mempunyai hak turunan yaitu diantaranya hak film (*Film Rights*), hak dramatisasi (*Dramatitation rights*), hak penyimpanan dalam media elektronik (*elektronic rights*), Hak film dan dramatisasi adalah hal yang timbul bila isi novel tersebut diubah menjadi isi skenario film, atau skenario drama yang bisa berupa opera, balet maupun drama musikal.

Dalam masalah pertunjukan inipun termasuk mengalihwujudkan yaitu mentransformasikan sesuatu ciptaan kedalam bentuk karya cipta lainnya. Seperti patung dijadikan lukisan, cerita roman menjadi drama, drama bisa menjadi drama radio, dan pengalihwujudan ini menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hak Cipta merupakan kejahatan.

**c. Hak Distribusi (*Right Of Distribution*) :**

Pencipta berhak melarang / memberi ijin untuk menyediakan rekaman pertunjukan aslinya kepada masyarakat baik melalui penjualan baik melalui penjualan atau melalui cara-cara pengalihan pemilikan lainnya. Hak distribusi adalah suatu hak yang dimiliki oleh pencipta untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaannya. Penyebaran tersebut dapat berbentuk penjualan, penyewaan atau bentuk lain yang maksudnya agar suatu ciptaan tersebut dapat dikenal oleh masyarakat. Dalam hal ini termasuk pula dalam bentuk pengumuman seperti yang disebutkan dalam bahasa hukum yang diatur dalam Undang-undang Hak Cipta. Pengumuman artinya pembacaan, penyaraan, penyiaran atau penyebaran sesuatu ciptaan, dengan menggunakan alat apapun dengan cara sedemikian rupa sehingga ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat oleh pihak lain.

Dari hak distribusi ini dapat dimungkinkan timbul hak baru berupa "*foreign right*" yaitu suatu hak yang dilindungi diluar negaranya. Misalnya suatu karya cipta berupa lukisan, atau buku, karena suatu lukisan atau buku tersebut sangat menarik dan digemari dinegara lain, dengan demikian lukisan atau buku tersebut didistribusikan dinegara tersebut, maka lukisan ataupun buku tersebut mendapat

perlindungan sebagai "*foreign right*". Konsekuensinya pemilik hak cipta akan mendapatkan royalty dari penggandaan dan perbanyakan di mancanegara / negara lain yang memperbanyak.

**d. Hak Penyiaran (*broadcasting Right*).**

Hak menyiarkan bentuknya berupa mentransmisikan suatu ciptaan oleh peralatan tanpa kabel. Hak penyiaran ini meliputi penyiaran ulang dan mentransmisikan ulang. Ketentuan ini telah diatur dalam Konvensi Berne, Konvensi Universal juga Konvensi tersendiri, misalnya konvensi Roma 1961, dan Konvensi Brussel 1974, yang dikenal dengan *Relating to the Distribution of Programme carrying signals transmitted by satellite*, hanya di beberapa negara hak penyiaran ini masih merupakan cakupan dari hak pertunjukan.

Di Undang-undang Hak Cipta dijelaskan bahwa untuk kepentingan nasional, maka dapat dilakukan pengumuman sesuatu ciptaan melalui radio atau televisi yang diselenggarakan oleh Pemerintah, dengan tidak perlu minta ijin terlebih dahulu dari pemegang hak cipta, asalkan kepada pemegang hak cipta diberi ganti rugi atau royalty yang layak. Sehingga publikasi suatu lukisan untuk kepentingan negara tidak perlu minta ijin lebih dulu kepada pelukisnya dengan catatan pelukisnya diberikan imbalan berupa royalty yang layak.



**e. Hak Programa Kabel :**

Hak ini hampir sama dengan hak penyiaran hanya saja mentransmisikannya melalui kabel. Badan televisi mempunyai suatu studio tertentu, dari sana disiarkan program-program melalui kabel ke pesawat pada pelanggan. Jadi dapat dipastikan bahwa siarannya bersifat komersial, dari sini jika suatu lukisan diakses dan ditayangkan atau dipropagandakan, pihak pelukis menerima royalty.

**f. *Droit de suite* :**

*Droit de suite* sesuai yang diatur oleh WIPO yang tercantum dalam buku *Guide to the Berne Convention* merupakan hak tambahan, dan bersifat kebendaan. Hak ini juga diatur dalam pasal 14 bis Konvensi Berne revisi Brussel 1948.

**g. Hak penampilan (*performance Right*).**

Biasanya hak ini dimiliki oleh pemusik, dramawan, maupun seniman lainnya yang karyanya dapat terungkap dalam bentuk pertunjukan, pengaturan tentang hak pertunjukan ini dikenal dalam konvensi berne maupun konvensi Universal bahkan diatur tersendiri dalam konvensi Roma. Di Indonesia hal ini diatur dalam hak eksklusif, dan dilindungi selama 28 tahun. Dan yayasan yang mengorganisir orang atau badan yang sering mempertunjukkan dikenal dengan "*Public House Society*" adalah Yayasan Karya Cipta

Indonesia (YKCI), dan ASIRI, sedang dalam lukisan sangat kecil untuk menampilkan hak ini, dan belum diatur tentang organisasi yang memungut royalty bagi yang memamerkan pertunjukan.

#### **h. Hak Pinjam Masyarakat (*Public Lending Right*).**

Hak ini dimiliki oleh pencipta yang karyanya tersimpan di perpustakaan, dimana pencipta berhak atas suatu pembayaran dari pihak tertentu karena karya yang diciptakannya sering dipinjam oleh masyarakat dari perpustakaan milik pemerintah tersebut, yang pembayarannya kepada pencipta ditanggung oleh pemerintah, hak inipun dialihkan kepada pihak lain baik perorangan maupun badan hukum<sup>73</sup>.

### **5.2. Hak Moral (*Moral Right*).**

Hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi sipencipta (reputasi). Konsep hukum ini berasal dari hukum Kontinental yaitu berasal dari negara perancis, maksudnya adalah hak pencipta (*droit auteur, author rights*), terbagi menjadi hak ekonomi untuk mendapatkan keuntungan, yang bernilai ekonomi seperti uang. Dan hak moral yang menyangkut perlindungan atas reputasi sipencipta.

Pemikiran hak cipta suatu karya cipta dapat dipindahkan kepada pihak lain, namun hak moral ini tidak bisa dipindahkan dan tetap

---

<sup>73</sup> JM. Cavendis, A, Handbook of Copyright in British Publishing Practice, Cetakan kedua London, Cassel, 1984, hal.120.

melekat pada pemilik karya cipta tersebut, hak moral merupakan hak yang khusus serta kekal yang dimiliki oleh sipenciptanya atas hasil ciptaannya, dan hak itu tidak dapat dipisahkan dari penciptanya. Hak ini mempunyai 3 dasar yaitu hak untuk mengumumkan (*the right of publication*), Hak paterniti (*the right of paternity*). Dan hak integritas (*the right of integrity*), Komen dan Verkade berpendapat bahwa hak moral ini meliputi :

- a. Larangan untuk mengadakan perubahan dalam ciptaan.
- b. Larangan mengubah judul.
- c. Larangan mengubah penentuan pencipta,
- d. Hak untuk mengadakan perubahan<sup>74</sup>.

Pengaturan hak moral diatur dalam Konvensi berne, yaitu pada revisi Roma 1929, pada pasal 6 bis, yang kemudian disempurnakan pada Konvensi Brussel 1929, dengan menambah adanya unsur *originalitas*, dan direvisi lagi melalui Konvensi Stockholm dengan menambahkan jangka waktu perlindungan. Yang diatur dalam Undang-undang Hak Cipta Indonesia dijelaskan bahwa Pencipta atau ahli warisnya berhak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta, supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya., dan tidak boleh

---

<sup>74</sup> C.J.T Simorangkir, Hak Cipta Lanjutan II, Cetakan Pertama Jakarta, PT. Jambatan, 1979, hal. 39.

mengadakan perubahan suatu ciptaan kecuali dengan persetujuan pencipta atau ahli warisnya. Dalam hal pencipta telah menyerahkan hak ciptanya kepada pihak lain, selama pencipta masih hidup diperlukan persetujuannya untuk mengadakan perubahan termaksud, dan apabila pencipta telah meninggal dunia izin dari ahliwarisnya,

Kemudian ketentuan dimaksud berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul ciptaan, pencatuman dan perubahan nama, atau nama samaran pencipta. Dan pencipta berhak mengadakan perubahan pada ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

Hak moral juga mencakup hak untuk menyatakan keberatan terhadap tindakan perusakan, pemotongan atau perubahan karya yang bersifat merugikan nama baik atau reputasinya. Hak ini berlangsung sekurang-kurangnya sampai dengan berakhirnya hak ekonomi setelah pelaku meninggal, dan dilaksanakan oleh orang atau lembaga yang menurut ketentuan Undang-undang memang ditunjuk untuk itu<sup>75</sup>.

### **5.3. Hak Salinan (*Neighbouring Right*).**

Hak Cipta yang bersifat original apabila dibuat suatu turunan, maka turunannya juga dilindungi, yang disebut dengan Salinan (*neighbouring rights* atau *ancillary rights*), Ciptaan yang dilindungi hak salinan ini sangat banyak berhubungan dengan perangkat teknologi,

---

<sup>75</sup> Henry Soelistyo Budi, Perlindungan Hak-hak yang berkaitan dengan Hak Cipta dan Permasalahannya, disampaikan dalam Seminar, tanggal 27 Nopember 1997.

misalnya fasilitas rekaman, fasilitas pertunjukan, perlindungan ini hanya tertuju pada orang yang berkecimpung dalam bidang pertunjukan, perekaman dan badan penyiaran. Adapun hak dari ketiga bidang yang dilindungi tersebut adalah :

- a. Mengawasi penampilan yang digelarkannya.
- b. Mengawasi badan penyiaran yang menyiarkan penampilan yang digelarkan.
- c. Mengawasi reproduksi penampilan-penampilan yang berikutnya.
- d. Mengawasi penyiaran rekaman pagelaran pada umum.

Para pihak yang berkecimpung dalam usaha rekaman atau prosedur rekaman mempunyai hak :

- a. Merekam ulang (*reproduction rights*).
- b. Mempertunjukkan rekaman kepada umum (*the public performance right*).
- c. Menyiarkan rekaman (*broadcasting right*).

Sedang Badan penyiaran mempunyai hak :

- a. menyiarkan dan mereproduksi suatu siaran.
- b. Merekam suatu ciptaan (*recording right*).
- c. Menampilkan kepada umum (*public performance right*).

Hak Salinan mendapat perhatian Internasional pada tahun 1928, yaitu pada waktu diadakan revisi Konvensi Berne di Roma, dan diakui

UPT-PUSTAK-UNDIP

melalui perlindungan hak "*performers*" yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan konvensi khusus yang disebut *International Convention Protection for performance Produser of Ponograms and broadcasting Organization*, lam perlindungannya minimal 20 tahun.

Pengaturan selanjutnya melalui Konvensi Roma tahun 1961, diantaranya mengatur perlunya memberikan tanda P dalam lingkaran yang disertai petunjuk tahun pertama direkam, serta nama dari sipemilik<sup>76</sup>.

#### **6. Pendaftaran Hak Cipta :**

Hak Cipta ada secara otomatis ketika suatu ciptaan lahir dari seorang pencipta, dengan demikian pendaftaran hak cipta tidak merupakan suatu keharusan, karena tanpa pendaftaranpun hak Cipta dilindungi, hanya mengenai ciptaan yang tidak didaftarkan akan sukar dan akan memakan waktu dalam pembuktian hak ciptanya dari pada ciptaan yang telah didaftarkan.

Menurut istilah hukum bahwa pendaftaran Hak Cipta menganut sitem negatif deklaratif artinya bahwa pendaftaran bukan menerbitkan hak akan tetapi pendaftaran hanya sebagai alat bukti pemegang

---

<sup>76</sup> International Convention For The Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organization, sering disebut Roma Convention 1961 (konvensi Roma 1961), hingga kini belum ada perubahan.

terhadap Hak Cipta<sup>77</sup>, dengan pengertian lain didaftar ataupun tidak didaftarkan mempunyai kekuatan hukum yang sama, fungsi pendaftaran semata-mata untuk memudahkan pembuktian.

Pendaftaran tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti maupun bentuk dari ciptaannya, akan tetapi pendaftar pertama seolah-olah bisa dianggap sebagai penciptanya, karena ciptaan yang terdaftar akan lebih mudah membuktikan daripada ciptaan yang belum didaftarkan, karena dalam daftar umum ciptaan telah tercantum sejumlah data dan keterangan yang menyangkut ciptaan<sup>78</sup>.

#### **7. Sejarah dan Periodisasi perkembangan pengaturan Hak Cipta.**

Pada mulanya hak cipta timbul kurang lebih 2500 tahun yang lalu, di Yunani oleh seorang bernama Pehriad berhasil menggunakan dan menemukan titik (.), dan koma (,), kedalam bahasa tertulis, hal ini merupakan suatu penemuan yang kelak kemudian hari tidak ternilai faedahnya dalam dunia tulis menulis, dan pembacaan tulisan-tulisan itu, untuk berhenti, untuk bernafas sesudah selesai suatu pemberitaan atau sebagian dari pada pemberitaan itu, maka jasa titik dan koma itu sangat besar. Hal ini dilanjutkan oleh anaknya Pehriad, yang bernama Apullus sebagai ahli waris dari orang tuanya, kemudian pindah dari Yunani ke Roma, dan mendapat pengakuan dari penguasa di Roma.

---

<sup>77</sup> Munawar Kholil Op Cit. hal. 12

Hak Cipta Apullus diakui, didaftarkan dan diberi penghargaan, dan konsekwensinya perbanyakkan untuk tiap-tiap pemakaian, dan pengumuman, hak cipta tersebut, Appulus mendapat royalty atau honorarium sebagai akibat dari Hak Cipta, namun honararium tersebut dikembalikan pada pemerintah.

Hak Cipta yang lahir di Negara Inggris, pada masa kerajaan yang dipimpin oleh Raja Richard III pada tahun 1556, yaitu mengatur tentang Percetakan, selanjutnya dikeluarkan dekrit yang disebut dengan *Chamber* yang mengatur bahwa setiap penerbitan buku memerlukan ijin, dan siapapun dilarang untuk menggandakan dan mencetak tanpa ijin, dan selanjutnya pada tahun 1643 keluar peraturan yang melarang mencetak dan mengimpor buku tanpa ijin yang syah, dan tanpa terdaftar dalam daftar Stationer Company. Pada tahun 1709 dikeluarkan Undang-undang yang dikenal dengan nama *Act Of Anne* berisi tentang Perlindungan terhadap penerbit, dan pihak-pihak yang syah menggandakan buku, didalamnya juga mengatur hak eksklusif bagi penerbit untuk menjual hasil cetakannya selama 21 tahun. Hak Cipta muncul di Eropa Continental, mulai berkembang setelah adanya revolusi Perancis pada tahun 1789, yang dikenal dengan perlindungan terhadap Hak Cipta, Misalnya di Venesia ( Italia )

---

<sup>78</sup> Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah op cid. Hal. 88.



pada tahun 1516 telah ada aturan tentang Hak Cipta yang menjamin monopoli untuk mencetak buku dengan perlindungan selama 5 (lima) tahun, yang kemudian diperbaiki dengan Undang-undang tahun 1603, didalamnya mengatur hak eksklusif dari penerbit untuk menjual selama 14 tahun, yang dapat diperpanjang waktunya sampai dengan 14 tahun. Pada tahun 1842 diperbarui perlindungan Hak Cipta tersebut menjadi selama hidup pencipta ditambah 7 (tujuh) tahun setelah meninggal dunia.

Pada tahun 1886 di swiss diadakan Konvensi Internasional yang disebut dengan Convensi Bern, yang kemudian dikenal dengan nama *Convention For The Protection Of Literary And Artistic Works*, dan pada tahun 1952 di Jenewa diadakan Konvensi kedua yang dikenal dengan nama *Universal Convention Of Copy Right*, yang dijadikan pedoman bagi negara-negara untuk mengatur tentang Hak Cipta, sampai dengan tahun 1989 telah ada 81 negara yang meratifikasi terhadap aturan tersebut.

Ketentuan hukum tertulis mengenai lukisan di Indonesia pertama kali diatur masuk didalam ketentuan hukum Hak Cipta, pada masa penjajahan belanda, ketentuan Hak Cipta diatur berdasarkan *Auteurswet 1912 (Staatsblad nomor 600 tahun 1912)*, yang berkenaan dengan penciptaan dibidang ilmu pengetahuan kesenian dan

kesusasteraan, hak cipta berdasarkan *Auterswet* 1912 merupakan hak mutlak.<sup>79</sup>

Aturan Hak Cipta tersebut berlaku sampai dengan Indonesia merdeka, bahkan setelah Indonesia merdeka *Auterswet* 1912 mengenai Hak Cipta masih tetap berlaku sebagai hukum positif, ketentuan hukum ini berdasarkan pada Undang-undang Dasar 1945, pada pasal dua aturan peralihan, menjelaskan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar.<sup>80</sup> Maka *staatsblad* 1912 nomor 600 mengenai Hak Cipta tersebut tetap berlaku, namun dalam rangka pembangunan dibidang hukum, demi mendorong dan melindungi karya cipta, penyebaran hasil karya ilmu, seni dan sastra serta percepatan pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa dan untuk menyesuaikan kebutuhan serta cita-cita hukum nasional, Pada tahun 1961 di Roma diadakan Konvensi Internasional dibidang Hak Cipta dengan nama *International Convention Protection For Performer, Producers Of Phonograms and Broadcasting Organization*, Konvensi ini dengan tujuan melindungi karya cipta dibidang pertunjukan, rekaman dan penyiaran, dengan jangka waktu

---

<sup>79</sup> Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Hak Atas kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hal. 3-4.

<sup>80</sup> Lihat penjelasan Undang-undang Dasar 1945 pada pasal 2 aturan peralihan.

perlindungan selama 20 tahun, selanjutnya diperbarui dengan konvensi di jenewa pada tahun 1971, salah satu kesepakatan dalam keputusan tersebut adalah mencantumkan tanda huruf P dalam lingkaran yang disertai dengan tahun pertama kali direkam, dan menunjukkan nama pemilik hak cipta, yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara, dan selanjutnya Indonesia untuk melindungi Hak Cipta maka pada tanggal 12 April 1982, ditetapkan Undang-undang nomor 6 tahun 1982, tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982, nomor : 15, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor : 3217), untuk memberikan perlindungan hukum terhadap Hak Cipta dan untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Dan semakin meningkatnya pelanggaran pembajakan yang sudah membahayakan dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat pada minat untuk mencipta khususnya, maka disesuaikan ketentuan Hak Cipta tersebut pada tanggal 19 September 1987 ditetapkan Undang-undang nomor 6 tahun 1987 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987, nomor : 42 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3362).

Perubahan tersebut dilakukan karena Undang-undang yang lama sudah tidak sesuai dengan kebutuhan, pada *Auterswet* 1912 belum mencakup hak cipta pada bidang teknologi serta tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional, karena jika dihubungkan dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 33 UUD 1945 tidak mengenal adanya hak Mutlak yang dimiliki oleh *Auterswet* 1912, melainkan mempunyai fungsi sosial<sup>81</sup>. Alasan lain untuk dilakukan terhadap *Auterswet* 1912, antara lain telah timbul suara masyarakat yang mensinyalir adanya perbedaan nasib yang kurang memuaskan antara pencipta dengan orang-orang yang mempergunakan ciptaan itu, belum adanya suatu badan atau organisasi yang memperjuangkan hak pencipta serta Peraturan yang berlaku tentang Hak cipta belum dikenal masyarakat<sup>82</sup>.

Perubahan tersebut diakibatkan adanya perkembangan dan perubahan keadaan diantaranya pengumuman suatu hak cipta sama dengan pendaftaran. Adanya Dewan Hak cipta, dan dalam pendaftaran Hak Cipta tidak diwajibkan namun, jika didaftarkan akan memudahkan dalam pembuktian. Dan sistem pendaftaran Hak cipta

---

<sup>81</sup> Laden Marpaung, *ibid* hal. 11

<sup>82</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya Dalam Pembangunan Akademika*, Presindo, Jakarta, 1996, hal. 102.

adalah Negatif Deklaratif artinya Hak Cipta didaftar atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Perubahan Undang-undang Hak Cipta selanjutnya adalah berubah untuk disesuaikan situasi dan kondisi baik yang datang dari dalam negeri maupun dari mancanegara, dengan adanya tuntutan dari negara didunia yang menyesuaikan dengan ketentuan *World Trade Organisation (WTO)*, yang diantaranya mengatur tentang *Trade Related aspects of Intellectual Property Right (TRIPs)*, dan ketentuan mengenai *TRIPs* berisi tentang Hak Cipta, Desain Industri, dan Rahasia Dagang<sup>83</sup>. untuk selanjutnya lahirilah undang-undang nomor 12 tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 6 tahun 1987 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, nomor : 29, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor : 3679).

Persetujuan *TRIPs* yang merupakan bagian dari *General Agreement On Tariff and Trade (GATT)* atau *World Trade Organization (WTO)* mengatur tentang perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) dan Indonesia telah meratifikasinya melalui Undang-undang nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Perdagangan Dunia ( *Agreement Stablising The World Trade*

---

<sup>83</sup> S. Kayatmo, Problem Pendaftaran dan Pengawasan HAKI, Makalah Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 6 Desember 1997, hal. 2

*Organization*)<sup>84</sup>. Aturan yang ada dalam *TRIPs* telah menjadi bagian dari produk hukum Indonesia, yang konsekwensinya harus ditaati dan dilaksanakan, dan berkaitan dengan Hak cipta maka Indonesia harus tunduk pada ketentuan konvensi Berne yang meliputi setiap karya kesusasteraan penguasaan Ilmu pengetahuan dan kesenian<sup>85</sup>. dan suatu karya cipta diungkap dalam berbagai bentuk dan inilah yang dilindungi<sup>86</sup>. dan konvensi Paris, Putaran Uruguay, serta *Convention Establising The World Intellectual Property Organization (WIPO)*, sedang tujuan *WIPO* dibidang Hak cipta adalah membantu perolehan dan mendorong kreasi<sup>87</sup>.

Perjanjian Internasional dibidang Hak Kekayaan Intelektual, khususnya dibidang Hak Cipta yaitu *Trade Related Aspec of Intellectual Property Rights* dan *Convension Berne*, serta perjanjian internasional dibidang Hak Cipta lainnya pada dasarnya merupakan landasan disesuaikannya aturan hukum Hak Cipta yang berlaku di Indonesia.

---

<sup>84</sup> Lihat Undang-undang nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Stablising The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), disyahkan dan diundangkan pada tanggal 2 Nopember 1994 dalam Lembaran Negara R.I tahun 1994 nomor 5, menjelaskan WTO sebagai organisasi perdagangan dunia yang menggantikan GATT.

<sup>85</sup> Konvensi Berne, Pasal 2 ayat (1).

<sup>86</sup> Suryana, op. cit hal 19.

<sup>87</sup> Taryana Soenandar, Perlindungan Hak Milik Intellektual di Negara Negara Asean, Sinar Grafica, Cetakan I, Jakarta 1996, hal. 9.

## 8. Perkembangan Hak Cipta Dalam Seni Rupa.

Sikap kesenian tradisional yang dilandasi soaial religius merata dalam bingkai kepercayaan, dan melalui kepercayaan animisme seperti orang-orang Irian yang mempunyai ciri khas kebersamaan keiklasan berkarya, keterkaitan komunitas dan kultural tanpa mempertimbangkan tingginya penghargaan dan harga yang didapat dan tidak mereka perlu dengan apa yang disebut Hak Cipta<sup>88</sup>

Sikap budaya tradisional dalam berkesenian, bahwa masyarakat tradisional Hak Cipta tidak pernah menjadi permasalahan, mayoritas seniman mencipta untuk mempersembahkan kepada masyarakat, karena kalau lukisan digemari oleh masyarakat maka siapapun boleh untuk menikmatinya.

Pada tahun 1516 Kaisar Karel V pertama kali memberikan hak mutlak pada seorang pencetak bernama Jan Cormeliszoon atas karya cipta berupa sebuah buku, dengan diberi hak mutlak perbanyakan dan penggandaan selama 4 tahun pihak lain tidak boleh memperbanyak dalam buku yang sama, dan hal ini berjalan samapai 3 abad. Dan barulah lahir Undang-undang yang disebut sebagai *Auteurswet*, hak

---

<sup>88</sup> Sumarni Mien Rukmini, Parameter Pemalsuan Karya Seni Lukis Di Indonesia, Dihubungkan dengan Undang-undang Hak Cipta, 1997, Bandung, 2000, hal. 45.

yang dimiliki oleh para pencipta saja, sedang orang lain hanya boleh untuk memperbanyak atas ijin dari si pencipta<sup>89</sup>.

Perlindungan terhadap seni rupa baru muncul pada hasil Konvensi Berne tahun 1886, jadi perlindungan dibidang Seni rupa lebih awal jika dibandingkan dengan karya tulis. Hal ini didukung data bahwa sikap penghargaan masyarakat Eropa terhadap kebebasan individu seorang seni rupawan sudah mulai pecahnya revolusi Perancis tahun 1789, sejak saat itu seniman tidak lagi dalam kekuasaan raja dan para bangsawan akan tetapi menjadi tokoh yang bebas menentukan kehendaknya sendiri. Dengan demikian timbulnya seniman seniman modern dengan ditandai adanya individualisme.

Munculnya nama-nama besar seperti David, Delarcoix, Jean-Gross, Gericault, Ingres, Goya, Renoir, Monet, Manet, Daumier, Caurbert, Cesane, Seurat sampai van Gogh yang karya lukisnya mengguncang dunia pada saat ini, dan berkembangnya lukisan ini akibat nilai jual dan nilai ekonomi yang cenderung meningkat.

Di Indonesia pada waktu itu menggunakan aturan hukum dari Hindia Belanda yaitu Auterswet 1912, dan masih tetap berlaku sampai dengan tahun 1958, karena pada tahun tersebut Indonesia menyatakan keluar dari Konvensi Berne. Pertimbangannya karena di Indonesia baru

---

<sup>89</sup> Rosidi, Ajip. Unda-undang Hak Cipta, Pandangan Seorang Awam, Djambatan, Jakarta, 1984. Hal. 6



meningkatnya perkembangan kegiatan ekonomi termasuk didalamnya jual beli dibidang Hak Cipta, juga karena penemuan dibidang teknologi seperti radio, kaset, televisi, video belum diatur dalam Auterswet 1912<sup>90</sup>. Selain itu pemerintah Indonesia masih relatif muda umurnya, maka kita masih memerlukan pengalaman dan penyerapan berbagai ilmu baru melalui salinan dan terjemahan yang secara implisit masih membutuhkan peniruan-peniruan<sup>91</sup>, pada dasarnya bahwa Indonesia merasa belum siap untuk mengikuti perkembangan internasional.

Sejak saat tahun 1956, mulai merintis tentang aturan Hak Cipta, dan baru dikeluarkan melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982, yang kemudian diperbarui melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta.

Munculnya Undang-undang Hak Cipta di Indonesia sebenarnya dikarenakan ada unsur pemaksaan dari negara maju terhadap negara berkembang yang cenderung melindungi kepentingan mereka, terutama Amerika Serikat yang melindungi produk Microsoft nya dari pembajakan negara-negara utamanya China, Rusia, Pakistan, Philipina, India dan Indonesia. Langkah pemerintah Amerika dengan mempengaruhi *United State Trade Representative (USTR)* memasukkan negara-negara utamanya tersebut diatas termasuk

---

<sup>90</sup> Rosidi, Ajip Op Cid. Hal. 8

<sup>91</sup> Sumarni Mien Rukmini, Op Cid. Hal. 48.

Indonesia masuk dalam *Priority List* (daftar negara untuk diinvestigasi), dan hal ini akan mempengaruhi ekspor Indonesia ke Amerika, dan setiap tahunnya status suatu negara selalu di evaluasi melalui laporan berbagai pihak seperti Kedutaan dan perwakilan pemerintah Amerika<sup>92</sup>.

Perkembangan hak cipta dalam seni rupa di Indonesia, pada mulanya berawal dari perlindungan yang ada di mancanegara, dan kemudian diatur dalam *Auterwet* 1912, yang selanjutnya Indonesia mengatur sendiri melalui Undang-undang nomor 6 tahun 1982 yang diperbarui dengan Undang-undang nomor 7 tahun 1987 tentang Hak Cipta, namun dengan adanya perkembangan perjanjian ditingkat internasional yaitu perjanjian perdagangan dunia yang didalamnya terdapat lampiran perjanjian perdagangan yang menyangkut aspek Hak Kekayaan Intelektual, maka Indonesia memperbarui kembali dengan melalui Undang-undang Nomor : 12 tahun 1997 tentang Hak Cipta.

Selanjutnya dalam operasonalnya dikeluarkan berbagai produk hukum diantaranya Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia, Keputusan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, serta aturan hukum HKI lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia.

---

<sup>92</sup> Marpaung. L. Tindak Pidana Terhadap Hak Kekayaan Inteletual, PT. Sinar Grafika, Jakarta. 1995, hal. 27.

### C. Perlindungan Hukum dibidang Hak Cipta.

#### 1. Pengertian Perlindungan Hukum :

Perlindungan hukum secara harfiah terdiri dari dua kata yaitu "perlindungan" dan "hukum", sesuai dengan kamus besar Indonesia yang dimaksud dengan Perlindungan berasal dari kata lindung yang berarti tempat berlindung, hal (perbuatan dsb) memperlindungi<sup>93</sup>, sedang makna memperlindungi adalah menjadikan atau menyebabkan berlindung.

Hukum adalah 1). Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dilakukan oleh penguasa, pemerintah, atau otoritas. 2) Undang-undang, Peraturan dsb, untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. 3). Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dsb) yang tertentu. 4). Keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh Hakim (di Pengadilan) Vonis<sup>94</sup>. Sedang maksud perlindungan hukum adalah dalam penulisan ini adalah memberikan, menjaga rasa aman kepada masyarakat, yang dilakukan oleh Unsur Aparat penegak hukum, Aturan hukum dan yang dipengaruhi oleh Budaya hukum masyarakat, sekaligus mendorong kegairahan dan

---

<sup>93</sup> Dr. Bernadus E.F da Silva dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, hal. 595.

<sup>94</sup> ibid. hal. 360.

aktifitas penghasil karya intelektual untuk semakin berprestasi dan berkarya serta menghasilkan mutu yang berkualitas.

Perlindungan hukum diharapkan dapat memberikan rasa aman sekaligus dapat mendorong pihak yang dilindungi untuk mengembangkan segala bentuk aktifitas yang dimilikinya, perlindungan hukum sangat terkait dengan penegakan hukum (*law enforcement*), artinya jika penegakan hukum dicapai maka akan terwujud suatu perlindungan hukum yang dapat memberikan rasa aman tersebut.

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep yaitu penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa kecuali, yang bersifat penuh (*full enforcement concept*), yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara, demi perlindungan kepentingan individual dan konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana prasarana, kualitas sumber daya

manusianya kualitas perundang-undangnya dan kurangnya partisipasi masyarakat<sup>95</sup>.

Ketertiban hukum, kepastian hukum dan perlindungan hukum akan dirasakan sebagai kebutuhan yang pada dasarnya mengandung dua hal yakni aman (jasmaniah) dan tenteram (batiniah) yang kesemuanya dapat dicakup dalam tujuan hukum yaitu kedamaian (*the function of law is to maintain peace*).

Dalam mewujudkan penegakan hukum diperlukan tiga hal yang mempengaruhi bahwa penegakan hukum dapat dicapai yaitu :

- a. Unsur aparat penegak hukum.
- b. Aturan Hukum, dan.
- c. Budaya hukum masyarakat.

Pengertian unsur aparat penegak hukum adalah penegak hukum dalam sistem peradilan. Unsur penegak hukum tersebut terdiri dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Polisi, Jaksa, hakim, pengacara dan Petugas Pemasyarakatan (*integrated criminal justice system*).

Unsur aparat penegak hukum diantaranya terdiri dari Penyidik pegawai Negeri Sipil (PPNS), diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Indonesia, atau pejabat pegawai negeri sipil

---

<sup>95</sup> Muladi, Hak Azasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Cetakan I, 1997, hal. 58.

tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan<sup>96</sup>.

Penegak hukum tersebut menyadari bahwa supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara merupakan salah satu refleksi bahkan prakondisi sistem pemerintahan yang demokratis dan berwibawa.

Aturan Hukum dapat dibagi menjadi dua yaitu aturan hukum yang tertulis dan tidak tertulis, aturan hukum tertulis sesuai dengan Tap MPRS nomor XX/MPRS/1966 tentang Tata urutan perundang undangan menunjukkan adanya hirarki perundang-undangan yang dimulai dari UUD 1945, Undang-undang, Ketetapan MPR, Peraturan Pemerintah, Kepres, Inpres, Keputusan Menteri dan aturan hukum lainnya yang secara hirarki menunjukkan suatu urutan.

Budaya hukum masyarakat merupakan kebiasaan dan budaya masyarakat dalam mentaati aturan hukum, dan kebiasaan ini merupakan landasan untuk pembuatan aturan hukum, karena jika suatu budaya dan kebiasaan masyarakatnya berperilaku menyimpangnya sangat tinggi maka akan sulit untuk mewujudkan penegakan hukum. Sehingga budaya hukum masyarakat akan lebih mendukung terhadap penegakan hukum, artinya walaupun aturan

---

<sup>96</sup> Undang-undang nomor 5 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

hukumnya kurang begitu baik, namun jika budaya hukum masyarakatnya menjunjung tinggi kebiasaan berperilaku positif maka perlindungan hukum dan penegakan hukum akan terwujud.

Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma dan sekaligus nilai-nilai yang berada dibelang norma, sehingga penegak hukum harus memahami spirit hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum ditegakkan dan hal ini akan berkaitan dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan (*law Making Process*), disisi lain terkait dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan adalah keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara kesadaran hukum yang ditanamkan oleh penguasa (*legal awareness*), dengan peraturan hukum yang bersifat spontan dari rakyat (*legal feeling*)<sup>97</sup>.

Perlindungan hukum akan dapat dilaksanakan jika dalam penegakan hukum disertai suatu sanksi, yang dapat berbentuk penjatuhan sanksi pidana, maupun perdata berupa ganti rugi.

## **2. Perlindungan Hukum Hak Cipta.**

Perlindungan hukum terhadap karya cipta diharapkan dapat memberikan rasa aman sekaligus mendorong kegairahan dan aktifitas

---

<sup>97</sup> Muladi, Op Cid. Hal. 70

para pencipta untuk terus menghasilkan karya-karya cipta yang semakin beragam, semakin banyak dan semakin berkualitas.

Pada era globalisasi perambahan pasar diluar batas suatu negara, pada gilirannya diikuti oleh produk yang dikaitkan dengan kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual, khususnya Hak Cipta yang digunakan dalam kreatifitas, pembuatan produk dan pemasaran. Dengan demikian yang perlu dilindungi tidak hanya produknya saja, namun juga Hak Ciptanya.

Perlindungan hukum dibidang hak cipta menyangkut penegakan hukum, dan untuk mewujudkannya dipengaruhi oleh unsur aparat penegak hukum dibidang hak cipta, aturan hukum hak cipta, serta budaya hukum yang dilakukan oleh masyarakat dalam lingkup hak cipta.

Perlindungan hak cipta dimaksudkan bahwa aturan hukum dan unsur aparat penegak hukum dapat memberikan pengayoman, rasa aman kepada para pencipta untuk lebih meningkatkan kualitas maupun kuantitasnya, serta mencegah timbulnya pembajakan, perbanyakan dan berbagai kejahatan hak cipta. Dan melakukan tindakan berupa pengarahannya, penindakan dan penjatuhannya sanksi baik berupa pidana maupun denda, sehingga akan terwujud keselarasan dan keserasian dalam mengembangkan hak cipta yang akhirnya



dalam putaran internasional hasil karya cipta merupakan aset ekonomi yang dapat dihandalkan melalui royalty, dan dampak secara nasional dapat mengangkat perekonomian suatu negara tanpa adanya modal secara nyata yang harus dikelola secara bertahap.

### **3. Fungsi Unsur Aparat Penegak Hukum Hak Cipta.**

Unsur aparat penegak hukum dibidang hak cipta terdiri dari penyidik Pegawai Negeri Sipil dibidang Hak Cipta, keberadaannya diatur melalui Kitan Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-undang Hak Cipta juga mengaturnya, Polisi, Jaksa dan hakim, serta pengacara.

Proses beracara dalam penyelesaian pelanggaran dibidang Hak Cipta, untuk terwujudnya penegakan hukum wadah yang diatur dalam Undang-undang Hak Cipta adalah terhadap penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual dalam hal ini hak Cipta dan jika Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual baik secara langsung maupun tidak langsung berperan dalam perselisihan hak Cipta tersebut, maka pengajuan gugatannya harus ke Pengadilan negeri Jakarta pusat.

Dalam mewujudkan unsur aparat penegak hukum, maka fungsi unsur aparat penegak hukum adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan rasa aman dan keselarasan masyarakat, khususnya dalam mengembangkan karya cipta, masyarakat dijamin untuk berkreasi, mempebanyak ciptaan dan meningkatkan kualitas kreasinya dengan rasa aman. Karena delik yang diatur dalam Undang-undang Hak Cipta adalah pelanggaran dibidang hak cipta adalah kejahatan, dan bukan merupakan delig aduan maka konsekuensinya unsur aparat penegak hukum dalam menjaga keselarasan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat wajib menindak terhadap kejahatan dibidang hak cipta yang timbul tanpa adanya suatu aduan,
- b. Menegakkan aturan hak cipta, artinya dengan telah lahirnya Undang-undang hak cipta unsur aparat penegak hukum wajib mensosialisasikan kepada masyarakat, agar kejahatan dibidang hak cipta dapat dihindari dan dapat terwujud kesadaran masyarakat akan pelanggaran hak Cipta,
- c. Memberikan sanksi kepada para pihak yang melakukan pelanggaran dibidang hak cipta, sanksi tersebut dapat berupa penjatuhan pidana dan sanksi perdata berupa denda.
- d. Mencegah adanya tindak kejahatan dan pelanggaran dibidang hak cipta, artinya melakukan tindakan prefentif untuk mencegah pelanggaran dibidang hak cipta.

- e. Sebagai benteng masuknya kejahatan yang berasal dari mancanegara, baik melalui jalur transportasi maupun dunia maya.

#### 4. Perjanjian Internasional dibidang Hak Cipta.

Pengaturan HKI ditingkat Internasional diawali pada tahun 1883 dengan disepakatinya Konvensi di Paris untuk perlindungan Internasional dibidang Hak kekayaan Industri (*The Paris Convention For The Protecction Of Industrial Property*), setelah itu pada tahun 1886 dibentuk konvesi perlindungan dibidang hak cipta yang dikenal dengan *International Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*, yang ditanda tangani di Bern.

Pada mulanya kedua konvensi itu masing-masing membentuk union yang berbeda, yaitu: Union Internasional untuk perlindungan hak milik perindustrian (*The International Union for the Protection of Industrial Property*), dan Union Internasional untuk perlindungan hak cipta (*International Union for the Protection of literary and artistic work*). Meskipun terdapat dua union, tetapi pengurusan administrasinya dalam satu manajemen yang sama, bahkan dalam gedung yang sama yaitu *the united Nation International Bureau for the Protection of Intellectual Property*, yang dalam Peracisnya adalah *Bivieaux International Reunis pour la Protection de la Propriete Intectuelle / BIRPI*. Perkembangan selanjutnya timbul keinginan agar

terbentuk suatu organisasi dunia untuk hak milik intelektual secara keseluruhan. Melalui konferensi Stockholm tahun 1967, telah diterima suatu konvensi khusus untuk pembentukan suatu organisasi dunia untuk hak milik intelektual (*Convention establishing the World Intellectual Property Organization/WIPO*). WIPO sebagai organisasi hak milik intelektual kemudian menjadi pengelola tunggal kedua konvensi tersebut.

Terdapat beberapa macam konvensi yang mengatur hak milik intelektual, tetapi bisa dibagi dalam dua kategori, yaitu:

1. Konvensi yang mengatur masalah hak cipta.
2. Konvensi yang mengatur masalah hak milik perindustrian.

Konvensi Hak Cipta dimulai dari Konvensi Bern 1886 yaitu *International Convention for the Protection of Literary and Artistic Work*, ditandatangani di Berne, Swiss. Konvensi ini telah mengalami beberapa kali revisi, yaitu di Berlin, Roma, Brussel, Stockholm, dan terakhir di Paris pada tahun 1971. Selain konvensi secara luas terdapat juga konvensi yang bersifat regional misalnya Konvensi Pan American yang ditandatangani di Montevideo 11 Januari 1889, kemudian disusul dengan Mexico City, Rio de Janeiro, Buenos Aires, dan terakhir di Havana pada tahun 1928.

Setelah perang dunia ke dua, muncul suatu gagasan yang ingin menyatukan satu sistem hukum hak cipta yang universal. Gagasan ini timbul dari peserta konvensi Berne, dan Amerika Serikat di lain pihak. dengan sponsor Perserikatan Bangsa Bangsa utamanya Unesco, gagasan itu dicoba dikonkretkan dengan diadakannya suatu konvensi di Jenewa pada bulan September 1952. Di kota Jenewa inilah maka ditandatangani sebuah konvensi baru yaitu Konvensi Universal mengenai Hak Cipta atau dikenal dengan *Universal Copyright Convention (UCC)*.

Konvensi yang umum tentang hak cipta, juga terdapat konvensi, atau perjanjian tentang hak cipta yang hanya mengatur satu aspek saja, misalnya:

1. Di Strasbourg tahun 1960 telah dibentuk suatu perjanjian mengenai perlindungan penyiaran televisi (*European Agreement on The Protection Television Broadcast*).
2. Konvensi Roma 1961 mengenai hak salinan (neighbouring right) yaitu *International Convention Protection for Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations*.
3. Konvensi Roma 1961, mengenai bidang rekaman, yaitu *Convention for The Protection of Phonograms Against Unauthourized Duplication of Their Phonograms*.

4. Perjanjian Wina 1973 yang dikenal diantaranya *Agreement for the Protection of Type Faces and Their International Deposit*.
5. Konvensi Brussel 1974 (*Relating to the Distribution of Programme Carrying Signals Transmitted by Satellite*).

Dalam menselaraskan beberapa negara peserta perjanjian internasional dibidang hak Cipta, Indonesia juga melakukan kerjasama untuk perlindungan hak cipta dengan negara-negara lain diantaranya melalui :

1. Keputusan Presiden R.I nomor 17 tahun 1988, tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan hukum secara timbal balik terhadap Hak Cipta atas karya rekaman suara antara negara Republik Indonesia dengan Masyarakat Eropa.
2. Keputusan Presiden R.I nomor 25 tahun 1989, tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan hukum secara timbal balik antara Negara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat.
3. Keputusan Presiden R.I nomor 38 tahun 1993, tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan hukum secara timbal balik antara Negara Republik Indonesia dengan Australia

4. Keputusan Presiden R.I nomor 56 tahun 1994, tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan hukum secara timbal balik antara Negara Republik Indonesia dengan Inggris.

Selain itu juga dikeluarkan Keputusan Presiden R.I nomor 18 tahun 1997, tanggal 7 Mei 1997 tentang Ratifikasi Konvensi Berne (*Berne Convention For The Protection of Lieterary and Artistic Works*). Dan Keputusan Presiden R.I nomor 19 tahun 1997 tentang Pengesahan *WIPO Copyrights Treaty*.

Ratifikasi Berne berlaku efektif terhitung 3 bulan setelah disampaikan notifikasi kepada WIPO, karena pemerintah Indonesia melalui perwakilan PBB di Jenewa telah menyampaikan notifikasi tersebut tanggal 4 Juni 1997, maka Konvensi Berne berlaku efektif di Indonesia pada tanggal 5 September 1997<sup>98</sup>.

Aturan hukum hak cipta dalam perjanjian internasional ini sangat berpengaruh terhadap perubahan-prubahan yang terjadi dalam Undang-undang Hak Cipta disuatu negara termasuk salah satunya Indonesia. Perjanjian Internasional dibidang Hak Cipta ini dari waktu kewaktu selalu mengalami perubahan, baik perubahan maupun penyempurnaan dan penambahan terhadap hal yang baru.

---

<sup>98</sup> Wolter Simanjuntak, Penegakan Hukum dibidang Hak Cipta dan Desain Industri, disampaikan dalam rangka pengembangan kerjasama teknis dengan Australia (*IPR Advance*) bagi Konsultan, Wartawan dan Pemeriksa, 25 Pebruari 2000. Hal. 2-3.

#### **D. Perlindungan terhadap pelukis dan Karya Seni rupa.**

##### **1. Arti Pentingnya Perlindungan Pelukis.**

Pelukis mempunyai peran yang sangat penting dalam penyelerasan dan menetralsir ketegangan fikiran karena hasil lukisannya akan dapat membuat seseorang mempunyai nilai prestise yang tinggi, dan dapat membuat fikiran menjadi senang, sedih, bahagia tergantung dari obyek lukisan yang dilihat, Untuk lebih meningkatkan prestice pelukis siperlukan Kurator dan komunitas pelukis.

Komunitas pelukis merupakan kumpulan dari beberapa pelukis, dan dapat juga merupakan seorang pedagang lukisan yang mempunyai pelanggan dari beberapa pelukis, suatu organisasi yang dalam kegiatannya menggiatkan kreatifitas pelukis untuk meningkatkan pengembangan kreasi sehingga terwujud nilai karya lukis yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, dan dapat diselesaikan dalam jumlah yang relatif singkat,

Perlindungan terhadap komunitas pelukis dilakukan karena peran komunitas ini sangat besar, yaitu :

- a. Dapat menambah pengetahuan dan kemampuan para pelukis dalam mengembangkan kreatifitasnya.
- b. Sebagai ajang komunikasi dalam mengembangkan kreatifitas dan mutu suatu lukisan.



- c. Merupakan tempat untuk menghantar hasil suatu lukisan untuk diantar ke pasar.
- d. Dapat membantu para seniman khususnya seni rupa jika mengalami kesulitan, baik bidang pengembangan kreatifitas, masalah ekonomi dari para pelukis, maupun berbagai masalah yang timbul.
- e. Ajang informasi untuk mengakses berbagai data baik yang datang dari dalam negeri maupun mancanegara.

## **2. Pengertian Seni, Seni Rupa.**

Sebelum menginjak pada pokok persoalan yang akan diperbincangkan, disini akan dikemukakan pengertian seni dan seni rupa di Indonesia serta latar belakang perkembangan seni rupa di Indonesia sehingga terjadi paradigma baru tentang pengertian memalsu karya dari masyarakat Indonesia.

Menurut Soedarso, walaupun seni rupa sudah tua usianya, tapi pengertian orang tentang seni rupa sering kali terlalu sempit. Hal demikian adalah wajar karena disebabkan oleh luasnya jelajah seni. Saat ini banyak batasan tentang seni dibuat orang dan ada baiknya ditelusuri. Perkembangan pengertian seni dan seni rupa terlihat erat kaitannya dengan perubahan orang dalam melihat dan memaknai seni

sehingga terlihat paradigma baru dalam pengertian seni dan seni rupa<sup>99</sup>.

Sedangkan di Indonesia, istilah seni dan seni rupa sendiri usianya masih sangat muda, meskipun sudah dikenal dengan baik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti seni adalah keahlian memuat karya yang bermutu (dilihat dari segi kehalusan dan keindahannya) seperti seni tari, seni lukis dan sebagainya. Arti yang lain adalah kesanggupan akal untuk menciptakan sesuatu yang bernilai tinggi (luar biasa).

Soedarso mengemukakan memang pada kenyataannya istilah seni masih sangat muda usianya dan asalnya amat tidak jelas. Mungkin diambil dari bahasa Sasnsekerta "sani" yang berarti pemujaan, pelayanan, donasi, permintaan atau pencarian hormat dan jujur. Atau dari kata "seni" bahasa melayu yang artinya kecil dan halus. Ada yang mengatakan mungkin dari kata "genie" berasal dari bahasa Belanda yang artinya jenius<sup>100</sup>.

Dari pendapat di atas sepakat bahwa istilah kata seni untuk menerjemahkan kata *Art* munculnya di Indonesia belum lama. Soejoko memperkirakan pada paruh pertama abad 20 dimunculkan oleh

---

<sup>99</sup> Soedarso. SP. Sejarah Perkembangan Seni Rupa Modern, Sakudayar sana, Yogyakarta, 1990, hal. 1.

<sup>100</sup> Soedarso SP. Ibid hal. 2

kalangan terpelajar yang paham bahasa asing, sayang tidak begitu paham akan bahasanya sendiri sehingga memunculkan istilah yang tidak tepat<sup>101</sup>.

Kata *art* sendiri berasal dari bahasa latin *ars* yang berarti ketangkasan dan kemahiran dalam mengerjakan sesuatu. Istilah itu muncul pada abad pertengahan yang berkembang menjadi kata *l'arte* dalam bahasa italia, *l'art* dalam bahasa Perancis, *el arte* dalam bahasa Spanyol dan *art* dalam bahasa Inggris. Orang Jerman memakai istilah *die kunst* dan orang Belanda memakai istilah *kunst*. Dalam perjalanan sejarah seni, ternyata di dunia ada satu masa dimana dalam kebudayaannya, seni itu tidak terpisah dari kehidupannya yang artinya tidak dianggap sesuatu yang istimewa, sebagai alat pernyataan dengan tidak memakai nama khusus. Istilah *Art* dan *Fine Art (Beaux Art)* muncul pada abad 18 di Eropa. Sejak saat itu, istilah *art* lebih ditafsirkan identik dengan daerah seni rupa saja, terutama seni lukis dan patung, meskipun maknanya yang umum termasuk pula arsitektur, musik dan puisi. Dari kelima seni inilah yang menjadi inti daripada sistem seni modern. Hal ini sangat menarik, karena ternyata perkembangan seni modern itu dapat ditelusuri dari tumbuhnya perkembangan kota-kota di Eropa. Ketika kehidupan agraris mulai

---

<sup>101</sup> Soedjoko, Peranan dan Sumbangan Seni Dalam Kebudayaan Indonesia, 1979. dalam Sachari, Agus, Seni Desain dan Teknologi, Pustaka, Bandung, 1986. Hal. 75.

terdesk oleh sistem kapitalisme maka sejak zaman *Renaissance* masyarakat Eropa mulai melepaskan diri dari ikatan tradisi abad pertengahan. Proses tersebut berubah dengan cepat pada masa revolusi industri, dan pandangan terhadap nilai seni pun menjadi berubah dan berbeda dari kebudayaan Eropa sebelumnya. Sekarang seni dianggap sebagai ungkapan nilai-nilai hidup dan melahirkan seniman-seniman yang membubuhkan tanda tangan pada karya-karyanya. Sejak saat itulah munculnya *individualisme*.

Apapun pendapat para ahli saat ini, kata "seni" lebih dikenal sebagai terjemahan dari kata *art* dibanding dengan kata lain, karena terlanjur disetujui oleh lingkungannya.

Adapun pelaku seni sendiri saat ini lazim disebut "seniman" mengacu pada asal kata seni tersebut. Namun kata ini menjadi masalah karena memunculkan perbedaan disebabkan karena kaum terpelajar di kota besar dan dari orang yang terpelajar. Sedangkan pelaku yang melahirkan apa-apa dari desa dari orang kurang terpelajar disebutnya tukang, pande dan karyanya disebut kerajinan yang sering dianggap rendah dan hina. Bagaimanapun kenyataannya, masyarakat kota menjadi pemenang dalam menentukan arti kata tersebut sesuai dengan kehendaknya.

Seni sendiri menurut beberapa pendapat atau definisi sederhana menyatakan bahwa seni adalah segala macam keindahan yang diciptakan manusia. Tapi kalau diterapkan pada seni modern tidak sesuai lagi karena pandangan mereka sudah berubah, seni bukan proyek keindahan saja tapi bisa lebih jauh yaitu bisa juga sebagai sarana pemecahan masalah yang sedang dihadapi tidak hanya oleh seniman itu sendiri tapi ia bisa menjadi wakil dari masyarakat untuk memperlihatkan sikapnya atas sesuatu hal. Seperti pendapat Ki Hajar Dewantara yang meskipun masih menyertakan keindahan sebagai batasan tapi sudah menyertakan interaksi antara si pencipta dan si penikmat karyanya. Ia mengatakan "Seni adalah segala perbuatan manusia yang timbul dari perasaannya yang bersifat indah, hingga dapat menggerakkan jiwa dan perasaan manusia."

Achdiat K. Mihardja lebih jelas lagi dalam memperlihatkan pemindahan rasa atau interaksi antar pencipta dan penerima dengan definisi sebagai berikut: "Seni adalah kegiatan rohani manusia yang merefleksikan realitas (kenyataan) dalam suatu karya yang berkat bentuk dan isinya mempunyai daya untuk membangkitkan pengalaman tertentu dalam alam rohani si penerimanya.

Pendapat tersebut menurut Soedarso SP, pendapat Thomas Munro, seorang filsuf dan ahli teori seni dari Amerika lah yang terasa

untuk saat ini paling cocok untuk pengertian seni yang sedang berlangsung saat ini. Pendapatnya adalah sebagai berikut: "Seni adalah alat bantu manusia untuk menimbulkan efek-efek psikologis atas manusia lain yang melihatnya. Efek tersebut mencakup tanggapan-tanggapan yang terwujud pengamatan, pengenalan, imajinasi yang rasional maupun emosional", dari pengertian seni yang disodorkan oleh Thomas Munro ini, Soedarso SP berpendapat bahwa pandangan ini menjelaskan kepada kedua belah pihak yaitu si pencipta dan si penerima. Jadi ketika seni telah diciptakan, seni harus ditanggapi secara serius dengan segenap fungsi jiwa kita. Maka bila kita melihat sebuah lukisan pemandangan tidak hanya cukup melihat indah atau tidaknya serta mengetahui obyeknya saja tapi harus lebih jauh dari itu. Contohnya ketika kita mereaksi sebuah lukisan gunung berapi yang gundul, tanggapan kita harus sampai pada pengalaman kita yang pernah kita rasakan yang ada hubungannya dengan obyek tersebut, misalnya membayangkan paniknya orang-orang yang dikejar lahar dingin ketika atau bila gunung itu meletus dan lain sebagainya<sup>102</sup>.

Soedarso SP sendiri memberikan kesimpulan sementara bahwa seni adalah karya manusia yang mengkomunikasikan pengalaman-pengalaman batinnya yang disajikan secara indah atau menarik

---

<sup>102</sup> Opcid Sudarso.SP. Hal 3

sehingga merangsang bathin dan menimbulkan pengalaman bathin pula pada manusia lain yang melihat dan menghayatinya. Kelahirannya tidak didorong oleh hasrat memenuhi kebutuhan manusia yang pokok, melainkan merupakan usaha untuk melengkapi dan menyempurnakan derajat kemanusiaan, memenuhi kebutuhan spiritualnya<sup>103</sup>.

Pengertian seni yang lain adalah kajian Sadali terhadap satu definisi yang berbunyi : "Seni adalah ungkapan dan ungkapan sedalam-dalamnya (*innermost*) daripada seniman yang ditampilkan menjadi karya yang dapat diteruskan dari generasi ke generasi". Dengan demikian menurut Sadali, seni itu mesti lahir sebagai ungkapan yang berasal dari satu puncak kerucut lingkungan dalam yang hakiki. Ia berpendapat bahwa dapatlah dipahami jika pada tahap ini seniman telah mencapai apa yang telah didam-idamkannya, sebab itulah semurni-murninya ungkapan, akhir dari semua alternatif dari puncak kerucut, tempat ia mencapai setinggi-tingginya prestasi pendalaman, yaitu kemampuan untuk beriman dan berada dalam wawasan religiusitas atau agama. Oleh karena itu, sangat beralasan sekali apabila karya-karya besar dunia, seperti seni Tiongkok, India kuno, Mesopotamia Kuno yang diciptakan berdasarkan agama selalu

---

<sup>103</sup> Ibid Sudarso SP. Hal. 4

melahirkan karya yang agung dan monumental, sehingga sampai saat ini masih dapat dinikmati oleh generasi berikutnya dalam masyarakatnya<sup>104</sup>.

Pendapat Sadali terlihat sekali mempunyai persamaan dengan pendapat lain, namun ia melengkapi bahwa seni yang mencapai puncaknya adalah yang berdasarkan agama. Terlihat pendapat ini lebih maju satu langkah dibanding yang lain karena memperlihatkan bahwa kebebasan itu bukan tanpa batas tetapi tetap ada batasan yaitu agama atau kepercayaan yang akan menuntun karya tersebut pada keabadian untuk diwariskan pada generasi penerusnya.

Graburn H. Nelson, seorang profesor ahli filsafat dari Universitas Aberdeen mengungkapkan bahwa seni merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia dan kebudayaannya. Daya tarik dan pendukungnya begitu besar<sup>105</sup>. Apakah sebenarnya seni itu ? Pertanyaan lama ini sudah menjadi perhatian para filsafat selama lebih dari 200 tahun. Dan selama itu telah muncul berbagai jawaban yang terus berkembang dan penelitian pun terus berlanjut.

Apabila orang ditanya apakah yang anda dapatkan dari karya seni? Maka secara spontan akan menjawab untuk kesenangan atau

---

<sup>104</sup> Sadali Ahmad, *Hipotesa Proses Kreatif Dalam Sachari, Agus, Seni, Desain dan Teknologi* Pustaka Bandung, 1986 Hal. 12.

<sup>105</sup> Graburn H. Nelson, *Ethnic And Tourist Arts*, The Regent of University California, 1976, hal 1-2.



kepuasan. Tapi pendapat umum tentang nilai seni berdasarkan kesenangan tersebut, mengandung beberapa kekurangan. Pertama, tidak begitu tepat bila diterapkan pada seni murni, kecuali untuk seni yang memang dilatih untuk memberikan kesenangan, benar-benar bersumber pada hiburan dan kesenangan. Kedua, bila nilai seni hanya kesenangan, maka akan sulit menerangkan perbedaan antara bentuk dan karya seni. Ketiga, akan sangat sukar melihat teori kesenangan dapat mempertahankan penilaiannya yang singkat dan memutuskan perbedaan yang ini seni dan yang itu bukan seni dalam suatu budaya atau lembaga pendidikan kita.

Jika seni hanya berdasarkan kesenangan atau hiburan akan menjadi penilaian yang tidak lengkap dan tidak seimbang. Bahkan ada karya seni yang tidak membuat orang terhibur. Jadi nilai tersebut hanya salah satu dari nilai-nilai lain yang terkandung dalam seni. Misalnya seni sebagai suatu emosi jiwa yang melibatkan emosi seniman dan penontonnya.

Kesenangan bisa diterapkan pada nilai seni maka ekspresi dan emosi dianggap suatu yang alami. Keduanya pada hakekatnya saling berhubungan. Benar bahwa karya seni dapat memberikan kesenangan, tetapi beberapa karya seni juga ada yang menggerakkan emosi seseorang dan di sini kepuasan atau kesenangan pun terlibat. Namun

seni sebagai emosi mempunyai kelemahan pula, pertama sukar menempatkan ekspresi dalam sebuah pertimbangan yang masuk akal antara seniman, karyanya dan penonton. Kedua, kedalaman emosi seniman kadang merampas salah satu aktifitas dalam seni yaitu imajinasi. Ketiga, tidak ada nilai ekspresi, hanya untuk emosi saja.

Keduanya tidak bisa diterapkan terhadap karya seni yang mutakhir, ada seni tidak indah dan mungkin tidak ekspresif tapi untuk seni yang seperti itu memerlukan pengertian yang lebih dalam. Namun tentu saja dalam hal ini ada yang pro dan kontra terhadap seni yang mengandung maksud memerlukan pengertian, dan disebutkan seni tersebut tidak lebih dari sekedar propaganda.

Mempelajari karya seni dengan lebih mendalami pengertian yang terkandung didalamnya memberikan suatu penghargaan yang lebih tinggi terhadap karya seni dari pada hanya dipandang sebagai hiburan saja atau hanya sebuah ekspresi dari emosi. Tentu saja "pengertian" di sini tidak sama dengan mengertinya kita terhadap ilmu pengetahuan atau sejarah dalam mengapresiasi seni, yang penting adalah seni tidak untuk menjelaskan teori secara rinci atau mengandung sebuah kesimpulan dari suatu kenyataan, mereka mengambil bentuk dari kreativitas imajinasinya yang diserap dari pengalaman sehari-hari secara langsung atau merubahnya.

Teori ini berhasil memberikan nilai tambah pada karya seni yang baik, meskipun tetap saja bukan merupakan jawaban yang pasti bagi arti dari seni itu sendiri, karena masih diragukan dapatkah diterapkan untuk semua bentuk seni. Paling tidak teori ini lebih memberi arti pada seni itu sendiri<sup>106</sup>.

Maman Noor (1994) seorang kritikus menjelaskan dalam tulisannya, bahwa tak dapat dipungkiri bahwa seni adalah proses kreatif yang berarti daya cipta yang mengandung kebaruan dan keaslian, oleh karena itu mengubah karya seni adalah mengubah sesuatu yang baru dan asli, bukan kerja peniruan atau pengulangan.

Menurut Sadali, keaslian atau originalitas adalah sifat hakiki yang harus dipunyai seorang seniman. Nalurnya tidak akan membenarkan penjiplakan ataupun imitasi, ia selalu ingin lain dari yang lain sebagai awal mencari jati dirinya dalam proses mencari originalitas atau keaslian karya ciptanya. Kalaupun terjadi peniruan pada sebuah karya dalam perjalanan kariernya mencari keaslian, hal ini dibolehkan hanya dalam rangka study, penelitian, pelajar seni dimuseum-museum dan tempat-tempat yang sejenisnya<sup>107</sup>.

Pernyataan tersebut sejalan dengan pengertian ciptaan seni yang terkandung dalam undang-undang hak cipta yang menyatakan :

---

<sup>106</sup> Graburn H. Nelson, op cit hal. 3

<sup>107</sup> Sadali ahmad, op cit hal 9

“Ciptaan adalah hasil karya pencipta dalam bentuknya yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam ilmu pengetahuan, seni dan sastra”. Jadi kesimpulannya semua ciptaan yang berjenis ungkapan orisinal dilindungi oleh Undang-undang apabila sudah berbentuk sesuatu bukan hanya sebuah ide, apapun arti yang terkandung didalamnya.

Pertanyaan tentang perlindungan terhadap seni tradisi, yang menganggap originalitas bukan sesuatu yang penting dan peniruan adalah hal yang lazim. Hal ini akan dibahas dalam bab pembahasan yang akan membuktikan pula fakta dilapangan bagaimana kehidupan berkesenian saat ini.

Pengertian seni rupa adalah salah satu cabang dari kesenian yang secara teoritis seni rupa adalah seni yang mengekspresikan pengalaman artistik manusia lewat obyek-obyek dua dan tiga dimensi seperti seni lukis, patung, keramik dan lain-lain.

Seni rupa sendiri menurut perkembangannya yang terakhir dibagi menjadi dua bagian besar yaitu seni murni dan desain, Yang termasuk seni murni adalah seni yang murni secara estetik diperlakukan sebagai benda seni tidak diterapkan kepada benda lain. Karya yang termasuk seni murni adalah seni lukis, patung, keramik dan grafis murni (seni lukis dengan teknik cetak). Sedangkan desain yaitu cabang seni rupa yang dimanfaatkan atau diterapkan untuk

kepentingan lain, yaitu bidang desain interior, komunikasi visual, tekstil dan desain produk.

Di Indonesia seperti yang telah kita ketahui, pembagian seperti itu dimulai pada awal abad setelah bersentuhan dengan seni rupa barat. Sebelumnya tidak ada pembagian seperti sekarang karena seni masih menyatu dalam kehidupan keseharian dalam bidang agama dan sosial.

Dalam kasus ini yang akan dibahas adalah mengenai seni rupa murni sebagai studi kasus dalam bidang pemalsuan dihubungkan dengan lahirnya Undang-undang Hak Cipta yang tak lepas dari tuntutan zaman karena terjadinya perubahan pandangan terhadap makna seni bagi manusia yang melahirkan paradigma baru atau kerangka berfikir baru terhadap seni rupa.

### **3. Pengertian Pelukis, dan Kepemilikan Hak Karya Lukis.**

Pelukis adalah Juru gambar lukis<sup>108108</sup>, atau orang yang pandai melukis (seni lukis), sedang salah satu persyaratannya untuk dikatakan karya lukis atau karya cipta harus mempunyai nilai seni. Tolak ukur menentukan adanya nilai seni sangat sulit, karena antara pihak yang satu dengan lain mempunyai persepsi yang berbeda tentang seni.

---

<sup>108</sup> WJS. Poertwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1976, Hal. 729

Ketentuan terhadap kepemilikan karya lukis adalah sebagai berikut :

1. Pemegang Hak Cipta atas karya lukis adalah Pelukis sebagai pemilik atau orang yang menerima hak tersebut dari pelukis.
2. Kecuali terbukti sebaliknya maka yang dianggap sebagai Pelukis adalah orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan dan pengumuman resti tentang pendaftaran pada Departemen Kehakiman, atau orang yang namanya disebut dalam lukisan, atau diumumkan sebagai pelukis pada suatu lukisan.
3. Jika suatu lukisan dirancang oleh seseorang, diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain dibawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, maka yang dianggap sebagai pelukis adalah orang yang merancang lukisan tersebut.
4. Apabila suatu lukisan sama sekali tidak diketahui siapa pelukisnya, maka Negara memegang hak cipta atas lukisan tersebut kecuali terbukti sebaliknya.

Sedang Komunitas pelukis adalah sekelompok orang dalam hal ini orang yang pandai melukis dalam kelompok para pelukis tersebut saling mengadakan interaksi berupa berbagai kegiatan untuk pengembangan kreatifitas dan kemajuan secara menyeluruh. Komunitas kelompok organisme (orang dsb), yang hidup dan saling ber

interaksi dll, suatu daerah tertentu masyarakat, paguyuban. Kepemilikan terhadap hak komunitas tersebut adalah jika lukisan dibuat secara bersama sama maka orang yang berperan dan ikut andil dalam penyelesaian dianggap sebagai pemiliknya.

Sedang Komunitas pelukis di Jakarta didapati terbanyak pada pasar seni diberbagai Galeri di Pasar Ancol, Mampang Prapatan, sedang para pelukis komunitas dalam arti kelompok pelukis berkumpul namun mereka tidak berinteraksi ada di Daerah Pasar Baru, Jakarta Pusat.

#### **4. Parameter kejahatan dibidang Karya seni rupa.**

Dalam menentukan kejahatan dibidang hak cipta, tolak ukur yang digunakan sangat bervariasi tergantung pada obyek, sasaran dan berbagai segi pandang. Dalam hak cipta untuk menentukan parameter tersebut antara lain :

- a. Penilaian terhadap mengalihwujudkan suatu lukisan, hal ini dalam Undang-undang hak cipta merupakan kejahatan, namun oleh para pelukis mereka tidak melakukan kejahatan, dengan pertimbangan bahwa ide masing-masing pelukis akan tidak sama antara pelukis yang satu dengan pelukis yang lain.
- b. Tentang gagasan suatu ide, bahwa dalam Undang-undang hak cipta dijelaskan, jika suatu ide belum diwujudkan maka belum dapat

dilindungi, yang menjadi masalah jika ide tersebut diwujudkan oleh pihak lain dan sedikit ada pengembangan, maka siapa yang menjadi pemilik hak Cipta,

- c. Pendaftaran hak cipta menggunakan sistem negatif deklaratif, didaftar maupun tidak didaftar mempunyai kekuatan hukum yang sama, dengan pertimbangan jika didaftar akan lebih mudah untuk pembuktian. Hal ini juga sebenarnya lebih menekankan pada pendaftaran. Namun realitanya yang mendaftar hak cipta sangat sedikit dan kejahatan dibidang ini yang paling banyak dilakukan.
- d. Perbanyakan, penggandaan, mengumumkan, mengalihwujudkan, mempublikasikan karya lukis secara komersial tanpa ijin pemilik lukisan.

##### **5. Bentuk Perlindungan terhadap pelukis.**

Bentuk perlindungan bagi pelukis dilakukan oleh aturan hukum untuk menata dan mengatur sebagai pedoman, Unsur aparat penegak hukum, dan komunitas sesama pelukis yang diantaranya dapat berupa :

- a. Memberikan rasa aman dan mendorong para komunitas pelukis dan pelukisnya untuk lebih berkreasi, hal ini dilakukan oleh Unsur aparat penegak hukum, karena dalam Undang-undang Hak Cipta dijelaskan bahwa pelanggaran dibidang Hak Cipta merupakan kejahatan sehingga unsur aparat penegak hukum harus aktif untuk



mencegah dan menindak terhadap pelaku kejahatan diantaranya dengan mencegah dan menindak adanya pembajakan, pengalihwujudan, dan perbanyakan tanpa sipemilik hak cipta khususnya dibidang lukisan.

- b. Meningkatkan Sumber Daya Manusia bagi komunitas dan pelukis yaitu dengan mensosialisasikan aturan hukum Hak Cipta dan memberikan gambaran akan sanksi kejahatan Hak Cipta.
- c. Pemerintah mengatur dengan hukum tertulis akan hak dan kewajiban para komunitas pelukis, dan memberikan fasilitas untuk menghantarkan karya cipta lukisan untuk dapat mempunyai nilai ekonomi, dan memberikan hak moral kepada pelukis yang tidak dapat dialihkan haknya kepada siapapun juga, untuk mewujudkan fasilitas tersebut diperlukan unsur aparat penegak hukum.
- d. Meluruskan budaya perilaku komunitas pelukis dan pelukis yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan menyadarkan kepada para seni rupa untuk menjunjung tinggi karya ciptanya dari peniruan, penjiplakan dan pengalihwujudan suatu lukisan.
- e. Memberikan perlindungan hukum dengan menegakkan aturan hukum, dan sistem hukum Hak Kekayaan Intelektual khususnya dibidang Senirupa.

### **BAB III**

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. HASIL PENELITIAN**

Setelah dilakukan penelitian di Instansi pemerintah dan swasta meliputi Kantor Hak Cipta, Direktorat jenderal Hak kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan HAM, Biro Pusat Statistik, Pelukis, dan komunitasnya, galeri serta instansi dan institusi terkait, maka disajikan hasil penelitian sebagai berikut :

#### **1. Aturan Hukum Hak Cipta Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pelukis.**

Pengaturan Hak Cipta dari waktu ke waktu mengalami berbagai perubahan, untuk disesuaikan dengan *TRIPs*, Konvensi Berne dan kondisi bangsa Indonesia, pengaturan perlindungan hukum dibidang Hak Cipta yang diatur pada persetujuan tentang aspek-aspek dagang dari hak atas kekayaan intelektual (HKI), dan perdagangan barang hasil pelanggaran HKI yaitu bahwa para anggota, bertekad untuk mengurangi gangguan dan hambatan terhadap perdagangan internasional, dan dengan memperhatikan kebutuhan untuk meningkatkan perlindungan yang efektif dan memadai terhadap HKI, dan untuk menjamin bahwa prosedur serta langkah-langkah

penegakan hukum HKI itu sendiri tidak menjadi hambatan terhadap perdagangan yang absah; diperlukan adanya :

1. penyelenggaraan standar dan prinsip-prinsip yang memadai mengenai keberadaan, lingkup serta penggunaan HKI yang terkait dalam kegiatan perdagangan.
2. penyelenggaraan tata cara yang efektif serta sesuai untuk melindungi HKI yang terkait dengan kegiatan perdagangan, dengan memperhatikan perbedaan sistem hukum nasional yang ada.

HKI adalah hak-hak perdata diatur dalam Pasal 1 tentang Sifat dan Lingkup kewajibannya adalah bahwa Anggota wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam persetujuan ini Anggota dapat, tetapi tidak wajib, untuk menerapkan dalam hukum domestiknya sistem perlindungan yang lebih luas daripada yang diwajibkan berdasarkan persetujuan ini, sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam persetujuan ini.

Anggota bebas menentukan metode yang paling sesuai dalam menjabarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam persetujuan ini ke dalam sistem dan praktek hukumnya masing-masing.

Sedang dalam Pasal 3 *National Treatment* Ayat 1 disebutkan Setiap anggota wajib memberikan perlindungan yang sama terhadap Kekayaan Intelektual warga Anggota lain seperti perlindungan yang diberikan kepada warganya sendiri.

Dalam kaitannya dengan pasal 3 dan 4 persetujuan ini, “perlindungan” meliputi yang mempengaruhi keberadaan perolehan, lingkup pelaksanaan dan penegakan HKI serta yang mempengaruhi penggunaan HKI yang secara khusus diatur dalam persetujuan ketentuan yang mengatur mengenai Dewan *TRIPs*.

Ayat 2. Anggota dapat memanfaatkan pengecualian yang disebut dalam ayat (1) diatas dalam kaitannya dengan prosedur peradilan dan administrasi, termasuk penetapan alamat pemberi jasa atau pengangkatan agen di dalam wilayah hukum salah satu Anggota.

Pasal 4 tentang perlakuan istimewa bagi negara tertentu menjelaskan bahwa sehubungan dengan perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual, semua keuntungan, kemanfaatan atau perlakuan istimewa yang diberikan oleh Anggota kepada warga negara lain harus, seketika dan tanpa syarat, diberikan pula kepada warga anggota lain

Selanjutnya *TRIPs* pada Bab II tentang Standar Mengenai Pemberian Ruang Lingkup dan Penggunaan HKI, pada bagian I

tentang Hak Cipta dan Hak-hak terkait lainnya dalam Pasal 9 tentang Kaitan dengan Konvensi Berne, dalam Ayat 2. Perlindungan terhadap Hak Cipta meliputi expressions dan tidak meliputi ide, prosedur, metode kerja atau konsep matematis sejenisnya. Sedang dalam Pasal 12 tentang Jangka Waktu Perlindungan mengatur bahwa dalam hal jangka waktu perlindungan suatu karya, foto grafi atau karya seni terapan dihitung tidak berdasarkan lamanya hidup manusia, maka jangka waktu tersebut tidak boleh kurang dari 50 tahun sejak akhir tahun takwin dari publikasinya yang sah, atau, apabila publikasi yang sah dimaksud tidak dilakukan dalam waktu 50 tahun sejak karya dibuat, jangka waktu tersebut tidak boleh kurang dari 50 tahun sejak akhir tahun takwin karya dibuat.

Dalam Rancangan Undang-undang Hak Cipta pada bagian kedua tentang pencipta dalam Pasal 5 Ayat 1. Dijelaskan Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta adalah:

- a. orang yang namanya terdaftar dalam Dalam Daftar Umum Ciptaan dan Pengumuman resmi tentang pendaftaran Ciptaan pada Departemen Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, atau;
- b. orang yang namanya disebut dalam Ciptaan atau diumumkan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan.

Pada hal yang sama juga diatur dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1997 tentang Hak Cipta.

Pada Bagian Keempat tentang Ciptaan yang Dilindungi Hak Cipta Pasal 12 Ayat h. mengatur tentang seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, seni terapan yang berupa seni kerajinan tangan.

Pada Bab III tentang Masa Berlaku Hak Cipta, Pasal 29 Ayat 1c. menjelaskan segala bentuk seni rupa seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung; Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.

Ayat 2. Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang terlama hidupnya dan berlangsung hingga 70 (tujuh puluh) tahun sesudah Pencipta yang terlama hidupnya tersebut meninggal dunia.

Pada Bab IV tentang Pendaftaran Ciptaan, Pasal 35 Ayat 4. Dijelaskan bahwa Ketentuan tentang pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan Hak Cipta. Sedang Pasal 36 menjelaskan Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan tidak mengandung arti sebagai

pengesahan atas isi, arti, maksud atau bentuk dari Ciptaan yang didaftar.

Pada Bab X tentang Penyelesaian Sengketa, pada Pasal 57 Ayat (1) menjelaskan Pemegang Hak Cipta berhak untuk mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakannya. Dan dalam Ayat (2) dijelaskan Pemegang Hak Cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah dan pertemuan ilmiah lainnya, atau pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau dengan cara melanggar Hak Cipta tersebut.

Ayat (3) Sebelum menjatuhkan putusan akhir, untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, Hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan Pengumuman, Perbanyakan, pengedaran, dan penjualan Ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta. Pada Pasal 60 menjelaskan Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 59 wajib diputus dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Niaga

yang bersangkutan. Sedang Pasal 61 ayat (1) mengatur Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Di ayat (3) Panitera menyampaikan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri paling lambat 2 (dua) hari terhitung setelah tanggal gugatan didaftarkan. Ayat (4) menjelaskan Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal gugatan didaftarkan. Pengadilan mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang. Serta ayat (5) menjelaskan Sidang pemeriksaan atas gugatan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal gugatan didaftarkan.

Pada Pasal 62 ayat (1) menjelaskan Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan. Dan di ayat (3) Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Sedang ayat (5) Salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) wajib disampaikan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat kepada para pihak paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan atas gugatan diucapkan. Kemudian Pasal 63 ayat (1) menjelaskan Upaya hukum yang dapat



dilakukan terhadap putusan atas gugatan adalah Kasasi ke Mahkamah Agung, tanpa melalui upaya banding. Ayat (2) Pemohon kasasi diajukan paling lambat 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan.

Pasal 64 ayat (2) Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi kepada pihak termohon paling lambat 2 (dua) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan. Ayat (3) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada Panitera Pengadilan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dan Panitera Pengadilan wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lambat 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterimanya. Dan ayat (4) Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi dan kontra memori kasasi beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal permohonan kasasi didaftarkan.

Pasal 65 ayat (1) menjelaskan Mahkamah Agung wajib mempelajari permohonan kasasi dan menetapkan hari sidang paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Ayat (2) Sidang pemeriksaan atas permohonan

kasasi dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Ayat (3) Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Pada ayat (6) Juru sita Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima.

Pasal 66 ayat (1) menjelaskan Terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Sedang Pasal 67 menjelaskan Selain penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Pasal 68 menjelaskan Hak untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 67 tidak mengurangi hak Negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran Hak Cipta. Pada Bab XI tentang Penetapan Sementara Pengadilan, pada Pasal 69 bahwa atas permintaan pihak yang Hak Cipta atau Hak yang Berkaitan dengan Hak Ciptanya dirugikan, hakim

Pengadilan Niaga dapat menerbitkan surat penetapan yang segera dan efektif untuk :

- a. Mencegah berlanjutnya pelanggaran Hak Cipta atau Hak yang Berkaitan dengan Hak Cipta., khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar Hak Cipta ke dalam jalur perdagangan termasuk tindakan importasi.
- b. Menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak yang Berkaitan dengan Hak Cipta tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti.
- c. Meminta kepada pihak yang merasa dirugikan, untuk memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak atas Hak Cipta atau Hak yang Berkaitan dengan Hak Cipta, dan hak Pemohon tersebut memang sedang dilanggar.

Pada Pasal 71 mengatur bahwa Dalam hal Hakim Pengadilan Niaga telah menerbitkan penetapan sementara Pengadilan. Hakim Pengadilan Niaga harus memutuskan apakah mengubah, membatalkan atau menguatkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf a dan b dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya penetapan sementara Pengadilan tersebut. Sedang Pasal 72 menjelaskan Dalam hal penetapan sementara Pengadilan dibatalkan, pihak yang merasa dirugikan

dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang meminta penetapan sementara Pengadilan, atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh penetapan sementara Pengadilan, atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh penetapan sementara pengadilan tersebut.

Pada Bab XII tentang Penyidikan, Pasal 73 ayat (2) menjelaskan Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
- c. meminta keterangan dan mengumpulkan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta.
- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
- e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain;
- f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta.

Pada Bab XIII tentang Ketentuan Pidana pada Pasal 74 ayat (1) berbunyi Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu Ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah). Dan di ayat (2) menjelaskan Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah).

Dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1997 tentang Hak Cipta diantaranya mengatur pasal 1 ayat (1) berbunyi Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

Ayat (2) Ciptaan adalah setiap karya Pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Ayat (3) Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau orang yang menerima hak tersebut dari Pencipta atau

orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut diatas.

Pasal 8 ayat 1 berbunyi Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaan nya, maka pihak yang untuk dan dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan adalah Pemegang Hak Cipta, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pembuat sebagai penciptanya apabila penggunaan ciptaan tu diperluas keluar hubungan dinas. (1a) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi ciptaan yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.

Ayat (2) Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, maka pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak

Pasal 10a ayat (1) berbunyi apabila suatu ciptaan tidak diketahui penciptanya dan ciptaan itu belum di terbitkan, maka Negara memegang Hak Cipta atas ciptaan tersebut untuk kepentingan penciptanya.

Ayat (2) apabila suatu ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui penciptanya atau pada ciptaan tersebut hanya tertera nama

samaran penciptanya, maka penerbit memegang Hak Cipta atas ciptaan tersebut untuk kepentingan penciptanya.

Pasal 27 ayat (1) berbunyi Hak Cipta atas ciptaan: a. program komputer; b. sinematografi; c. rekaman suara; d. karya pertunjukan; e. karya siaran; berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

Ayat (2) Hak Cipta atas ciptaan yang berupa fotografi berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali diumumkan.

(2a) Hak Cipta atas karya susunan perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali diterbitkan.

Ayat (3) Hak Cipta atas ciptaan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) dan Pasal 26 ayat(1) yang di miliki atau dipegang oleh suatu badan hukum, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan, sedangkan Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat(2) dan ayat(2a) berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun. 9. Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan Pasal 27A sehingga Pasal 27A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27A ayat (1) Hak Cipta atas ciptaan yang di pegang atau dilaksanakan oleh Negara berdasarkan: a. ketentuan Pasal 10 ayat(2) huruf b, berlaku tanpa batas waktu; b. ketentuan Pasal 10A

ayat(1), berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya cipta tersebut pertama kali diketahui umum.

Ayat (2) Hak Cipta atas ciptaan yang dilaksanakan oleh penerbit berdasarkan ketentuan Pasal 10A ayat(2), berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya cipta tersebut pertama kali di terbitkan.

Pasal 42 ayat (1) Pemegang Hak Cipta berhak untuk mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan negeri atas pelanggaran Hak Ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakannya.

Ayat (2) dalam hal terdapat gugatan untuk penyerahan benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Hakim dapat memerintahkan bahwa penyerahan itu baru dilaksanakan setelah Pemegang Hak Cipta membayar sejumlah nilai benda yang diserahkan kepada pihak yang beritikad baik.

Ayat (3) Pemegang Hak Cipta juga berhak untuk meminta kepada pengadilan negeri agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah dan pertemuan ilmiah lainnya, atau pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau dengan cara melanggar Hak Cipta tersebut.



Ayat (4) Untuk mencegah kerugian yang lebih besar kepada pihak yang haknya dilanggar, Hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pembuatan, perbanyak, penyiaran, pengedaran, dan penjualan ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.

Pasal 47 berbunyi sebagai berikut Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan Hak Cipta, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta.

Ayat (1) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) berwenang:

- a. Melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan dengan tindak pidana dibidang Hak Cipta;
- b. Melakukan penelitian terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana dibidang Hak Cipta;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang Hak Cipta;

- d. Melakukan pemeriksaan atau pembukuan, pencatatan dan dokumen lainnya yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang Hak Cipta;
- e. Melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dibidanh Hak Cipta.
- f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Hak Cipta.

Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan mengingat ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Penyampaian berkas perkara yang telah dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri sipil tersebut, disampaikan kepada Penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara, dan dalam realitanya penyidik Kepolisian Negara lebih berperan aktif untuk melakukan penyidikan dan pemeriksaan ulang.

Data permohonan pendaftaran ciptaan terdaftar dan ditolak yang terdapat pada pada Direktorat Hak Cipta Topografi Sirkuit Terpadu dan Desain Industri, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia dari tahun 1993 sampai dengan Januari tahun 2001 adalah sebagai berikut :

Tahun	Permohonan Pendaftaran Ciptaan			Ciptaan Terdaftar		Ciptaan Ditolak	
	Dalam Negeri	Luar negeri	Rata-rata per bulan	Dalam Negeri	Luar Negeri	Dalam Negeri	Luar Negeri
	2	3	4	5	6	7	8
1993	3.591	128	310	2.356	121	1.055	7
1994	3.738	209	329	2.366	143	1.093	61
1995	4.373	184	380	3.134	114	1.245	70
1996	4.646	294	412	2.869	195	1.147	38
1997	2.065	120	182	594	42	223	5
1998	580	26	51	311	6	222	20
1999	684	14	58	678	14	138	-
2000	1.1.026	23	87	387	5	5	-
28-02	176	-	88	-	-	-	-

Sedang data Petikan, Pemindahan Hak Perubahan Nama / Alamat adalah sebagai berikut :

Tahun	Pengajuan Permohonan			Permohonan yang dikabulkan		
	Petikan	Pemindahan Hak	Perubahan nama/alamat	Petikan	Pemindahan Hak	Perubahan nama/alamat
1	2	3	4	5	6	7
1993	25	24	1	-	-	-
1994	25	24	3	-	-	-
1995	24	32	10	1	-	-
1996	24	35	8	2	4	-
1997	15	30	9	4	4	3
1998	7	5	9	-	-	4
1999	9	11	30	2	18	29
2000	15	15	2	1	9	1
28-2	-	2	3	-	-	-

Selanjutnya data jumlah pelukis yang ada di Ibukota Jakarta, yang didapat dari Biro Pusat Statistik Kantor Pusat Jakarta pada akhir tahun 2000 adalah sebagai berikut :

No.	Wilayah	Jumlah Pelukis	Jumlah Galeri (Komunitas)
1.	Jakarta Pusat	48	29
2.	Jakarta Barat.	23	11
3.	Jakarta Timur.	38	19
4.	Jakarta Utara.	43	32
5.	Jakarta Selatan.	37	16
Jumlah		189	107

## **2. Perlindungan Hukum yang Dilakukan oleh Unsur Aparat Penegak Hukum :**

Unsur aparat penegak hukum dibidang Hak Cipta yang terdiri dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Hak Cipta, Polisi, Jaksa dan Hakim, dan hal yang mendukung terhadap pelaksanaan tugas tersebut adalah penasehat Hukum, Petugas Pemasyarakatan dan Bea Cukai juga merupakan unsur aparat penegak hukum.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Hak Cipta keberadaannya berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pada pasal 6 ayat 1 huruf b menyebutkan bahwa Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang<sup>109109</sup>, dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, pada pasal 47 ayat 1 mengatur bahwa Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Departemen Kehakiman diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang hak cipta, serta Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indoesia Nomor : M.04-PW.07.03 Tahun 1988 tentang Penyidik Hak Cipta pada Pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa Penyidik Hak

---

<sup>109</sup> Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Penerbit Simplek, Jakarta 1982.

Cipta adalah Pegawai negeri Sipil di Lingkungan Departemen Kehakiman yang mempunyai wewenang melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Hak Cipta<sup>110</sup>.

Sesuai dengan Pasal 46 Undang-undang Hak Cipta disebutkan bahwa Tindak pidana pelanggaran dibidang Hak Cipta adalah Kejahatan, sehingga konsekwensinya Unsur Aparat Penegak Hukum dibidang Hak Cipta dalam melakukan perlindungan hukum kepada pelukis serta karya cipta umumnya, harus secara aktif untuk melakukan tindakan tanpa adanya aduan dari masyarakat.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dibidang hak cipta diantaranya dalam prakteknya ada dua hal yaitu menerima laporan dari masyarakat karena karya ciptanya dilanggar oleh pihak lain, dan dengan melakukan tindakan tanpa ada laporan, artinya berperan aktif untuk mengungkap segala bentuk tindak kejahatan dibidang Hak Cipta.

Berdasarkan data yang ada di Direktorat Hak Cipta Topografi Sirkuit Terpadu dan Desain Industri, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan HAM dari tahun 1992 sampai dengan tahun 2001 perkara perdata yang tercatat adalah sebagai berikut :

---

<sup>110</sup> Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor : M.04.PW.07.03-Tahun 1988 tentang Penyidik Hak Cipta.

No.	Tahun	Bidang Pelanggaran			
		Program Komputer	Seni Motif	Seni Lukis	Lainnya
1.	1992	-	2	3	-
2.	1993	-	-	3	2
3.	1994	-	-	4	3
4.	1995	-	-	6	3
5.	1996	1	-	6	5
6.	1997	-	-	5	6
7.	1998	-	-	-	2
	Jumlah	1	2	27	21

Dari data yang ada bahwa perkara perdata tersebut, jika dilihat khusus perkara perdata yang menyangkut bidang seni lukis baik seni lukis logo, seni lukis abstrak, dan jenis seni lukis lainnya dapat dirinci sebagai berikut :

No	Tahun	Seni Lukis		Jumlah
		Logo	Lainnya	
1.	1992	2	1	3
2.	1993	2	1	3
3.	1994	2	2	4
4.	1995	4	2	6
5.	1996	1	5	6
6.	1997	-	5	5
7.	1998	-	-	-
	Jumlah	11	16	27

Kejahatan dibidang Hak Cipta sesuai dengan Undang-undang Hak Cipta, sanksi yang dijatuhkan dapat berupa pidana penjara, kurungan, pidana denda, maupun pidana kurungan pengganti denda. Perkara pidana diproses dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Hak Cipta, Kepolisian dan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, serta Pemeriksaan perkara oleh Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Niaga.

Tenggang waktu yang diberikan undang-undang Hak Cipta menyangkut perkara perdata, jauh lebih singkat jika dibandingkan dengan . tenggang waktu yang diatur dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, hal ini menunjukkan bahwa perkara Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta dibidang Seni rupa lebih bersifat perdata, sehingga Undang-undangpun lebih memberikan perbedaan dalam penyelesaian perkara, hal ini juga tidak sesuai dengan tenggang waktu yang diatur dalam KUH Perdata.

Adapun perkara pidana yang tercatat pada Direktorat Hak Cipta Topografi Sirkuit Terpadu dan Desain Industri, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia sampai dengan Januari tahun 2001 perkara adalah sebagai berikut :



**DATA PERKARA PIDANA DIBIDANG HAK CIPTA  
(SAMPAI TAHUN 2001)**

No.	Tahun	Penyidik		Obyek Hak Cipta						Lokasi		Para pihak		
		POLRI	PPN	Potret	Buku	Seni Lukis	Musik	VCD	Lain nya	Jkt	Luar Jkt	Tersangka BD	P	Pelapor BD P
1.	1998	3	3	-	1	3	1	-	1	4	2	2	4	3 3
2.	1999	7	-	1	-	4	-	1	-	5	2	4	3	4 3
3.	2000	7	2	-	-	2	3	4	1	6	3	6	3	4 5
Jumlah		17	5	1	1	9	4	5	2	15	7	12	10	11 1 1
Total		22		22						22		22		22

Data dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

Keterangan :

BD : Badan Hukum, P : Perorangan

**DATA PERKARA PIDANA BIDANG SENI LUKIS**  
**(SAMPAI TAHUN 2001)**

No.	Tahun	Penyidik		Obyek Seni Lukis (Seni rupa)					Lokasi		Para pihak			
		POLRI	PPNS	Logo	Kwan Kong	Gambar Teknik	Etiket	Motif	Jkt	Luar	Tersangka		Pelapor	
											BD	P	BD	P
1.	1998	1	2	2	1	-	-	-	2	1	1	2	2	1
2.	1999	4	-	-	-	2	1	1	3	1	3	1	3	1
3.	2000	1	1	1	-	-	-	1	-	2	2	-	1	1
Jumlah		6	3	3	1	2	1	2	5	4	6	3	6	3
Total		9		9					9		9			

Data dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Keterangan :

BD : Badan Hukum, P : Perorangan

### **3. Pemahaman Pelukis di Daerah Jakarta kurang memberikan tempat bagi berlakunya Undang-undang Hak.**

Hasil penelitian yang dilakukan terhadap para pelukis, komunitasnya tentang pemahaman terhadap perlindungan Hukum, dapat disajikan hasil penelitian sebagai berikut :

#### **Wawancara dengan Tohny Yusuf**

Wawancara dengan tohny Yusuf dilakukan di Jakarta Selatan tanggal 26 Juli 2001. Seniman lulusan ASRI angkatan ke-6 tentang pemalsuan karyanya menyatakan bahwa ia hanya menemukan tiga kali pemalsuan terhadap karyanya yang secara kebetulan ditemukan oleh dia sendiri dengan urutan peristiwa dan cara pemalsuan sebagai berikut:

- a. Tahun 1967 sebuah karyanya dibeli oleh orang di Jakarta. Satu setengah tahun kemudian ia menemukan lukisannya dipamerkan di sebuah pameran tapi tandatangannya sudah berubah tanda tangan orang lain. Ia meyakini bahwa itu lukisannya karena idenya lahir dari jiwanya, sehingga ia mengenalnya.
- b. Lukisan kedua yang telah menjadi koleksi orang dijiplak 95% dan ditanda tangani si pemalsu, Lukisannya yang dipalsu ini ditemukan di Pameran Gedung Kesenian Jakarta.

c. Lukisan ketiga ditemukan disebuah pameran. Lukisannya masih asli karya Tohny, hanya diganti tandatangannya dengan tanda tangan orang lain yang ditumpuk diatas tanda Tohny yang terlihat masih membayang.

Untuk ketiga peristiwa ini ia tidak mengadukan kepada pihak yang berwajib, karena tidak tahu peraturan hukum dan ia tidak punya bukti seperti dokumentasi kolektor karyanya, karena saat itu pengaduan tentang masalah pemalsuan seperti diatas belum terfikirkan, dan hal ini ia akui sebagai salah satu kelemahan dirinya dan mungkin sebagian besar seniman kita.

Mengenai pemalsuan ia mensinyalir dilakukan oleh perorangan (pelukis) dan juga kelompok orang (komunitas pelukis) yang diorganisir diantaranya oleh galeri-galeri atau toko-toko benda seni yang kurang bertanggung jawab, bahkan tidak menutup kemungkinan hal itu dilakukan oleh keluarga seniman itu sendiri.

Tentang Undang-undang Hak Cipta ia menyarankan pemerintah untuk segera mengambil tindakan aktif dengan memperkenalkan undang-undang tersebut secara umum, melalui media masa agar masyarakat seni faham terhadap Undang-undang Hak Cipta tersebut.

### **Wawancara dengan Barli**

Barli adalah seorang seniman terkenal dari Bandung. Wawancara dengannya dilakukan di Jakarta Pusat, pada tanggal 30 Juli 2001, ia

menyatakan karyanya yang dipalsu dan kebetulan ditemukan ada sepuluh karya. Semuanya diketahui melalui kolektor yang akan membeli kemudian mengecek keaslian lukisan tersebut pada dirinya.

Salah satu karya palsu yang terakhir ditemukan dihadirkan pada saat wawancara. Lukisan ini menurut dugaan Barli dijiplak dari buku biografinya yang berjudul "Titik Sambung". Lukisan ini berupa gambar dua orang gadis yang sedang duduk. Kepalsuan jelas terlihat dari ukuran yang lebih kecil dari yang asli terbuat dari charcoal diatas kanvas, sedangkan yang palsu terbuat dari akrilik berkualitas rendah diatas kanvas. Sapuan garis kasar dengan teknik seadanya.

Dalam menghadapi kasus pemalsuan ini, Barli mempunyai dua sikap:

- a. Sikap pertama yaitu bagi pemalsu perorangan dari kalangan mahasiswa atau seniman kecil tidak akan mengambil tindakan keras, hanya menasehatinya agar berusaha jujur dengan tandatangannya sendiri. Untuk menjadi pengagum dengan meniru gaya dan idiomnya buat Barli tidak menjadi masalah.
- b. Sikap kedua yaitu pada pemalsu yang diorganisir oleh para pedagang seni yang biasanya galeri atau toko-toko benda seni. Barli akan mengajukannya ke pengadilan dan menuntutnya sesuai dengan hukum yang berlaku karena orang-orang inilah yang betul-betul melihat karya seni hanya sebagai komoditi saja sehingga ingin mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dengan cara yang kotor

serta tidak peduli terhadap kerugian moril maupun materiil orang lain serta nama bangsa dimata dunia.

Menurutnya pemalsuan yang diorganisir ini sangat rapi dan terselubung sifatnya. Yang menjadi korbannya adalah seniman terkenal nasional maupun internasional, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal.

Untuk mendeteksi palsu maupun tidaknya sebuah lukisan di Indonesia, masih sangat mudah karena pemalsuan hanya berkisar pada wujudnya saja. Dengan menggunakan tenaga ahli yaitu yang faham terhadap karya seniman dimaksud, Biasanya teman dekatnya yang selalu mengikuti perkembangan karya seniman tersebut.

Untuk hal tersebut diatas seorang seniman harus hati-hati karena ia pernah mengalami pengalaman pahit ketika dengan niat baik sering membantu kolektor yang memeriksakan asli tidaknya sebuah karya teman dekatnya yang sudah meninggal. Namun kebbaikannya tersebut menjadi bumerang baginya karena justru ia kemudian dituduh mengeluarkan pernyataan keaslian palsu oleh orang-orang terdekat seniman dimaksud dan galeri-galeri yang mempunyai maksud jelek. Sejak saat itu, ia tidak bersedia lagi menerima permintaan tersebut.

Mengenai pengetahuantentang Undang-Undang Hak Cipta ia mengaku tahu tapi kurang faham. Ia mengusulkan ada lembaga yang membantu pemerintah dalam memasyarakatkannya.

### **Wawancara dengan Heyi Ma'mun**

Wawancara dengan Heyi Ma'mun seorang seniman lukis lulusan ITB dilakukan di Jakarta Barat, pada tanggal 5 Agustus 2001.

Dalam hal pemalsuan karya, ia mengalami satu kali pemalsuan terhadap karyanya yang tertangkap tangan secara kebetulan melalui temannya yang ditawari sebuah karya Heyi oleh seorang pemuda dan temannya jelas tahu karya tersebut palsu. Maka si pemuda dibawa ke rumah Heyi dengan alasan memeriksakan kualitas lukisan tersebut pada orang yang lebih mengerti seni tanpa menyebutkan bahwa ia dibawa kepada pelukisnya sendiri dan si pemuda ternyata benar-benar tidak tahu Heyi, ia hanya mendengar dan mengenal dari cerita orang dan dari karyanya. Ketika diinterogasi ia hanya menyatakan memalsu karena butuh uang, dan mengaku telah banyak memalsukan karya orang, Cuma diakuinya yang paling sulit adalah memalsu lukisan karya Heyi. Ia mengakui bahwa perbuatannya merupakan perbuatan tidak terpuji walaupun ia tak tahu tentang hukum, Begitupun Heyi sendiri meskipun ia tahu adanya Undang-undang Hak Cipta tapi ia tak tahu persis isinya, yang ia tahu memalsu pasti perbuatan melanggar hukum bahkan termasuk kejahatan atau kriminal.

Tindakan Heyi saat itu hanya menasehati si pemalsu, karena ia merasa tidak tega untuk mengadukannya ke polisi. Ia yakin pemalsuan

itu berlatar belakang kebutuhan materi untuk diri sendiri saja, dan hal ini dianggap oleh Heyi sebagai amal saja.

Mengenai Undang-undang Hak Cipta, Heyi mengusulkan agar pemerintah dan lembaga terkait segera memasyarakatkannya dikalangan seniman khususnya para pelukis dalam bentuk workshop, seminar dan bentuk lain dengan tujuan agar lebih mudah untuk difahami oleh masyarakat pelukis dan komunitasnya termasuk didalamnya galeri.

### **Wawancara dengan Asmudjo**

Wawancara dengan Asmudjo, seorang seniman, dosen dan juga kurator Galeri Padi serta Galeri Soemardjo ITB, dilakukan di Jakarta Pusat, pada tanggal 10 Agustus 2001.

Asmudjo menyatakan bahwa tindakan pemalsuan sudah termasuk perbuatan kriminal. Namun ia mempertanyakan definisi istilah pemalsuan, apakah menjiplak karya orang atau menggabung-gabung karya sehingga menjadi karya baru lalu ditandatangani si pembuat disebut pemalsuan?

Ia berpendapat bahwa seni adalah ekspresi diri bukan barang dagangan atau komoditi. Karena seni itu ekspresi maka bila karyanya ada yang meniru, seniman tersebut harus merasa senang karena ilmunya berhasil ditransfer oleh pengagumnya. Oleh karena itu dari

UPT-PUSTAK-JUNDA



manakah kita menentukan parameter pemalsuan tersebut bila parameternya tidak ada.

Asmudjo sendiri belum pernah menjadi korban, tetapi bila melihat pasar untuk benda seni, ia melihat ada tiga macam pasar seni, yaitu:

1. Pasar seni super elit seperti museum seni dan kolektor asli
2. Pasar elit yaitu lingkungan pencinta seni yang benar-benar mengerti seni
3. Pasar yang hanya mengejar materi, melihat seni hanya sebagai komoditi. Pasar tempat inilah yang diduga menjual lukisan palsu.

Bila melihat galeri sebagai perantara seniman dan peminatnya, akan terlihat dua kategori, yaitu:

1. Galeri sebagai wacana, tempat orang menikmati, belajar mengerti dan memahami seni disamping sebagai penelaah. Biasanya galeri seperti ini didirikan oleh orang-orang yang berpendidikan seni. Galeri ini lebih cenderung bertujuan sebagai tempat memamerkan karya sebagai wacana (pengucapan), bahasa rupa dan melahirkan pasar yang sehat, kompetitif, jujur, terbuka, dan kuratornya berkualitas.
2. Galeri kedua adalah galeri yang melihat seni hanya sebagai komoditi, umumnya didirikan oleh pengusaha, pedagang yang tidak berlatar belakang seni dan tidak begitu peduli dengan penghargaan seni sebagai ungkapan bahasa rupa untuk dinikmati,

dihayati dan dipelajari. Galeri seperti ini betul-betul pasar untuk memperjual belikan dagangannya dengan menghasilkan untung yang sebesar-besarnya. Oleh karena itu kadang-kadang melahirkan persaingan yang tidak sehat, tidak jujur dan kuratornya tidak berkualitas sehingga kemungkinan terjadinya manipulasi karya di galeri seperti ini sangat besar, sehingga merusak lingkungan seni dan memunculkan seniman-seniman yang kurang bermoral.

Mengenai pengetahuan terhadap Undang-undang Hak Cipta, Asmudjo mengaku mengetahuinya tapi tidak memahaminya. Lebih jauh ia menyatakan komentarnya tentang pemberlakuan Undang-undang HKI Internasional atau TRIPs di Indonesia, kemungkinan kita akan mendapat dua macam kerugian, yaitu

1. Kita sukar melindungi karya bangsa sendiri karena parameternya tidak jelas dan sarana pendeteksinya belum lengkap.
2. Kita tidak dapat melindungi karya bangsa dan seniman kita yang terjerat hukum nasional, hanya karena hukum tersebut belum memasyarakat diberbagai lapisan.

### **Wawancara dengan Tisna Sanjaya**

Hasil wawancara dengan Tisna Sanjaya yang dilaksanakan tanggal 18 Agustus 2001, di Pasar Seni Ancol Jakarta Utara, dapat disimpulkan sebagian besar sama dengan pendapat Asmudjo. Tisna menambahkan contoh-contoh lain dari perkembangan seni rupa murni

ITB sendiri, yaitu bahwa Asmudjo sering kali menjiplak karyanya seperti patung karya Tisna yang berjudul "berfikir dengan dengkul" yang dijiplak Asmudjo dengan persis hanya ukurannya saja yang lebih kecil. Malahan selama proses pembuatannya pun Tisna ikut memberi saran.

Dan semua itu jelas penjiplakan karena dibuat sepersis mungkin. Tetapi karena hal itu dilakukan dengan terbuka dan tidak terselubung, disertai dengan niat baik yaitu semacam parodi atau tanggapan terhadap karya yang lain, maka ini masih dianggap berjalan pada rel akademik dan tidak terkotori oleh pemikiran yang lain.

Hal seperti itu dalam seni rupa adalah biasa, seperti juga Salvador Dali dengan Monalisa berkumisnya, yang melahirkan kreativitas seni baru untuk menggugah daya pemikiran atau paradigma baru terhadap perkembangan seni rupa.

Mengenai pemalsuan yang dilakukan untuk mengejar keuntungan, jelas merupakan tindak kriminal yang tidak bermoral. Hal ini memang sukar diungkap karena bila kita menelusurinya kita masuk ke daerah yang berbahaya sebab umumnya pemalsu ini mempunyai back-up yang bermodal besar. Disamping itu ada kecurigaan yang mungkin benar bahwa jangan-jangan si orang jahat itulah yang mengatur dan merekayasa agar lukisannya menjadi meroket. Ia banyak menemukan karya yang irrasional dimana harganya tidak sebanding dengan penampilannya ditinjau dari segi ilmu seni.

Tisna merasa banyak seniman yang juga kurang berfikir bijak dalam menentukan harga, sehingga siapa tahu pemalsuan itu sendiri adalah bentuk parodi yang lain, karena harganya sangat tinggi sehingga membuat jurang pemisah yang lebar dan membuat orang lain iri terutama diantaranya mungkin seniman muda yang berbakat tapi kurang beruntung dan tidak mempunyai modal untuk berjuang meraih ketenaran nama. Maka karena memang segi moralitas mereka kurang, akhirnya mengambil jalan pintas dengan memalsu lukisan seniman mahal.

Dalam masalah harga tadi, ia sering mendengar komentar teman-teman dari luar negeri yang tercengang melihat tingginya harga lukisan Indonesia, Yang tidak sebanding dengan nilai-nilai yang terkandung didalamnya ditinjau dari sudut pandang seni rupa. Harga karya Picasso yang asli saja harganya malahan dibawah lukisan Indonesia yang harganya sangat fantastis.

Mengenai pemalsuan sendiri yang memang bertujuan untuk meraup untung banyak, hal ini jelas merupakan tindak kriminal. Adapun jalan keluarnya harus ditinjau dari berbagai sektor, diantaranya mungkin dengan penelitian yang mendalam tentang masalah.

Mengenai masalah penegakkan Undang-undang Hak Cipta harus segera dimasyarakatkan undang-undang ini, dan para konsultan HKI untuk memberikan bimbingan. Harus ada para ahli seperti misalnya

Bali yang mengetahui banyak tentang style, Hendra Gunawan dan pakar-pakar lain yang bekerja sama dengan lembaga tersebut. Kesimpulannya Tisna setuju bila badan seperti itu didirikan yang dapat berbentuk asosiasi seniman khusus dalam bidang hak cipta.

#### **Pendapat Yusuf Affendi**

Yusuf Affendi (PR, 1999) dilakukan di Jakarta Selatan, pada tanggal 24 Agustus 2001, telah diangkat dari tulisannya tentang kasus pemalsuan karya lukis.

Ia mengungkapkan bahwa pemalsuan di Indonesia sudah parah, contoh yang paling akhir adalah munculnya lukisan Jeihan berjudul "Wanita" dan lukisan Popo Iskandar berjudul "Macam-macam" yang palsu sempat masuk ke balai lelang akbar internasional yang ternama di Singapura . Kedua lukisan tersebut terlihat dalam katalog balai lelang tersebut, yang ternyata dimasukkan oleh seorang kurator Indonesia dari Jakarta. Tentu saja balai lelang yang mempunyai reputasi internasional ini merasa kebobolan. Meskipun sempat menimbulkan kehebohan namun akhirnya dapat diredam dengan kecanggihan dan pengalaman balai lelang tersebut. Hanya akibatnya dunia seni rupa Indonesia semakin terpuruk di dunia internasional. Karena peristiwa tersebut penampilan kurator, kolektor, galeri, museum, lembaga-lembaga terkait dan seniman Indonesia dianggap buruk, meskipun mereka sebenarnya memaklumi bahwa usaha pemalsuan tersebut

hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab tetapi akhirnya semua menjadi terkena getahnya.

Proses pemalsuan menurut versi Yusuf Affendi adalah sebagai berikut: biasanya pemalsuan dilakukan oleh pelukis yang masih polos yang hanya butuh sejumlah uang sebagai upah meniru lukisan seniman terkenal. Kemudian lukisan ini dikirim ke "dealer" yang memesannya atau yang menampungnya dan pada akhirnya akan sampai ke tangan kurator seni atau orang kaya yang mudah ditipu.

Beberapa macam cara pemalsuan antara lain:

1. Memalsu karya seniman terkenal sekaligus dengan tanda tangannya oleh seorang pelukis. Cara ini termasuk yang paling banyak dilakukan.
2. Pemalsu lukisan dan pemalsu tanda tangan berbeda orangnya. Biasanya pemalsu lukisan hanya suruhan dari aktor pemikir (biasanya pedagang) sedangkan tanda tangan biasanya dipalsu oleh keluarga tokoh seniman itu sendiri. Biasanya dibantu pula oleh pedagang karya bermodal besar tapi kurang bermoral.
3. Memalsu atau meniru gaya, corak, tema dari seniman terkenal tanpa memalsu tanda tangannya. Cara ini tidak banyak pelakunya. Mereka melakukannya karena gaya atau corak tertentu sedang laku di pasaran.

Bagaimana cara memberantasnya, memang sulit untuk dilakukan karena untuk hal itu harus ada lembaga yang saling bekerja sama seperti museum seni, galeri, para kolektor, pakar hukum bidang hak cipta dan tentu saja polisi, seperti halnya yang telah dilakukan oleh pemerintah Singapura.

Saat ini kasus pemalsuan di Indonesia sudah dalam kondisi gawat bila ditinjau dari segi wibawa budaya serta tata krama berkesenian. Pamor seni rupa Indonesia telah coreng moreng karena ulah segelintir orang yang hanya mengejar uang. Golongan perusak seni ini mungkin pula orang-orang yang tidak pernah merasa sebagai warga negara dan tidak peduli terhadap kehormatan bangsa. Buahny mereka keruk habis-habisan sedang sampahnya untuk bumi kesenian Indonesia.

Yusuf Affendi sangat menyayangkan terhadap moral seniman muda yang mau saja diperalat jadi pemalsu karena terdorong masalah ekonomi. Mereka dipesan memalsu lukisan sejumlah seniman terkenal oleh jaringan semacam "Mafia" kolektor seni lukis yang menguasai pemasaran karya, yang berkedudukan di Jakarta. Usaha dari mafia ini terbentang sampai Denpasar lewat Bandung dan Yogyakarta sebagai kota-kota potensial di bidang seni rupa. Karya yang dipalsu adalah semua karya terkenal seperti Soedjojono, Hendra Gunawan, Affandi dan lain-lain. Pemalsuan tidak hanya satu dua lukisan tapi dapat

sampai satu truk untuk satu kali pesanan yang lengkap dengan tanda tangan dan tahun pembuatannya. Lingkaran pasarpun dibentuk sedemikian rupa oleh mafia tersebut dan dijalankan secara rapi dan "terhormat". Pembeli dan penampung lukisan palsu tersebut bisa sampai ke luar negeri seperti terungkap pada peristiwa balai lelang di Singapura.

Proses pemalsuan mungkin hanya bermodal beberapa juta saja tetapi mereka menjual hasilnya dengan harga puluhan juta bahkan ratus juta rupiah. Tentu saja hal ini sangat merugikan secara materi. Tapi yang paling parah adalah dari segi moral bangsa di mata dunia dalam bidang seni rupa. Demikian uraian Yusuf Affendi mengenai situasi dunia palsu memalsu karya lukis di Indonesia.

Disamping itu Affendi mengungkapkan bahwa pemalsuan lukisan bukan merupakan barang baru dan tidak hanya terjadi di Indonesia. Contohnya adalah yang dilakukan oleh Elmyr de Hory yang dengan kemahirannya sanggup memalsu karya Pablo Picasso, Henry Matisse, Andre Derain dan pelukis lain seangkatannya. Ia sudah memalsu ribuan karya dan menjual ke berbagai museum, galeri hingga balai lelang terkenal. Semuanya kebobolan karena keahlian Elmyr yang tinggi dalam memalsu lukisan-lukisan tersebut. Pengakuannya di penjara mengatakan bahwa ia sangat bangga dapat menjual karya Derain palsu pada tahun 1960 dengan harga 115.000 dolar AS, dan



lukisan tersebut sanggup menembus balai lelang terkenal di New York tanpa diketahui kepalsuannya.

Ternyata pengagum Elmyr dan penganut fanatiknya mendirikan sekolah khusus seni yang meniru karya-karya modern yang diberi nama "Sekolah Seni Elmyr". Sekolah ini mempunyai disiplin yang ketat dengan hanya menerima murid-murid yang cerdas dan pintar dengan segala tugas dan keahlian meniru kebiasaan seniman dalam berkarya. Khabar terakhir dari Sydney, Australia ada kursus khusus yang meniru lukisan-lukisan Van Gogh dan seniman sezamannya.

#### **Wawancara dengan Drs. Soewarno**

Wawancara dengan Drs. Soewarno, seorang kurator seni dari Yogyakarta dilakukan di Jakarta Timur, tanggal 30 Agustus 2001. Soewarno mengatakan bahwa secara faktual ada bukti karya palsu yang pelukisnya mengakui pernah di palsu beberapa kali seperti misalnya Widayat, Joko Pekik, Entang Wiharso, Eddy Heryono.

Untuk mengetahui atau mendeteksi lukisan palsu parameternya memang agak sulit. Saat ini di Indonesia hal tersebut baru bergantung pada kejelian melihat seorang ahli dari kasus per kasus, misalnya untuk meneliti sebuah lukisan palsu karya Widayat. Untuk menentukan apakah lukisan itu palsu maka kita harus mengenal karya-karya Widayat dengan baik. Bila kita melakukan pengamatan-pengamatan yang cukup panjang tentu kita akan tahu titik kelemahan yang muncul

pada lukisan palsu tersebut. Hal ini dapat meliputi aspek material, idiom-idiom yang digunakan, aspek garis, aspek warna sampai ke aspek-aspek elementer.

Pernah terjadi kasus dimana ada seorang yang datang dengan karya Widayat yang sangat "cantik". Setelah diamati ternyata tanda tangannya terlalu besar, obyek-obyeknya dibuat lebih besar, lebih rapin dan lebih sempurna dibanding dengan karya Widayat yang asli. Untuk mengamati hal seperti ini tentu tidak mudah, karena memerlukan ilmu pengetahuan tersendiri dan profesi tersendiri seperti misalnya harus adanya orang yang mampu melihat semua itu dari karakter tiap seniman dalam teknik berkaryanya tanpa membandingkan dengan yang asli, karena biasanya yang aslisudah terjual menjadi koleksi orang, selain itu seniman dan pelukis Indonesia tak terbiasa mendokumentasikannya karyanya dan kolektornya. Pada kenyataannya kadang tidak setiap karya palsu seniman dapat dilacak. Soewarno sendiri tidak akan sanggup melacak karya palsu seniman yang tidak ia kenal betul dengan karya-karya dari seniman tersebut tanpa melihat mempelajari yang aslinya.

Seni lukis banyak dipalsu karena alasan ekonomi. Si pemalsu sebenarnya mempunyai kemampuan teknik yang sangat tinggi, sebab kalau tidak bagaimana dia bisa memalsu karya Widayat, Affandi, Soedjono dan Hendra. Pelukis-pelukis ternama itu mempunyai karakter

tertentu yang sudah ditemukan oleh pemalsunya setelah bertahun-tahun. Biasanya yang dipalsu adalah karya-karya seniman yang mempunyai pasaran yang baik tidak peduli tua ataupun muda. Pemalsu ini akan menjebak orang-orang yang mudah di tipu untuk mendapatkan "karya Widayat" atau karya seniman muda lain dengan harga yang murah.

Infrastruktur kita yang lemah membuat kita tidak mempunyai jaring-jaring yang kuat untuk melacak dan menjerat mereka. Ketika terjadi "Boom Seni Lukis", banyak orang yang banyak duit dengan berbagai alasan berlomba-lomba membelanjakan uangnya untuk kebutuhan sekunder. Kadang-kadang asal datang ke pameran dan karena merasa punya uang maka tanpa ba-bi-bu lagi ia membeli begitu saja lukisan yang dapat meninggikan status sosialnya yaitu lukisan yang mahal dan terkenal tanpa tahu apakah itu asli atau palsu karena mereka tidak berkonsultasi dulu dengan orang yang punya ilmu dalam bidang seni. Kelemahan itu dimanfaatkan oleh pasar-pasar karya seni palsu.

Pemalsuan memang merupakan tindakan kriminal. Tapi kerja mereka sangat rapi seperti mafia dalam jaringannya. Untuk diajukan ke Pengadilan akan menimbulkan kerumitan tersendiri. Seperti misalnya ia bisa saja mengatakan bahwa pemalsuan itu memang ada tapi siapa pemalsunya? Betul-betul sulit ditemukan. Biasanya hal ini hanya

berupa rumor sehingga kalau akan didekati secara hukum akan sulit. Bukti faktualnya ada yaitu lukisan palsu, tapi untuk menyeret orangnya sulit, karena dilakukan secara rapi dan terorganisir serta saling melindungi. Selama ini belum ada pengaduan dari kolektor yang membeli lukisan palsu sehingga pelacakan terhadap masalah ini menemui jalan buntu.

Titik kelemahan juga terdapat pada seniman itu sendiri yang tidak peduli dan bahkan tidak tahu bahwa karyanya dipalsu. Contohnya seperti Widayat yang terlalu bersifat longgar. Meskipun mengetahui bahwa karyanya dipalsu ia hanya mengatakan mereka memalsu karena kepepet perlu duit, mereka memalsu hanya karena perlu untuk makan, jadi biarkan saja tidak apa-apa. Sikap seniman seperti ini jelas kurang baik malah hal seperti ini justru mungkin membuka peluang bagi pemalsu-pemalsu lain. Tapi selain itu sebenarnya seniman sendiri memang bingung dan menemui jalan buntu untuk mengetahui siapa pemalsu lukisannya. Untuk melacak hal tersebut sulit, karena mereka akan saling lempar kesana kemari sehingga akhirnya nanti akan tak jelas ujungnya, lalu menguap begitu saja.

Contohnya ada pembeli yang membawa karya yang dicurigai, datang pada senimannya untuk mempertanyakannya. Si pelukis bilang bahwa itu palsu, setelah itu ya sudah tamatlah cerita tentang lukisan palsu itu di sana dan hal ini sering terjadi. Pak Pekik sendiri mengalami

hal seperti itu. Ia berkali-kali didatangi orang yang membeli lukisannya, ketika diteliti dan dinyatakan palsu maka kanvasnya dicoreti dengan kata "palsu". Tapi hanya stop sampai di situ saja.

Seniman tidak punya jalan untuk melacak lebih jauh, karena ia tidak punya jalur hukum kemana harus melanjutkannya. Hal ini disebabkan karena infrastruktur kita belum tersusun dengan baik sehingga jalur hukum belum terbuka, maka pendekatan hukum belum terjadi. Undang-undang HKI harus diterapkan untuk melacak pemalsuan, karena kenyataannya dapat memakan korban seniman siapa saja, yang penting pasarannya lagi ramai.

Bila ada pemahaman bahwa pemalsuan itu dibiarkan hitung-hitung amal, biasanya itu hanya untuk sekedar meredakan kekesalan karena tidak dapat berbuat banyak tadi. Karena umumnya seniman pasti merasa sangat terganggu dengan adanya pemalsuan karyanya. Tapi mereka bisa apa? Apalagi bila yang dituduh menyangkal dan menantang. Siapa bilang saya memalsu, hanya mirip saja kok dibilang memalsu.

Aspek hukum kesenian di Indonesia masih sangat lemah untuk melindungi seniman dari aspek penipuan. Belum pernah ada pemasyarakatan yang baik tentang Undang-undang Hak Cipta di masyarakat seni kita. Sehingga piranti apa yang dapat melindungi pikiran, ekspresi, perbuatan kreativitas kita sampai saat ini tidak ada

pendekatan pemasyarakatan Undang-undang baik di lingkungan seni rupa akademik maupun umum.

Pelukis yang meniru mirip-mirip karya seorang seniman lain, tidak bisa disebut pemalsuan tapi mungkin hanya sebuah proses. Lukisan yang disebut palsu ialah yang meniru karya seseorang sekaligus dengan tandatangannya tapi kalau mirip dan ditanda tangani sendiri mungkin itu proses keseniannya saja yang disebabkan karena ia sangat mengagumi karya idolanya itu. Tapi bila keterusan akhirnya dia menjadi epigon. Pengagum berat yang terus mengikuti gaya seniman yang dikaguminya dan tak menemukan jati dirinya sendiri.

Bagaimana cara kita memberantas pemalsuan karya yang jelas-jelas merupakan tindak kriminal? Hal ini harus dihentikan, jangan dibiarkan atau membiarkannya dengan alasan mereka butuh uang. Itu sangat tidak mendidik. Akan lebih baik jika mereka diberi pengertian untuk menjadi dirinya sendiri dan tidak menyakiti perasaan orang, yaitu seniman yang dipalsu karyanya dan pembeli yang sudah mengeluarkan uang jutaan tapi ternyata palsu dan uang tersebut hilang begitu saja.

Oleh karena itu pelacakan harus dimulai dengan adanya ahli-ahli dan berupa kolaborasi dengan ahli hukum, pengamat seni dan profesi-profesi lain yang terkait dengan seni. Kampanye moral tidak cukup. Hukum harus berbunyi. Sangsi moral harus ada, infra strukturnya diperbaiki sehingga dapat mengarahkan minat seni pada tempat yang

benar yaitu konsultasi galeri yang benar, pengamat yang dapat mengarahkan pada cara-cara yang benar. Peminat harus belajar memahami apa arti menikmati seni, jangan hanya karena ia punya uang.

Belum semua seniman faham terhadap hukum, karena selama ini tidak ada lembaga yang berusaha memasyarakatkan hukum tersebut dikalangan masyarakat seni, sehingga banyak seniman yang tidak menyadari hak-hak cipta yang dimilikinya. Mungkin perlu ada lembaga yang mengurus hak cipta ini untuk melindungi hak-hak seniman dan untuk menyebar luaskan tanggung jawab hukum pada semua lapisan masyarakat seni. Dengan demikian mudah-mudahan semua lapisan dapat membangun citranya dengan lebih baik.

Galeri yang memamerkan karya-karya seni harus lebih efektif dan tidak hanya karena gengsi dan investasi. Dan yang paling penting adalah seniman dapat mengetahui hak dan kewajibannya dalam kehidupan berkesenian. Semua harus belajar dengan baik dalam berkesenian.

Ketika kesenian menjadi komunitas seni komunal, seperti para seniman Jelekong, Banjar Sungging dan Kamasan maka perlindungan terhadap mereka adalah dengan cara mempublikasikan karya mereka melalui kajian yang lebih komprehensif dengan pendekatan sosiologis dan antropologis, sehingga masyarakat lain akan melihatnya dengan

pendekatan sosiokultural seperti itu. Kemudian kalau terjadi reproduksi karya mereka ada jalur hukum yang mengurusinya.

Kelemahan lain adalah, sampai saat ini kita tidak punya publikasi yang cukup mewakili tentang pola-pola kesenian seperti itu dan berbagai pendekatan baik sosiologis, antropologis maupun politis. Bidang teori untuk kajian seperti itu baru mulai. Dan nampaknya perhatian ke arah sana sedang timbul, meskipun perhatian dari pemerintah dan institusi sendiri belum memadai dan belum mendorong untuk timbulnya penelitian ke arah itu. Untuk hal itu pendidikan harus ambil bagian dalam membentuk pengertian seperti itu melalui penelitian atau dalam kuliah-kuliah.

Demikian pendapat Soewarno mengenai masalah tindak pemalsuan karya dan permasalahannya serta sumbang saran untuk mencari jalan keluarnya.

### **Wawancara dengan Isa Perkasa**

Wawancara dengan Isa Perkasa, seorang seniman dan kurator Galeri Taman Budaya, wawancara dilakukan di Jakarta Pusat pada tanggal 1 September 2001, Hasil wawancara tersebut berhasil menambah keterangan yang meyakinkan kita bahwa selama ini belum ada pemasyarakatan tentang Undang-undang Hak Cipta. Selain itu menurutnya aparat kurang peduli dengan masalah tersebut karena menganggap bahwa masalah itu hanyalah masalah sekunder.



Jangankan mengungkap masalah pemalsuan lukisan, perkara urusan negara yang lebih penting saja, masih banyak yang terbengkalai. Dari fihak seniman pun belum apa-apa sudah apriori terhadap penegakan hukum yang tidak pernah tegak, menurut mereka, ibarat menegakkan benang basah alias percuma saja. Uang pasti banyak keluar hanya untuk mengurus masalah itu tetapi hasilnya tetap saja buntu. Asosiasi konsultan tentang hak cipta dan seni tetap perlu diadakan, dengan membentuk kerja sama yang baik dari berbagai bidang yaitu hukum, kepolisian, seniman, galeri, artshop dan sebagainya.

### **Wawancara dengan Diyanto**

Diyanto seorang seniman dan dosen STISI, wawancara dilakukan di Jakarta Selatan, pada tanggal 10 September 2001, Ia menyetujui pendapat Isa tentang permasalahan seputar pemalsuan karya lukis. Ia menambahkan tentang galeri wacana, galeri komoditi atau artshop semuanya mempunyai nilai positif dan negatifnya apabila dibiarkan berjalan sendiri-sendiri.

Galeri wacana sangat positif untuk menegakkan nilai-nilai seni dengan menomorduakan komoditi atau artshop memberikan nilai positif dalam hal penyebaran apresiasi seni dan juga tetap memberikan masalah komersialnya. Jadi dalam hal ini mereka dalam posisi remis atau saling mengisi, apalagi kalau kedudukan kuratornya benar-benar tahu akan tugasnya.

Kurator tidak hanya sekedar menyelenggarakan pameran, tapi ia juga harus melihat dengan mata jeli momen apa yang tepat untuk menampilkan karya seni. Ia harus menyeleksi karya-karya tersebut, menjaga kualitas galerinya dan perkembangan dunia seni rupa baik di Indonesia maupun di dunia Internasional. Ia harus mampu mengatur pameran tersebut dengan sukses dan berhasil dalam nilai komersial sekaligus bernilai seni yang tinggi.

Mengenai Undang-undang Hak Cipta memang harus segera dimasyarakatkan ke dalam lingkungan masyarakat seni karena memang seniman tidak mengetahuinya secara rinci. Untuk hal ini galeri patut di dekati untuk menjadi mediator dalam memasyarakatkan tentang perlindungan hak cipta dalam Hak Kekayaan Intelektual.

#### **Wawancara dengan A.D. Pirous**

Wawancara dengan A.D. Pirous dilaksanakan tanggal 15 September 2001, di Jakarta Pusat. Menerangkan bahwa tentang arti seni, ternyata semua orang mempunyai definisi sendiri-sendiri. Tetapi menurutnya seni adalah sebuah karya visual, hasil imajinasi seseorang yang bisa beralasan dari pengalaman pribadi, mimpi, rekaman-rekaman kejadian di sekeliling, buah fikirannnya tentang sesuatu hal dan kemudian semua itu diwujudkan dalam bentuk visual yang berdasarkan unsur-unsur estetika dengan ekspresi yang khas dan mengandung catatan batin yang paling dalam.

Maka ketika orang melihat karya lukis, misalnya, selain yang terlihat oleh mata ada sesuatu yang tersembunyi dibalik itu, yaitu tema yang diolah dari pengalaman batin yang paling dalam dari seniman. Oleh karena itu bila beberapa orang seniman bersama-sama melukis sebuah obyek, maka hasilnya ternyata berbeda-beda, itu karena kedalaman seni dalam memahami obyek itu berkaitan dengan kekuatan-kekuatan yang ada dalam pribadinya. Itulah yang disebut ekspresi, yang menunjukkan bagai sebuah tema yang sama "ditelan" oleh seniman-seniman tersebut dan kemudian dimuntahkan kembali sesuai dengan kondisi, indeks pengetahuan dan persepsi yang dipunyainya, yang melahirkan refleksi jiwa sehingga tiap karyanya mempunyai karakter tersendiri. Semakin unik suatu karya maka semakin tinggi nilai estetikanya. Sebaliknya, makin banyak bentuk yang sama jelas terlihat dimana-mana, maka semakin lemah pula kehadirannya. Untuk memahami karya seni, orang harus belajar, baik melalui pengalaman, bacaan, pergaulan, menontonnya dan lain sebagainya.

Makin tinggi usaha orang untuk menyiasati dan mengerti seni tersebut, maka makin tinggi pula makna yang akan diperolehnya. Beda sekali dengan orang yang tidak mempersiapkan diri untuk itu, karena ia hanya ingin mendapatkan pemahaman yang sederhana. Seperti orang

membaca buku sampai faham hingga ia dapat menerangkannya, dibandingkan dengan orang yang hanya membaca judulnya saja.

Dalam hal ini, seorang seniman harus pula mengembangkan potensinya secara terus menerus, dengan produktif berkarya, berpameran dimana peningkatan kualitas dan kuantitas harus terkait. Sama saja dengan seorang pemain bola. Makin banyak ia bermain maka ia akan menguasai teknik bermain sehingga makin lama ia akan bermain semakin baik pula. Di samping itu, pendidikan memberi andil yang besar karena dengan demikian si seniman mempunyai jalan pintas karena dibimbing secara akademik untuk dapat lebih unggul dari yang otodidak. Semua berpulang pada senimannya itu sendiri yang nantinya akan mendapat penilaian dari masyarakat, baik berupa kritik, ataupun berita tentang pamerannya. Ia akan banyak ditulis karena kiprah dan dedikasinya.

Karena banyak orang yang membacanya dari media masa, maka nilai karyanya menjadi naik dan jadi rebutan. Seiring dengan itu karyanya jadi barang langka, sebab seniman tentu bukan mesin, sehingga karyanya terbatas. Dari sinilah akhirnya yang menyebabkan hukum ekonomi berlaku atas karyanya, yaitu makin langka maka makin tinggi harganya. Namun dari sini pula celah-celah sisi negatif mulai muncul dalam perjalanan seni rupa, yaitu munculnya nilai-nilai negatif pada manusia dalam menanggapi keadaan. Karena nilai karya seniman

yang berkualitas tersebut menjadi membumbung tinggi, maka ada beberapa orang seniman yang memakai jalan pintas dengan memalsu karya terkenal untuk mendapatkan sejumlah materi. Ia mengabaikan nilai moral yang tinggi yang terkandung dalam seni yaitu keaslian, kejujuran dan lebih memanusiakan manusia serta memperhalus cita rasa.

Untuk masalah pemalsuan, Pirous sering sekali menjadi korban pemalsuan atau tindakan yang tidak menyenangkan terhadap karyanya, dengan berbagai cara. Contoh ringan adalah kulit buku puisi karangan Emha Ainun Najib yang dihiasi dengan karyanya tanpa permisi. Sebenarnya Pirous tidak ambil pusing dengan pemakaian tanpa izin tapi yang mengganggu hatinya adalah perubahan yang dibuat oleh desainer bukunya yang menambahkan air mata, sehingga merusak image yang sebenarnya. Hal ini berarti merusak karyanya, disamping memakai karyanya tanpa izin dan termasuk pelanggaran Undang-undang Hak Cipta.

Terungkapnya pemalsuan terhadap karyanya bermula karena hilangnya beberapa lukisannya dari gudang penyimpanan. Pirous menghubungi Rudi Pranadjaja yang mengenal baik jaringan penjual lukisan dan galeri-galeri yang ada di Bandung. Karya-karya yang hilang tidak pernah ditemukan tetapi mata awas Rudi menangkap beberapa karya palsu yang disebut karya Pirous yang dijual di artshop di jalan

Braga. Ia datangi sendiri tempat itu dan ditemukan dua lukisan palsu yang berjudul "the Universe VII" (1983) dan "Nature 30 / The Northern Seaside" (1985) dan satu reproduksi kalender yang sudah diframe yang dijual sebagai karya grafis Pirous yang asli.

Dari artshop tersebut ia memergoki pula karya Popo Iskandar, karya Sadali, dan karya terakhir dari Sudjana Kerton yang dijual sebagai karya asli dan menurut si empunya toko diberi jaminan keaslian oleh Barli. Ia sangat heran mengapa bisa terjadi hal seperti itu. Jangan-jangan ini adalah taktik dan cara cuci tangan mereka untuk tidak bertanggung jawab akan pekerjaan kotor mereka.

Dalam peristiwa ini Pirous dapat menemukan sipelaku setelah mengancam pemilik toko untuk dilaporkan ke polisi. Akhirnya si penjual mengatakan namanya dan muncullah si pemalsu, seorang laki-laki umur tiga puluhan sambil mengembalikan beberapa lagi lukisan palsu dan mengatakan bahwa ia telah memalsu kurang lebih tiga puluh karya Pirous dan menjualnya ke toko tersebut \$45-50 per karya. Setelah pasti si pemalsu berjanji menghentikan aksinya, Pirous menghentikan perkaranya.

Pirous sekarang tahu akan adanya sindikat seniman di daerah Braga tersebut dan tahu pula bahwa teman-temannya seperti Popo, Srihadi, maupun Jeihan juga jadi korban penipuan tersebut. Jeihan menyebutnya sebagai "Kejahatan Budaya".

Anehnya ia memperoleh khabar bahwa ditengah masyarakat kita, ada pula orang yang memang lebih suka membeli barang palsu dengan tujuan hanya untuk menaikkan gengsinya. Alasan mereka karena tidak mempunyai dana cukup untuk membeli lukisan aslinya, maka membeli yang palsu pun tidak apa, asal mereka terlihat hebat. Padahal sebenarnya dengan cara begitu mereka hanya membeli ilusi, ilusi status, ilusi kesuksesan, dan semua yang menjanjikan mimpi.

Peristiwa pemalsuan yang terungkap ketika pada suatu hari datang seseorang membawa dua buah karya bertanda tangan A.D. Pirous. Kebetulan Pirous sedang tidak ada dan hanya ada istrinya. Salah satu lukisan berjudul "Rock by Night" (1985), di belakangnya tertulis terjemahan ayat Al Qur'an yang tertera pada lukisan tersebut dan dibawahnya ada tanda tangan Ebet Kadarusman dibubuhi pula kata-kata yang berbunyi "For Erie 19/7/93". Ebet Kadarusman adalah pemandu acara terkenal di TVRI. Setelah orang tersebut tahu bahwa karya tersebut palsu, ia pergi dengan membawa kembali barang tersebut dan tak pernah kembali.

Seminggu kemudian, dalam Koran Pikiran Rakyat ada iklan "For Sale Painting karya Pirous" beserta nomer teleponnya. Pirous mendatangi penjual karya tersebut dan rupanya ia mengenal Pirous. Akhirnya Pirous menginterogasi dia, dan ia mengatakan ia bukan pelukis karya-karya tersebut, ia hanya membantu menjualkan saja.

Perkara tidak terselesaikan saat itu, berhubung karya-karya palsu yang lain tidak berada ditempat tersebut. Beberapa hari kemudian ia datang dengan sejumlah lukisan palsu dan menjelaskan bahwa pelakunya adalah orang yang sangat dikenal dan dekat dengan Pirus sendiri. Sedangkan pembubuhan tanda tangan Ebet Kadarusman, hanya untuk menambah kehebatan karya tersebut, karena seolah telah dikoleksi orang terkenal.

Dari peristiwa itu semua kita melihat ada perubahan pandangan pada karya seni yang tidak lagi hanya dianggap sebagai wacana, tetapi juga dianggap sebagai suatu komoditi yang menjanjikan. Padahal pernah ada satu saat dimana lingkungan seni rupa ITB orang tabu membicarakan seni dihubungkan dengan komoditi, karena seni tidak dibuat dengan perhitungan untung rugi, dan dalam hal ini sungguh tidak nyaman untuk membicarakan masalah harga.

Hal itu terjadi sekitar tahun 1960-an, saat itu di lingkungan seniman dikenal sikap seni untuk seni. Semua seniman bersikap bahwa berkarya seni sangat dekat dengan kehidupan sosial. Semboyan seni untuk seni, sebenarnya digaungkan oleh Theophile Gautier, seorang seniman Perancis yang merasa risau dengan keadaan saat itu. Ia melihat karya seni sudah di tunggangi oleh tujuan-tujuan tertentu, baik politik maupun komersial materialistik. Ia mendorong seniman untuk kembali memurnikan tujuan berkarya tanpa



ditunggangi oleh tendensi apapun, dengan semboyan l'art por l'art atau seni hanyalah untuk seni.

Maka sekitar tahun enampuluan itulah di Indonesia terjadi kegandrungan yang ekstrim pada ide tersebut, sehingga penampilan seniman pun sangat bersahaja. Mereka lebih suka berada dilingkungan masyarakat yang merdeka dan tak terikat oleh apapun. Contoh yang benar-benar memegang teguh keyakinan tersebut adalah pelukis Nashar.

Namun lambat laun seiring dengan berubahnya kemajuan ekonomi, pendidikan dan pandangan, maka nilai pada sikap berkesenian pun berubah, sehingga seniman sekarang berbeda dengan seniman masa lalu, profesi seniman sekarang dihargai dengan layak.

Maka karena perubahan pandang pada nilai karya tersebut, tentu saja karya berkualitas tinggi menjadi rebutan sehingga menjadi barang langka dan berlakulah hukum ekonomi, harga menjadi tinggi. Sayangnya ditengah perbaikan nilai pandang terhadap seni tersebut, ada sekelompok orang yang tidak bermoral memanfaatkan peluang itu untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri dan merugikan orang lain. Yaitu memanipulasi karya bernilai jual tinggi dengan berbagai cara, diantaranya dengan memalsukannya atau dengan membuat yang mirip dengan gaya karya yang sedang menjadi incaran para orang

UPT-PUSTAK-UNDIP

berduit. Tragisnya ada orang yang mengorganisir dengan rapi, sehingga ada pemalsuan karya Rudolf Bonnet yang dipalsukan di Indonesia, menembus pasar lelang Eropa. Lukisan ini kemudian dijual dengan harga tinggi karena ada legitimasi dari biro lelang internasional itu.

Demikian parahnya keadaan tersebut, tetapi bagaimana pun kita harus mulai mencoba memperkecil gerak mereka kalau tidak dapat menghentikannya sama sekali. Yaitu dengan cara menata kembali infrastruktur yang lemah, diantaranya melalui lembaga-lembaga resmi pemerintah seperti Museum Nasional., Galeri Nasional. Semua difungsikan untuk melindungi nilai-nilai dan perlindungan hak cipta sekaligus, dalam hal ini semua dapat saling membantu. Pengetahuan tentang Hak Kekayaan Intelektual harus segera dimasyarakatkan dan Undang-Undang Hak Cipta harus difahami dan dilaksanakan oleh masyarakat seni kita.

Bagi Pirus sendiri, pada akhirnya tugas seniman adalah terus berkarya dan berkarya untuk mendidik masyarakat memahami dan menikmati nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Kalau ada pemalsuan yang biasanya tertangkap secara kebetulan, maka Pirus akan menyaerahkan pada tanggung jawab moralnya sendiri.

Bagi Pirus, yang lebih penting adalah mendidik masyarakat kearah pengertian seni yang baik dari pada ia repot mengurus perkara

ke polisi yang pada akhirnya rugi karena harus mengongkosi perkara dan juga menghabiskan waktu yang berharga. Sebagai seorang muslim, Pirous ingin memetik kedamaian yang terkandung dalam ajaran agamanya, memelihara ukhuwah dalam hidupnya, dan ingin memanfaatkan karyanya bagi masyarakatnya. Demikian pendapat Pirous.

#### **Wawancara dengan Dr. Ir. Hadjar Goenadi, APU**

Dilahirkan di Ponorogo, Jawa Timur, beliau adalah seorang peneliti yang sukses, terakhir menjabat Staf Ahli Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi Bidang Ekonomi dan Perdagangan, wawancara dilakukan di Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2001, beliau juga seorang pelukis dikarenakan bakat dari kecil, keahlian melukis dikembangkan semasa mengikuti pendidikan di SMA, yang dibimbing oleh seorang gurunya, lukisannya lebih bersifat natural, untuk menuangkan idenya pertama dibuat suatu gagasan yang memakan waktu cukup lama, dari ide atau gagasan tersebut dibuat sketsa, setelah terkumpul sketsa banyak baru dituangkan secara maraton, artinya bahwa beliau pernah menyelesaikan tiga belas lukisan dalam waktu sepuluh hari, empat dari hasil lukisannya yang dibuat secara maraton tersebut diberikan sebagai kenang-kenangan kepada Lemhanas, sedang dua diantaranya diberikan pada rekannya, sisanya dimasukkan ke koleksi beliau.

Menurutnya untuk melindungi lukisan hasil karyanya alangkah baiknya jika didaftarkan ke Kantor Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, namun sampai sekarang lukisannya belum pernah didaftarkan, ia juga khawatir lukisannya dipalsu oleh pelukis lain, terhadap pelaku tindak kejahatan dibidang Hak Cipta menurutnya harus ditindak tegas, agar jera untuk tidak melakukan kembali kejahatan yang dilakukannya, untuk melindungi hak cipta sebaiknya didokumentasikan secara baik dan jika perlu dipamerkan baik domestik maupun internasional.

### **Hasil Observasi**

Observasi langsung atau kunjungan dilakukan ke artshop dan pasar seni sekitar Taman Senopati, Mampang, Buncit Raya di Jakarta dan jalan Braga-Bandung, telah dilaksanakan awal Maret sampai awal April 2000.

Hasil penemuan dari artshop tersebut memunculkan indikasi kuat kearah pemalsuan. Dari pasar seni di sekitar Jakarta, ditemukan banyak sekali karya yang digelar dan dipajang didalam toko serta yang masih dalam gulungan tanpa tanda tangan penciptanya. Selain itu terlihat banyak sekali karya yang mirip dengan yang lain. Tema yang banyak diangkat adalah lukisan pemandangan ala Mooi Indie, bunga matahari, buah-buahan, penari bali, sekumpulan burung merpati dan tema-tema lain.

Ketika di wawancarai mengapa karya-karya tersebut tanpa tanda tangan? Dengan polos mereka mengatakan bahwa lukisan tersebut bisa ditanda tangani oleh siapa saja, tergantung pembeli, seniman terkenal mana yang ingin dicantumkan oleh pembeli, dan dapat dibubuhi dengan kata-kata khusus bila karya tersebut akan diberikan sebagai hadiah ulang tahun, perkawinan atau peristiwa penting lainnya. Maka dengan demikian hadiah tersebut akan lebih pribadi dan lebih berkesan.

Ketika ditanyakan apakah tidak merasa dicuri haknya oleh orang yang menandatangani karya tersebut. Mereka berkata bahwa itu tidak menjadi masalah yang penting lukisannya laku. Mereka tidak pernah mendengar, tidak tahu dan tidak peduli ketika diajak berbincang mengenai Undang-undang Hak Cipta. Kata mereka, bila terjadi kemiripan atau pemalsuan sekalipun, bagi mereka tidak masalah karena masing-masing orang sudah ditentukan rezekinya oleh Tuhan. Mereka mengatakan pula bahwa mereka adalah seniman jalanan, bukan seniman terkenal. Jadi janganlah terlalu mempersoalkan masalah itu, karena semua orang harus makan. Malah adapula seniman yang sudah terkenal menjual lukisan borongan seperti itu tanpa tanda tangan, karena pasarannya sedang sepi, padahal mereka tetap butuh biaya untuk hidup.

Jawaban seperti itu dikatakan pula oleh para seniman sepanjang jalan Braga yang berasal dari Sukajadi dan Jelegong. Menurut kelompok seniman di jalan Braga ini mereka bukan pelukis tapi tukang lukis. Kalau pelukis adalah seniman yang menciptakan sendiri, dari fikiran sendiri tanpa meniru dari orang lain dan kadang menciptakan suatu gaya baru yang lain dari yang lain. Kalau tukang lukis hanya meniru dari yang sudah ada, misalnya dari gambar-gambar kalender, katalog, buku-buku dan sebagainya. Ketika diajak bicara mengenai hak cipta, mereka tidak mengetahuinya dan sepertinya merupakan hal yang aneh di lingkungan mereka.

Observasi ke galeri-galeri wacana seperti TIM, Galeri Hidayat, Sangkuriang, Padi, Soemarja, Selasar Soenaryo, dan R. 66 di Bandung, tidak mendapatkan masalah. Mereka benar-benar menunjukkan perhatian terhadap perkembangan pendidikan seni bagi masyarakat dalam memberikan pengertian, pemahaman nilai-nilai seni rupa dengan mengadakan pameran secara rutin serta diskusi tentang karya seni yang dipamerkannya.

Namun ketika berkunjung ke artshop di jalan Braga, maka langsung terasa keganjilan dan kuatnya indikasi pemalsuan ketika melihat karya-karya Van Dyck bertebaran di ruangan tersebut dengan berbagai versi dan gaya, mulai dari gaya naturalis sampai dengan gaya Affandi. Ketika ditanya karya Van Dyck yang mana, penjualnya

menjawab bukan pelukis Belanda zaman dulu melainkan hasil karya keturunannya yang juga sudah meninggal. Jawaban terdengar sekenanya dan mencurigakan.

Temuan yang merupakan kejanggalan yang mencurigakan, ketika berkunjung ke sebuah bursa karya yang diselenggarakan di Gedung Pusat Kebudayaan di jalan Naripan Bandung. Dalam ruangan tersebut bertebaran karya seniman terkenal seperti karya Popo, Srihadi, Barli, Basuki Abdullah dan lain-lain dengan penataan yang amburadul dan harga penawaran dibawah Rp. 500.000 ketika ditanyakan tentang jaminan keaslian karya-karya tersebut, seorang ibu yang lugu, penjaga lelang karya tersebut mengatakan tidak tahu. Ia hanya mengatakan bahwa penyelenggara bursa lukisan ini adalah kolektor dari Jakarta yang sedang bersih-bersih gudang karena koleksinya sudah terlalu banyak. Saking banyaknya koleksi tersebut, lukisan bertumpuk bertumpang tindih diruangan tersebut.

Penawaran yang sangat rendah dibanding dengan nilai seni dan sejarah karya tersebut, penulis agak meragukan keaslian karya-karya tersebut, sungguh ironis hal seperti itu dapat terjadi, karena di gelar di gedung Pusat Kebudayaan. Hal ini menguatkan dugaan betapa lemahnya infra struktur masyarakat seni rupa kita, sehingga hal tersebut tidak mendapat saringan yang jelas sehingga luput dari kecurigaan yang seharusnya ada.

Dari data statistik yang ada di Pusat Statistik Jakarta terlihat bahwa jumlah pelukis yang tersebar diwilayah Jakarta tercatat sebanyak 189 orang, dan terdapat 107 galeri yang tersebar dilima wilayah yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara dan Jakarta Selatan, dan dari jumlah tersebut yang paling banyak pelukisnya adalah di Jakarta Pusat. Jumlah data tersebut penulis mencoba untuk melakukan penelitian melalui wawancara, memberikan quisioner dan mengumpulkan berbagai data kepada 11 pelukis, dan para kurator dibidang lukisan serta terhadap galeri lukisan. Dengan demikian dalam penelitian ini sudah memenuhi syarat penelitian terhadap perlindungan hukum dibidang Hak Cipta pelukis terhadap pelukis didaerah Jakarta.

Hasil penyebaran kuesioner yang disebarkan sebanyak 100 lembar ke Pelukis jalanan di Pasar baru, Pelukis dan galeri yang ada di pasar Ancol, Pelukis di Mampang Prapatan, dan seniman serta galeri yang ada di Taman Mini Indonesia Indah, juga kepada yang hoby melukis. Kuesioner yang kembali sebanyak 60 lembar. Dengan karakteristik responden sebagai berikut: 5 orang dosen seni rupa, 40 orang pelukis dan 15 orang kepada instansi pemerintah dan swasta.

Riset yang dilakukan dibagi dalam 10 kategori, yaitu:

1. Ada tidaknya pemalsuan dan pelanggaran dalam bidang seni rupa
2. Bidang seni rupa apa yang paling banyak dipalsu?



3. Bagaimana upaya melindungi karya cipta lukis, dan bagaimana pelukisnya mendapat peningkatan nilai ekonomi ?
4. Dari mana sumber berita didapat ?
5. Apakah pemalsuan termasuk pelanggaran hukum?
6. Tindakan apa yang akan diambil bila terjadi pemalsuan?
7. Mengapa mereka memalsu?
8. Bagaimana pelaksanaan Undang-undang Hak Cipta di Indonesia?
9. Apakah Undang-undang Hak Cipta sudah dapat dilaksanakan secara baik ?
10. Apakah perlu ada lembaga konsultasi dibidang Hak Cipta.

Dari data yang dikumpulkan dengan penyebaran kuesioner tersebut, maka didapat hasil sebagai berikut:

1. Tahu akan adanya pemalsuan dibidang seni rupa :
  - Tahu 85 %.
  - Tidak tahu 15 %.
2. Prosentasi bidang karya cipta yang dipalsu:
  - Seni lukis : 76%
  - Seni Keramik : 14%
  - Seni patung : 12%
  - Seni Grafis : 11%
3. Upaya melindungi bagi pelukis :

- Didaftarkan ke Ditjen HKI : 20 %
- Dilegalisasi oleh Asosiasi ; 30 %
- Tidak tahu : 40 %
- Lain-lain : 10 %

4. Dari mana sumberberita didapat ?

- Tahu sendiri : 35 %
- Dari media masa : 40 %
- Dari senimannya : 15 %
- Dari sumber lain : 20 %

5. Apakah pemalsuan termasuk pelanggaran hukum?

- Ya : 85%
- Tidak : 15%

6. Tindakan apa yang akan diambil bila terjadi pemalsuan ?

- Melacak dan lapor ke polisi : 35 %
- Biarkan saja karena sulit dan terselubung : 30 %
- Biarkan karena kasihan, amal : 10 %
- Biarkan karena tidak tahu jalur hukum : 25 %

7. Alasan memalsu ?

- Karena tidak tahu hukum : 30 %
- Iseng saja : 15 %
- Menguntungkan secara ekonomi : 65 %

8. Bagaimana pelaksanaan Undang-undang Hak Cipta di Indonesia ?

- Tahu : 60%
- Tidak tahu : 40%

9. Apakah Undang-undang Hak Cipta sudah berjalan baik di Indonesia?

- Ya : 20 %
- Tidak : 80 %

10. Perlukah adanya lembaga konsultasi hak cipta ?

- Ya : 80%
- Tidak : 20%

Dari hasil penelitian studi kepustakaan, wawancara, observasi dan penyebaran kuesioner maka rangkuman keseluruhan bahwa dengan terjadinya perubahan sejarah mulai dari zaman prasejarah sampai kini, telah terjadi perubahan paradigma berpikir terhadap seni yang menyebabkan berubahnya makna dan fungsi seni bagi masyarakat lingkungannya. Perubahan tersebut sangat terasa setelah terjadi revolusi industri dan mengakibatkan gaung materi lebih kuat dari apapun dan hal tersebut terjadinya pula pada dunia seni rupa.

Di Indonesia, perubahan kerangka berpikir terhadap nilai seni sampai dengan zaman seni rupa Islam lebih cenderung pada makna dan fungsi untuk keagamaan atau kepercayaan dan sosial sehingga kedudukan seniman belum terpisahkan dalam pranata kehidupan sosial.

Ia menyatu dan tidak dianggap sebagai suatu pekerjaan yang istimewa dibanding dengan tukang-tukang yang lain termasuk pedagang atau petani dan pekerjaan tersebut menjadi pekerjaan utamanya, sedangkan melukis hanya pekerjaan sampingan atau hobi. Semua dikerjakan dengan ketulusan berpikir karena kehendak yang Kuasa, dan tidak pernah mencantumkan nama pada karyanya.

Perubahan pandang terhadap seni, mulai terasa ketika Belanda menjajah Indonesia, yang terkenal akan jiwa dagangnya sehingga membentuk negara-negara koloni yang potensial di Asia, termasuk Indonesia. Persentuhan budaya Eropa tersebut memberi dampak munculnya sudut pandang baru, bahan baru, dan gaya baru pada perkembangan seni lukis khususnya. Raden Salehlah yang pertama merintis kearah itu, disambung dengan kelompok Mooi Indie, persagi, sanggar-sanggar, dan sekolah sekolah formal dibidang Seni yang melahirkan tokoh-tokoh seniman ketermuka di negeri ini.

Sejak tahun 1965, seni rupa Indonesia mendapatkan kebebasannya yang dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh seniman-seniman Indonesia. Maka seiring dengan perekonomian yang makin baik pada era 1980-an dan 1990-an terjadi suatu masa yang sangat menarik bagi dunia seni rupa dengan tingginya minat masyarakat terhadap seni lukis. Sehingga terkenal dengan peristiwa Boom Seni Lukis.

Namun seiring dengan naiknya pasaran lukisan karena naiknya minat masyarakat ini, masalah pemalsuan pun makin mencuat. Walaupun sebenarnya masalah ini adalah masalah latent, tapi pada saat-saat ini terasa makin marak dan telah terjadi masalah serius yang bisa mengganggu ketertiban nasional atau rusaknya nama bangsa. Seperti ditekankan oleh Pirous, bahwa karena peminat banyak sedang yang diminati terbatas karena bukan buatan pabrik, maka berlakulah hukum ekonomi, harga menjadi tinggi.

Akibat positifnya tentu terasa secara nyata oleh seniman yang banyak digandrungi masyarakat, tetapi akibat negatifnya tentu pula tak dapat dihindarkan karena persoalan nilai pandang terhadap seni kini, bukan hanya sebagai obyek pemenuhan hasrat rohani atau wacana, tetapi juga untuk menaikkan status diri bahkan investasi.

Jadilah karya seni menjadi komoditi yang sangat menggiurkan bagi masyarakat yang melingkupi seni seperti seniman itu sendiri, galeri, kolektor, dan kurator yang kurang bermoral dan tidak bertanggung jawab atas nilai seni yang hakiki, sehingga perlindungan hukumnya perlu menjadi penting dan diperlukan, pada saat terjadinya kejahatan lukisan dengan mengalihwujudkan, memperbanyak, menggandakan, mengumumkan tanpa seijin pihak yang mencipta lukisan.

#### **4. Menentukan Parameter Dalam Hal Terjadinya Kejahatan Oleh Pelukis.**

Hasil penelitian dalam menentukan tolak ukur kejahatan dibidang Hak Cipta khususnya Seni rupa menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hak Cipta meliputi :

1. Ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang Ilmu Pengetahuan, Seni dan Sastra diataranya adalah Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni Patung, Kolase, seni terapan yang berupa seni kerajinan tangan (Pasal 11 ayat 1 huruf h Undang-undang nomor 12 tahun 1997 tentang Hak Cipta).
2. Mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi ijin untuk itu, tanpa ijin pemilik Hak Cipta.
3. Menyiarkan memamerkan mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta.
4. Mengalihwujudkan suatu ciptaan.
5. Mengumumkan, memperlihatkan dan mempertunjukkan suatu lukisan.
6. Menandatangani suatu ciptaan (seni rupa) bukan karya ciptanya.

Tolak ukur menurut pelukis dan komunitasnya penandatanganan dalam obyek lukisan, pemberian sertifikat dan tanggapan kurator.

## B. Pembahasan :

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada institusi pemerintah, swasta, pelukis, komunitas, kurator dan galeri, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut :

### 1. Aturan Hukum Hak Cipta Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pelukis :

Dari hasil penelitian pengaturan perlindungan bagi pemilik Hak Cipta seni lukis diatur melalui aturan hukum yang berasal dari persetujuan perjanjian Internasional diantaranya perjanjian aspek dagang di bidang Hak kekayaan Intelektual (*Trade related Aspec of Intellectual Property Right/TRIPs*) dan Konvensi Berne serta aturan hukum dari produk hukum pemerintah Indonesia yaitu Undang-undang nomor 12 tahun 1997 tentang Hak Cipta, Undang-undang nomor 7 tahun 1994 tentang ratifikasi dari persetujuan perdagangan dunia (*World Trade Organiztion/WTO*), peraturan pemerintah, Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri kehakiman dibidang Hak Cipta.

Perlindungan yang diberikan oleh aturan hukum ini, disatu sisi sangat menguntungkan seperti terlihat dalam analisa terhadap penegak hukum dimana dalam Undang-undang Hak Cipta mengatur tentang sanksi penjatuhan denda yang lebih memberatkan kepada pelanggar Hak Cipta, ada penetapan sementara yang didalam hukum Indonesia

tidak dikenal karena hukum kita lebih menonjolkan adanya pembuktian, dan jawab-jawab dari para pihak baru kemudian diputuskan, sedang penetapan sementara tidak perlu pembuktian dan jawab-jawab. Hal ini merupakan pengaruh dan atau berasal dari aturan hukum *TRIPs*, yang menginstruksikan bahwa negara anggota wajib memberikan perlindungan yang sama terhadap karya intelektual warga negara lain seperti yang diberikan terhadap warga negaranya sendiri dan negara bebas menentukan metode yang paling sesuai dalam menjabarkan ketentuan yang terdapat persetujuan internasional, kedalam sistem dan praktek hukumnya dimasing-masing negara, maka pada dasarnya setiap negara anggota peserta *TRIPs* diberi kewenangan untuk mengatur sistem hukum Hak Kekayaan Intelektual sesuai dengan hukum suatu negara sepanjang tidak bertentangan dengan *TRIPs*.

Kenyataan yang terjadi bahwa aturan hukum dari mancanegara ini oleh negara lebih diatur secara spesifikasi yang tidak sesuai dengan sistem hukum yang ada, sebagai contoh misalnya upaya hukum perlindungan HKI berbeda dengan sistem hukum yang di KUH Perdata begitu pula dalam penetapan sementara. Juga jangka waktu perlindungan HKI di bidang Hak Cipta dalam *TRIPs* mensyaratkan jangka waktu perlindungannya tidak kurang dari 50 tahun setelah



pemilik Hak Cipta meninggal dunia, hal ini jika ditinjau dari rasa keadilan dan kebenaran sudah menunjukkan adil dan benar dan bahkan terlalu lama, karena fungsi sosial terhadap kemanfaat karya cipta kecil, karena perlindungan hak Cipta terhadap program Wostar misalnya mungkin 5 sampai 10 tahun saja sudah tertinggal dan bahkan teknologinya sudah tidak dipakai oleh pihak lain, lebih-lebih dalam rancangan Undang-undang HKI mengatur perlindungannya 70 tahun setelah meninggal dunia sipencipta, hal ini tentunya sangat berlebihan. Selain itu hukum HKI sendiri juga mengatur secara spesifikasi artinya sudah diatur dalam aturan hukum lain, namun dalam HKI masih juga mengaturnya secara khusus, sehingga menimbulkan prediksi bermacam macam, beberapa aturan tersebut antara lain :

- a. Terhadap perkara Hak kekayaan Intelektual penyelesaiannya di Pengadilan Niaga, yang sebenarnya bahwa perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan negeri karena perkara HKI hanya menyangkut perkara perdata dan pidana yang cukup diselesaikan melalui Pengadilan negeri.
- b. Terhadap permohonan hak cipta yang dimintakan ke Kantor Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektual. Apabila permohonan ditolak maka pemohon dapat mengajukan gugatan ke

pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini sangat janggal karena keputusan penolakan oleh Direktur Jenderal Hki merupakan Putusan Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga harusnya gugatannya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena keputusan penolakan terhadap permohonan tersebut adalah Keputusan pejabat Tata Usaha Negara.

- c. Dalam Undang-undang Hak Cipta tidak secara tegas mengatur pendaftaran, artinya terdapat bahwa pendaftaran menggunakan sistem negatif deklaratif, artinya bahwa pendaftaran suatu ciptaan seni rupa itu didaftar maupun tidak didaftar mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan pendaftaran berfungsi semata-mata untuk memudahkan pembuktian, karena Pendaftaran suatu ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti atau bentuk ciptaan yang didaftarkan. Sedang dalam Undang-undang Hak Cipta dijelaskan bahwa yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan dan pengumuman resmi tentang pendaftaran ciptaan pada Departemen Kehakiman, hal ini merupakan kewajiban pendaftaran, sehingga masih nampak beberapa aturan yang satu dengan lainnya berlawanan.

Dari berbagai penemuan adanya penyelesaian hukum yang berbeda persepsi, baik dalam kewenangan dari pengadilan yang menangani juga kewenangan wilayah hukum yang menangani serta berbagai kontradiksi yang timbul antar undang-undang yang satu dengan lainnya maupun dalam satu wadah undang-undang itu sendiri, masih terdapat aturan dalam satu Undang-undang terdapat dua atau lebih pengertian yang berbeda makna, untuk menafsirkan mana yang kiranya dapat dilaksanakan secara benar dan adil secara umum. Maka dengan adanya beberapa aturan hukum yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa di bidang HKI, khususnya Undang-undang tentang KUH Perdata, Persaingan Tidak Sehat dan Antimonopoli dan Undang-undang Hak Cipta, serta aturan yang berbeda beda maknanya, maka untuk pertimbangan hukum bagi unsur aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara tersebut dengan menggunakan azas hukum umum yaitu :

*Lex Specialis Derogat Legi Generalis* artinya Undang-undang yang bersifat khusus dapat mengesampingkan Undang-undang yang bersifat umum, sehingga Undang-undang Hak Cipta yang mengatur dan menentukan secara khusus dan berbeda dengan sistem hukum yang sudah ada dan berlaku di Indonesia sebelumnya, hukum yang sifatnya umum seperti KUH Perdata dapat dikesampingkan, dengan

demikian berpijak pada Undang-undang Hak Cipta terhadap penyelesaian sengketa yang timbul dibidang seni rupa dan upaya perlindungan terhadap pelukis

Lex Posteriori Derogat Lex Priori, artinya bahwa Undang-undang yang baru atau yang adanya lebih akhir dapat mengesampingkan Undang-undang yang lama. Sehingga Undang-undang Hak Cipta akan dapat mengenyampingkan KUH Perdata yang adanya dan atau timbulnya lebih dulu. Namun asas hukum ini mendapat pengecualian terhadap asas "Apabila terdapat dua undang-undang yang mengatur hal sama dimana antara yang satu dengan lainnya saling berlawanan, maka yang akan diterapkan kepada terdakwa adalah undang-undang yang meringankan atau menguntungkan terdakwa, tergugat atau pihak yang dirugikan, walaupun undang-undang tersebut lahir terlebih dahulu".

Etikad Baik artinya setiap perbuatan, tindakan, dan hubungan hukum didasarkan pada niat baik dari masing-masing pihak yang berkepentingan, sehingga berkaitan dengan pendaftaran Hak Cipta yang dalam realisasinya berlawanan antara pasal yang satu dengan lainnya dalam satu wadah Undang-undang Hak Cipta, maka dalam pendaftaran tersebut jika dilandasi dengan etikad buruk, maka pendaftarannya dapat dimintakan pembatalan, atau dengan kata lain

pihak yang bukan beretikat baik dalam posisi yang lemah dan bukan sebagai pemilik atau yang berhak atas karya cipta lukisan.

Jika dalam azas hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* dan *Lex Posteriori Derogat Lex Priori*, ternyata bahwa hukum yang baru maupun hukum yang tinggi derajatnya tidak dapat mewadahi dan menyelesaikan suatu permasalahan yang timbul, maka yang digunakan adalah azas hukum kepatutan, artinya mengenyampingkan hirarki hukum dan lebih mengutamakan keadilan dan kebenaran yang berlaku dalam masyarakat pelukis, sehingga dengan pemahaman pelukis untuk mengalihwujudkan lukisan, dan pemberian tanda tangan dalam lukisan serta pemberian sertifikat oleh komunitas pelukis, dan tanggapan kurator terhadap suatu lukisan yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan pendaftaran Hak Cipta ke Ditjen HKI.

Aut put dari tesis ini ada dua, yang pertama memberikan kontribusi terhadap aturan hukum yang saat ini baru diadakan pembahasan antara pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu perlu dibakukannya keberadaan komunitas pelukis dalam mengeluarkan sertifikat dan tanggapan kurator untuk dibakukan dalam hukum positif, sedang aut put yang kedua adalah bahwa komunitas pelukis, dan kurator untuk mendirikan suatu badan asosiasi yang bekerjasama kepada Universitas yang lebih menguasai terhadap

manajemen dan pengadministrasian yang kepengurusannya dipadukan dengan para pelukis tradisional yang tahu persis akan teknis melukis, keberadaan asosiasi pelukis yang bekerjasama dengan Universitas ini diharapkan dapat mempublikasikan lukisan lukisan yang baru dan menghantarkan ke Pasar untuk peningkatan ekonomi.

Azas Hukum Peradilan dilaksanakan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan, asas hukum ini merupakan prosedur dari hukum acara, dalam acara penyelesaian perkara Hak kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta, bahwa penyelesaian perkara dibidang hak cipta sangat simpel karena ada penetapan sementara, upaya hukum Pengadilan Tinggi ditiadakan, dan lama waktu dalam menyelesaikan perkara dibatasi maksimal 150 hari, hal ini sangat luar biasa dan menganut azas yang cepat, namun jika dilihat murahanya ternyata dilihat dari biaya perkara untuk pendaftaran perkara pada pengadilan Niaga yang menjadi sentral penyelesaian Hak kekayaan Intelektual, jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan Pengadilan Negeri.

Undang-undang yang diberlakukan harus meringankan atau menguntungkan terdakwa, apabila ada dua Undang-undang yang berlaku dan yang mengatur berlawanan, maka yang dikenakan bagi terdakwa adalah yang meringankan atau menguntungkan terdakwa

terutama ancaman pidananya, dan penjatuhan sanksi denda. dan asas ini merupakan pengecualian dari asas Undang-undang tidak berlaku surut, sehingga Undang-undang Hak Cipta terhadap perselisihan masalah saksi ahli dalam persidangan, sistem pendaftaran Hak Cipta, yang harus diuntungkan adalah pihak yang dirugikan.

Hakim tidak dapat menolak perkara yang diajukan kepadanya, dengan alasan hukum tidak mengatur<sup>111</sup>, asas hukum ini dimaksudkan apabila suatu perkara yang diajukan ke pengadilan tidak atau belum diketahui peraturan yang mengatur perkara tersebut, maka hakim diharuskan untuk melakukan *rechtfinding* yaitu pencarian hukum, maka terhadap perkara hak cipta terhadap penyelesaian perkara yang sangat singkat, jika peraturan pemerintah belum mengatur, tidak berarti hakim Pengadilan Niaga menolak perkara dengan alasan Peraturan Pemerintahnya belum ada. Pada saat ini banyak perkara-perkara Hak Cipta maupun kajian Hak kekayaan intelektual lainnya yang ditolak oleh Pengadilan Niaga karena Peraturan pemerintah sebagai operasional dari Undang-undang nomor 12 tahun 1997 tentang hak cipta belum ada. Hakim untuk itu wajib menggali hukum yang hidup dimasyarakat utamanya budaya hukum pelukis.

---

<sup>111</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman

Keistimewaan Hak Kekayaan Intelektual salah satunya Hak Cipta adalah bahwa dalam Undang-undang Larangan Praktek monopoli dan persaingan Tidak Sehat dalam Bab IX Ketentuan Lain Pasal 50 menyebutkan bahwa Yang dikecualikan dari ketentuan Undang-undang ini adalah salah satunya perjanjian yang berkaitan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual, seperti Lisensi, Paten, Merek dagang, Hak Cipta, Desain Produk Industri, Rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang serta perjanjian dengan waralaba<sup>112</sup>.

Monopoli dan persaingan tidak sehat yang dilarang oleh Undang-undang, dalam perkara HKI dibenarkan dan diperbolehkan untuk monopoli, jika dikaji secara cermat bahwa perlindungan HKI, khususnya Hak Cipta dibidang Lukisan, artinya perlindungan terhadap pelukis di Indonesia masih sangat terbatas dan minimum, dan mayoritas perlindungan HKI dilakukan oleh pihak asing, sehingga perlindungan yang sebenarnya diperuntukkan HKI dari manca negara, sedangkan para pencipta, pelukis dan pemilik HKI Indonesia khususnya para industri kecil menengah dan usaha kecil menengah kurang mendapat tempat untuk mendapat perlindungan Hak Cipta, bidang lukisan karena banyaknya dan maraknya kejahatan yang dilakukan untuk komersial tidak dapat diantisipasi.

---

<sup>112</sup> Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, Bab IX, Pasal. 50.



## **2. Perlindungan Hukum oleh Unsur Aparat Penegak Hukum :**

Dari data yang tercatat pada Direktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman terlihat bahwa jumlah kejahatan dibidang hak cipta baik yang menyangkut terhadap perkara perdata maupun perkara pidana dari tahun ketahun mengalami fluktuasi, namun selalu tindak kejahatan tersebut cenderung meningkat. Peranan penyidik Pegawai Negeri Sipil dibidang Hak Cipta dan penyidik Kepolisian dalam penanganan hak cipta sesuai data yang tercatat dari penelitian adalah bahwa kejahatan dibidang Hak Cipta dalam perkara pidana dari tahun 1988 sampai dengan tahun 2001, sebanyak 22 perkara, dari jumlah tersebut penyidikan yang dilakukan oleh pihak POLRI ada 17, sedang Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang Hak Cipta ada 5, sedang tindak pidana dibidang lukisan ada 9 perkara. 6 perkara penyidikan dilakukan oleh pihak POLRI, dan 3 perkara dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dari data tersebut ternyata penegakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik POLRI lebih banyak jika dibandingkan dengan pihak Penyidik Pegawai Negeri Sipil dibidang Hak Cipta, pada hal jika menyangkut penyidikan yang sifatnya teknis artinya penyidikan yang menyangkut tentang kejahatan yang sudah mengacu pada parameter kejahatan lukisan, yang berhak atas suatu ciptaan, maka penyidik

pegawai negeri sipil lebih memahami dan menguasai terhadap perkara tersebut.

Kewenangan Penyidik pegawai negeri sipil dibidang hak cipta dalam melakukan penyidikan diatur dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04.PW.07.03 tahun 1988 tentang Penyidik Hak Cipta, menjelaskan bahwa Penyidik Hak Cipta adalah Pegawai negeri Sipil dilingkungan Departemen Kehakiman yang mempunyai wewenang melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Hak Cipta, diangkat oleh menteri Kehakiman Republik Indonesia.

Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dibidang Hak Cipta dilakukan oleh Menteri Kehakiman setelah mendengar dan pertimbangan Jaksa Agung Republik Indonesia dan kepolisian negara Republik Indonesia.

Penyidik Hak Cipta Mempunyai wewenang :

- a. melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Hak Cipta.
- b. Melakukan penelitian terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dibidang Hak Cipta.
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau Badan sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dibidang Hak Cipta.

- d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Hak Cipta.
- e. Melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dan perkara tindak pidana dibidang hak cipta,
- f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Hak Cipta.

Penyidik Hak Cipta tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan. Tanpa mengurangi ketentuan dalam hal tindak pidana dibidang hak cipta tertangkap tangan, Penyidik Hak Cipta berwenang menangkap tersangka tanpa surat perintah dan segera menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada Penyidik Kepolisian, penangkapan dapat dilakukan untuk paling lama satu hari.

Penyidik hak cipta yang melakukan penangkapan segera melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat untuk mendapat surat perintah tugas penyidikan.

Penyidikan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik Hak Cipta dengan surat perintah tugas penyidikan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.

Berdasarkan surat perintah Penyidik Hak Cipta berwenang melaksanakan tugasnya didalam daerah hukum Kantor Wilayah yang bersangkutan.

Penyidikan oleh penyidik Hak Cipta dilingkungan Direktorat Paten dan Hak Cipta hanya dapat dilakukan dengan surat perintah tugas penyidikan dari Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan.

Penyidik hak cipta berwenang :

- a. melaksanakan tugasnya diseluruh wilayah Indonesia.
- b. Melaksanakan tugasnya dalam hal terjadi beberapa tindak pidana dibidang hak cipta yang saling berkaitan dan yang dilakukan didalam daerah hukum dan/atau lebih Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.

Pelaksanaan tugas dilakukan secara bekerjasama dengan Penyidik Hak Cipta pada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat.

Penyidik Hak Cipta wajib :

- a. memberitahukan tentang dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum dan Penyidik Kepolisian.

- b. Memberitahukan tentang perkembangan penyidikan yang dilakukan kepada Penyidik Kepolisian.
- c. Meminta petunjuk dan bantuan penyidikan sesuai dengan kebutuhan kepada Penyidikan Kepolisian.
- d. Memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penyidik Kepolisian apabila penyidikan akan dihentikan karena alasan tertentu yang dibenarkan oleh hukum,

Penyitaan terhadap barang bukti hanya dapat dilakukan oleh Penyidik Hak Cipta dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri. Penyidik Hak Cipta mengajukan surat permohonan izin untuk melakukan penyitaan barang bukti kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat terjadinya tindak pidana hak cipta atau ditempat yang banyak diketemukan barang bukti.

Permohonan izin penyitaan harus diketahui oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan tembusannya dikirimkan kepada Penyidik Kepolisian setempat.

Apabila dalam keadaan mendesak Penyidik Hak Cipta harus bertindak dan tidak mungkin untuk mendapat surat izin terlebih dahulu. Penyidik Hak Cipta dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Barang sitaan disimpan di rumah penyimpanan benda sitaan negara setempat, dan apabila rumah sedemikian tidak ada, benda sitaan disimpan di Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat.

Penyidik Hak Cipta Menyerahkan berkas hasil penyidikan kepada Penuntut Umum dan Penyidik Kepolisian, yang memuat :

- a. sampul berkas perkara
- b. daftar isi perkara
- c. surat perintah tugas penyidikan
- d. resum pemeriksaan
- e. surat pemberitahuan dimulainya penyidikan
- f. berita acara pemeriksaan tersangka
- g. berita acara pemeriksaan saksi
- h. berita acara penyitaan barang bukti
- i. surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri
- j. daftar tersangka, saksi dan barang bukti
- k. surat-surat lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana yang bersangkutan

Apabila berita acara yang telah diserahkan dianggap belum lengkap oleh Penuntut Umum, Penyidik Hak Cipta melengkapi berita acara tersebut dan mengirimkannya kepada Penuntut Umum dan Penyidik Kepolisian.

Setelah berita acara pemeriksaan dikirimkan, Penyidik Hak Cipta dapat menayakan kepada Penuntut Umum tentang pelimpahan berkas perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri.

Penyidik Hak Cipta melaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman bahwa penyidikan telah selesai dilaksanakan dan telah dilimpahkan kepada Penuntut Umum.

Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Selanjutnya melaporkannya kepada Menteri Kehakiman.

Penyidik Hak Cipta dilingkungan Direktorat Paten dan Hak Cipta melaporkan kepada Direktur Jenderal Hukum dan Perundang undangan bahwa penyidikan telah selesai dilaksanakan dan telah dilimpahkan kepada Penuntut Umum.

Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan selanjutnya melaporkannya kepada Menteri Kehakiman. Penyidik Hak Cipta bertanggung jawab sepenuhnya atas penyidikan yang telah dilakukannya.

Pengadministrasian penyidikan tindak pidana dibidang hak cipta dilakukan dengan menggunakan model-model formulir sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

Direktorat Hak Cipta Direktorat Jenderal HKI mempunyai kewajiban mengikuti perkembangan pelaksanaan tugas penyidikan

dan melakukan pembinaan para Penyidik Hak Cipta. Pelaksanaan tugas pembinaan dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan instansi lain yang berkaitan dengan tugas penyidikan.

Dari data tersebut terlihat peran dan peranan penyidik hak cipta sangat terbatas kewenangannya, diantaranya kewenangan untuk melakukan penangkapan dan penahanan tidak dapat independen artinya kewenangan yang dipunyai langsung oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dibidang Hak Cipta, juga dalam keterlibatan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM sangat menghambat kinerja dari PPNS Hak Cipta sendiri, yaitu dalam hak melakukan penyitaan harus seijin Ketua Pengadilan Negeri setempat dan kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman, hal ini akan terhambat jika letak Kantor Wilayah terletak jauh dari yempat kejadian perkara, hal ini biasa terjadi diluar pulau Jawa.

Dalam melaksanakan tugas sebagai penyidik pegawai Negeri Sipil, menurut hasil observasi bahwa semua PPNS dibidang Hak Cipta yang diangkat oleh menteri kehakiman, dalam posisi merangkap tugas yang bermacam macam seperti kepala Tata Usaha, Staf, dan pemeriksa Hak Cipta, sehingga tugas penyidikan nyaris menjadi tugas sampingan, hal ini sangat mempengaruhi hasil kinerja penyidikan yang kurang berkualitas. Sedang dalam Undang-undang nomor : 12 tahun



1997 tentang Hak Cipta dijelaskan bahwa pelanggaran dibidang Hak Cipta merupakan kejahatan, konsekuensinya baik dilapor maupun tidak, jika terjadi pelanggaran penyidik harus aktif melakukan penindakan dan penyelesaian secara hukum, disisi lain baik perangkat maupun kewenangan yang ada sangat terbatas.

Penyidikan dibidang Hak Cipta menurut data penelitian lebih banyak dilakukan oleh penyidik Polri, sedang yang mengetahui secara teknis adanya pelanggaran dibidang Hak Cipta adalah PPNS dibidang Hak Cipta, maka penyelesaian perkara dibidang Hak Cipta nampak tidak sesuai dengan sasaran, karena lebih banyak difokuskan terhadap pelanggar kejahatannya yang ditindak adalah pelaku ekonomi bawah, sedang para pelaku yang memperbanyak, menggandakan dan atau mempublikasikan dengan maksud komersial tidak tertangani dengan baik, misalnya masalah pembajakan VCD, yang banyak dilakukan penangkapan dan penindakan adalah para pedagang kecil yang hanya sekedar mempertahankan hidup dalam mencari penghasilan, sedang pihak yang menggandakan dan memperbanyak secara optimal diperusahaan-perusahaan jarang sekali ditemui penindakan, padahal yang dianggap sebagai pelaku kejahatan dibidang hak cipta lukisan apabila melakukan pengumuman,

perbanyak, penggandaan dan pengalihwujudan lukisan dengan tujuan komersial.

Dalam proses penyelesaian perkara perdata dan pidana yang dilakukan oleh Hakim, jika ditinjau dari segi waktu dalam proses perkara pidana adalah mempunyai standaryang sama, karena menyangkut terhadap penahanan kepada para tersangka, terdakwa yang diatur dalam pasal 24 sampai 29 KUHAP. Sedang dalam kasus penyelesaian perdata menurut Undang-undang nomor 12 tahun 1997 tentang Hak Cipta, berbeda dengan yang diatur dalam KUH Perdata, utamanya yang diatur dalam rancangan Undang-undang Hak Cipta yang saat ini yang sedang dibahas antara pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Perjanjian internasional yang diatur dalam TRIPs, dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa HKI adalah merupakan hak-hak perdata, yang konsekwensinya diselesaikan melalui perdata, namun dalam penerapan hukum di Indonesia diterapkan sanksi perdata dan pidana, dan kalau dilihat dari perubahan aturan pada Undang-undang Hak Cipta sudah menunjukkan bahwa sanksi perdata lebih dikedepankan, terlihat dalam penjatuhan sanksi dalam rancangan Undang-undang Hak Cipta untuk denda jauh lebih besar dengan denda sebelumnya yang pada mulanya menurut Undang-

undang nomor 12 tahun 1997 denda terhadap pelanggaran Hak Cipta sebesar Rp 100.000.000,= (seratus juta rupiah), selanjutnya dalam rancangan yang baru Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), hal ini jika dibandingkan dengan Undang-undang nomo 14 tahun 2001 Merek dan Undang – undang nomor 15 tahun 2001 tentang Paten, maka penjatuhan sanksi lebih ditekankan pada aspek perdata dan pelanggaran yang dilakukan merupakan delik aduan, yang pada mulanya merupakan delik kejahatan.

Dalam proses penyelesaian sengketa perdata peranan penegak hukum khususnya hakim, berbeda dengan proses yang diatur dalam KUH Perdata, pertama masalah kewenangan Pengadilan dalam menyelesaikan perkara, perkara perdata dibidang HKI diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta, sehingga dengan menunjuk tempat di Jakarta, ini sudah pengaturan khusus dan ini sebenarnya melanggar azas hukum yang menyatakan bahwa penyelesaian perkara cepat, dan murah. Hal ini tidak dapat terlaksana jika para pihak yang bersengketa ada jauh dari Jakarta, Sedang yang diatur dalam rancangan Undang-undang Hak Cipta bahwa penyelesaian sengketa perdata melalui Pengadilan Niaga, langkah ini jika dilihat dari penyelesaian perkara dengan cepat, dan murah sudah mendekati rasa

keadilan karena saat ini sudah ada 5 pengadilan Niaga yang tersebar di Indonesia, yang nantinya akan ada di setiap daerah tingkat dua.

Dalam tenggang waktu penyelesaian sengketa sangat berbeda dengan KUH Perdata, karena dalam Undang-undang Hak Cipta terdapat Putusan sementara, yaitu pemilik karya cipta yang merasa hak kepemilikannya dikomersialkan oleh pihak lain baik dengan memperbanyak, menggandakan, mengcopy maupun mempublikasi, maka pemilik karya cipta dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Niaga untuk menghentikan segala aktifitas pelaku pelanggaran Hak Cipta, dan dalam waktu 30 hari sejak permohonan diajukan Pengadilan Niaga harus sudah memutus perkara tersebut. Hal ini merupakan sistem hukum baru di Indonesia, karena dalam sistem hukum sebelumnya tidak ada Putusan Sementara, yang ada adalah putusan sela, dan itu mempunyai arti yang berbeda.

Dalam KUH Perdata tidak ada pembatasan waktu penyelesaian sengketa perdata, sedang dalam Undang-undang Hak Cipta dari proses penyelesaian di pengadilan tingkat pertama sampai Mahkamah Agung sudah dibatasi diantaranya yaitu penyelesaian sengketa Hak Cipta pada Pengadilan Niaga (pengadilan tingkat pertama) paling lama 60 (enam puluh) hari sudah diputus, disini tidak ada upaya banding dan upaya hukum langsung ke mahkamah Agung yang harus sudah

diputus oleh Mahkamah Agung paling lama 90 (sembilan puluh) hari, sedang batas kelonggaran maksimal diberikan waktu 30 hari baik di pengadilan Tingkat pertama, maupun Mahkamah Agung.

Penyelesaian sengketa yang diberikan oleh Undang-undang Hak Cipta untuk perkara di Pengadilan Niaga adalah 30 hari untuk proses penghentian kegiatan perbanyakan, penggandaan dan publikasi yang sifatnya komersial dengan melalui Putusan Sementara, dan 60 hari untuk proses penyelesaian perkara ditambah 30 hari jika dalam penyelesaian di tingkat Pengadilan pertama tidak selesai, secara perhitungan matematik penyelesaian perkara ditingkat Pengadilan Pertama untuk perkara HKI adalah 90 hari.

Penyelesaian di Mahkamah Agung diberikan tenggang waktu selama 90 hari, dan jika dalam waktu tersebut tidak selesai maka diberikan tenggang waktu maksimal selama 30 hari, sehingga waktu penyelesaian perkara di Mahkamah Agung paling lama 120 hari. Sehingga untuk penyelesaian perkara perdata dibidang HKI memakan waktu paling lama antara 150 hari sampai 210 hari.

Jika diperhatikan secara seksama, maka penyelesaian perkara dibidang HKI ini membentuk aturan hukum tersendiri yang tidak sesuai dengan sistem hukum Indonesia yang biasa digunakan, dan ini lebih diwarnai dengan hukum yang berasal dari mancanegara, untuk

reformasi dibidang hukum tentunya kita bangga sepanjang lebih mengacu pada keadilan dan kebenaran. Namun dalam pelaksanaannya ternyata banyak mengalami hambatan yang sangat signifikan didalam proses peradilan. Sebagai contoh misalnya dalam proses upaya kasasi, dalam Undang-undang Hak Cipta diatur bahwa pemohon kasasi diajukan paling lama 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan, dengan mendaftarkan kepada panitera yang telah memutus gugatan tersebut, dan pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada Panitera Pengadilan pada tanggal permohonan kasasi didaftarkan.

Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi kepada pihak termohon kasasi paling lambat 2 (dua) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan, dan termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada Panitera Pengadilan Paling lambat 7 hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi, dan Panitera menyampaikan kepada termohon paling lama 2 hari, dan Panitera wajib menyampaikan berkas memori kasasi kepada Mahkamah Agung paling lama 14 hari. Jika dianalisa secara riil dalam pelaksanaannya akan sangat sulit untuk dilaksanakan, karena untuk mendapatkan kutipan putusan dari Pengadilan ini tidak mungkin habis sidang kutipan putusan langsung didapat, bahkan dalam realitanya

sampai sehari-hari bahkan sampai bulan. Kutipan putusan ini sangat penting sebagai dasar pertimbangan untuk membuat memori kasasi, karena didalamnya akan menceritakan pertimbangan hukum hakim yang dituangkan dalam putusan untuk dijadikan dasar sanggahan, juga dalam perkara Hak Cipta ini sangat pelik yang menyangkut original, kepemilikan, dan yang berhak atas suatu ciptaan, karena banyak kajian Hak Cipta yang lebih tertuju pada kasuistik artinya obyek kajian hak cipta yang satu akan berbeda dengan penentuan parameter pelanggarannya dengan obyek kajian hak cipta lainnya.

Waktu yang digunakan pemberitahuan juga tidak diatur secara spesifik sehingga sulit diartikan karena mempunyai beberapa makna diantaranya, apakah waktu sejak dikirimkan pemberitahuan tersebut, apa sejak diterimanya pemberitahuan tersebut oleh penerima, atau juga sejak ditetapkan oleh institusi.

Pengurangan waktu untuk proses birokrasi dalam penyelesaian perkara di Mahkamah Agung ini mengakibatkan semakin sempitnya waktu yang diberikan kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara, adanya mis komunikasi dan kejanggalan dalam proses penyelesaian perkara serta hal-hal yang sifatnya teknis dalam penyelesaian perkara dalam proses peradilan diakibatkan tidak adanya koordinasi antara Departemen Teknis yang merancang

Undang-undang HKI khususnya Hak Cipta, dengan unsur teknis lapangan yaitu para hakim<sup>113</sup>. Unsur teknis kecuali menyangkut tentang obyek sengketa juga tentang persepsi bahasa hukum yang diatur dalam Undang-undang, sehingga mengakibatkan kurang tepat dalam penerapan hukum, disamping itu juga belum semua hakim mengerti secara rinci maksud Undang-undang Hak Cipta lebih lebih yang sifatnya teknis, untuk perlu adanya sosialisasi dan peningkatan SDM bagi para penegak hukum khususnya hakim yang menangani perkara-perkara HKI yaitu hakim Pengadilan Niaga<sup>114</sup>.

Dengan adanya beberapa aturan hukum yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa dibidang HKI, khususnya Undang-undang tentang KUH Perdata, Persaingan Tidak Sehat dan Antimonopoli dan Undang-undang Hak Cipta, maka untuk pertimbangan hukum bagi unsur aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara tersebut dengan mengkaitkan dengan azas hukum.

Pembahasan permasalahan yang pertama dan kedua lebih terkait pada aturan hukum, unsur aparat penegak hukum dan budaya pelukis, hal tersebut merupakan bentuk yang mempengaruhi perlindungan hukum dibidang Hak Cipta.

---

<sup>113</sup> Marni Emi, SH. Proses Penyelesaian Sengketa HKI, disampaikan pada Seminar Nasional HKI 2001, di Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi, 8 Nopember 2001.

<sup>114</sup> ibid hal. 7



Perlindungan hukum erat hubungannya dengan penegakan hukum, dan ada tiga hal yang terkait yaitu Unsur aparat penegak hukum, aturan hukum dan budaya hukum, hal ini juga sesuai dengan pendapat Lawrence M. Friedman dijelaskan bahwa Sistem hukum terdiri dari tiga unsur<sup>115</sup>, yaitu substansi, struktur dan budaya hukum, dari ketiga unsur tersebut, maka budaya hukum yang paling menentukan dalam suatu system hukum akan berjalan atau tidak, dan budaya hukum mencakup tentang bagaimana persepsi masyarakat terhadap hukum, juga tentang peranannya dalam hukum, juga peranan masyarakat dalam menjaga ketrtiban, dan hukum merupakan hak dari individu yang harus ditegakkan.

Selanjutnya Friedman berpendapat bahwa tegaknya peraturan-peraturan hukum tergantung pada budaya masyarakatnya, dan budaya hukum masyarakat tergantung pada budaya hukum anggota-anggotanya, yang dipengaruhi oleh tradisi, agama, latar belakang pendidikan, lingkungan budaya, posisi atau kedudukan, dan kepentingan ekonomi. Budaya hukum disini adalah keseluruhan dari sikap-sikap warga masyarakat yang bersifat umum dan nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana hukum itu berlaku dalam masyarakat, dan hukum yang benar-benar diterima dan

---

<sup>115</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law* (New York – London : WW. Norton Company, 1984), hal. 218-230.

dipergunakan oleh masyarakat ataupun suatu komunitas tertentu sangat ditentukan oleh budaya hukum masyarakat komunitasnya. Perlindungan hukum yang dipengaruhi oleh tiga faktor tersebut, maka untuk mengukur menentukan ada tidaknya pelanggaran dibidang Hak Cipta terhadap pelukis khususnya diperlukan parameter atau standar baku yang dijadikan pedoman untuk mengetahui adanya pelanggaran dan kejahatan dibidang hak cipta yaitu dengan melalui aturan hukum tertulis, sehingga jelas tolak ukur yang dijadikan pedoman untuk mengukur adanya pelanggaran.

Sehingga ketiga faktor tersebut merupakan landasan dalam analisa dan merupakan perpaduan antara penelitian normatif dan empiris, yaitu penelitian yang diambil dari aturan hukum tertulis dan aparat pejabat publik untuk dipadukan dengan budaya pelukis dalam menghadapi berlakunya aturan hukum tersebut, hasil akhirnya adalah memberikan masukan untuk keselarasan pemberlakuan aturan hukum yang dapat diterapkan secara efektif dan efisien serta dapat terwujud rasa keadilan dan kebenaran yang dapat dirasakan secara nyata.

Sedang Perlindungan Hukum HKI agar dapat memenuhi kriteria perlindungan yang edial, minimal ada 5 (lima) ketentuan baku yaitu :

- a. Memiliki Perangkat Unsur Penegak Hukum yag memadai.
- b. Terdapat pengadministrasian HKI yang dilakukan oleh pemerintah.

- c. Ada lembaga asosiasi HKI termasuk didalamnya Konsultan HKI.
- d. Terdapat perangkat peraturan hukum HKI yang memadai.
- e. Masyarakat sadar dan patuh terhadap aturan hukum yang ada.<sup>116110</sup>

Dari kelima hal tersebut jika dipahami secara teliti pada dasarnya juga terdapat tiga substansi yaitu yang menyangkut tentang aturan hukum yang terdiri pengadministrasian HKI yang dilakukan oleh pemerintah, dan terdapat perangkat peraturan hukum HKI yang memadai, sedang Unsur Aparat Penegak hukum meliputi memiliki Perangkat Unsur Penegak Hukum yang memadai, sedang untuk Budaya hukumnya meliputi masyarakat yang sadar dan patuh terhadap aturan hukum dan ada lembaga asosiasi termasuk didalamnya konsultan HKI.

Kajian dari ketiga hal diatas yaitu dari aturan hukum, unsur aparat penegak hukum dan dari budaya hukum yang berlaku dimasyarakat, maka jika dihubungkan antara satu dengan lainnya akan menghasilkan bahwa jika aturan hukumnya baik dan unsur aparat penegak hukumnya baik, kalau budaya perilaku masyarakatnya menyimpang akan sangat berat terwujud perlindungan hukum yang

---

<sup>116</sup> JB. Lumenta, Perlindungan Hukum HKI di Indonesia, disampaikan pada Acara Seminar Nasional dengan tema Kebijakan Pemerintah dibidang HKI di Indonesia, di Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi, 8 Nopember 2001.

menyimpang akan sangat berat terwujud perlindungan hukum yang baik, namun sebaliknya jika unsur aparat penegak hukumnya kurang, begitu juga aturan hukumnya kurang baik, akan tetapi jika budaya perilaku masyarakatnya berperilaku positif maka perlindungan hukum dan penegakan hukum akan terwujud.

Perlindungan hukum yang dilakukan oleh unsur aparat penegakan hukum, menurut aturan Hak Cipta bahwa pelanggaran Hak Cipta termasuk kejahatan, dan bukan delik aduan. Konsekwensinya aparat penegak hukum harus aktif melakukan tindakan dan penegakan hukum bagi pelaku tindak kejahatan. Namun realitanya bahwa sesuai data statistik yang ada di Kantor Hak Cipta bahwa hampir mayoritas kejahatan Hak Cipta karena adanya aduan. Hal ini karena sesuai dengan kondisi dan situasi terhadap budaya pelukis di daerah Jakarta yang terbiasa dengan pola pemikiran penyelesaian secara musyawarah, dimana melihat hukum baru setelah terjadi konflik atau gangguan keseimbangan. Hal ini berbeda dengan konsep Hukum Hak Cipta yang mengantisipasi kejahatan dengan aturan hukum, konsep aturan Hak Cipta lebih mengedepankan penindakan baik berupa sanksi pidana maupun perdata, dan monopoli, sedang komunitas pelukis lebih tertuju pada penyelesaian secara musyawarah oleh asosiasinya.

### **3. Pemahaman Pelukis didaerah Jakarta kurang memberikan tempat bagi berlakunya Undang-undang Hak Cipta.**

Dari hasil kuesioner terlihat bahwa pemalsuan terbanyak terjadi pada seni lukis, diikuti pada bidang seni keramik, seni patung, dan seni grafis. Sedangkan sumber berita didapat, paling banyak didapat dari media masa, diikuti berita dari senimannya sendiri, sumber lain termasuk dari mulut ke mulut dan mengetahui sendiri karena menemukan sendiri, dari sini terbukti media masa sudah banyak membantu mengungkapkannya.

Apakah pemalsuan karya seni melanggar hak cipta? Hampir semua menyatakan setuju. Sedangkan apa tindakan kita terhadap pemalsuan karya itu ? Melacak dan melaporkannya pada polisi menduduki peringkat terbanyak, kedua dibiarkan saja karena tidak tahu jalur hukum, ketiga dibiarkan saja karena percuma dan yang biarkan saja karena kasihan atau hitung-hitung amal, menduduki peringkat terakhir. Dari ini dapat dilihat bahwa kesadaran hukum dimasyarakat seni lumayan tinggi tapi disini terlihat pula kurangnya pemasyarakatan undang-undang dan hukum hak cipta, sedangkan membiarkannya sebagai amal, ternyata menduduki peringkat paling rendah, berarti budaya tradisi di perkotaan sudah mulai berkurang.

Alasan pemalsuan menurut pendapat responden, hampir seluruhnya setuju hanya karena alasan ekonomi, Jadi sebenarnya si pemalsu tahu adanya hukum, tahu akan adanya undang-undang Hak Cipta, namun

mereka tidak peduli karena dengan uang mereka dapat mengatur segalanya, termasuk aparat terkait demi meraih untung yang besar. Namun laporan terakhir dari hasil pelacakan media masa, didapat alasan lain , yaitu karena memang ada permintaan dari pembeli dan hal ini tentu menjadi fenomena tersendiri dalam masyarakat seni kita.

Mengenai sudah berjalan tidaknya undang-undang tersebut, hampir seluruh responden menyatakan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal tersebut dikarenakan berbagai faktor, diantaranya karena masyarakat seni tak faham dan tak peduli terhadap hukum sehingga hukum tidak dapat ditegakkan. Faktor lain adalah lemahnya infrastuktur ( sarana dan prasarana ) masyarakat seni dalam berbagai hal, sehingga mengakibatkan semua menjadi lumpuh dan mengarah kepada kepasrahan yang tak tahu kapan dapat diakhiri.

Selanjutnya dari pertanyaan dalam kuesioner tersebut, responden merasa perlu adanya lembaga konsultasi hak cipta khusus bidang seni rupa. Hal ini dimaksudkan untuk memasyarakatkan Undang-Undang Hak Cipta agar dapat dipahami oleh masyarakat seni dengan harapan hukum bisa merangkak menegakkan dirinya sendiri walaupun lambat, paling tidak usaha sudah dapat dimulai.

Alasan lain untuk dilakukan perubahan aturan Hak Cipta antara lain telah timbul suara masyarakat yang mensinyalir adanya perbedaan nasib yang kurang memuaskan antara pencipta dengan orang-orang yang

mempergunakan ciptaan itu, belum adanya suatu badan atau organisasi yang memperjuangkan hak pencipta serta Peraturan yang berlaku tentang Hak cipta belum dikenal masyarakat.<sup>117</sup>

Identifikasi Kasus-kasus Pelanggaran Terhadap Karya Seni Murni dari hasil wawancara dengan para seniman dapat teridentifikasi kasus-kasus pemalsuan tersebut sebagai berikut :

Bentuk Pemalsuan :

- a) Memalsu persis atau mirip karya seorang seniman sekaligus dengan tanda tangannya.
- b) Memalsu gaya, tema, atau idiom-idiom yang biasa dipakai oleh seniman yang karyanya dipalsu dan mencantumkan tandatangan seniman tersebut.
- c) Pemalsu terdiri dari dua orang yaitu pemalsu lukisan dan pemalsu tanda tangan.
- d) Menghapus tanda tangan pelukis asli dan lukisan ditandatanganinya sendiri.
- e) Meniru gaya seniman terkenal semirip mungkin, tapi tanda tangannya adalah tanda tangannya sendiri.
- f) Membuat lukisan-lukisan tanpa tanda tangan, dengan tujuan lukisan tersebut ditanda tangani siapapun termasuk pembeli karya tersebut.

---

<sup>117</sup> Sophar Maru Hutagalung, Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya Dalam Pembangunan Akademika, Presindo, Jakarta, 1996, hal. 102.

Kasus pertama paling sering dilakukan dan paling umum dalam bidang pemalsuan lukisan, dengan terang-terangan berniat tidak baik, mengeruk keuntungan sebesar-besarnya.

Kasus kedua dan ketiga biasanya saling bekerja sama, biasanya dilakukan karena gaya, tema, corak lukisan tersebut sedang laku. Indikasi ke arah pemalsuan adalah karena tanda tangannya meniru seniman yang karyanya dipalsu atau ditiru gayanya. Niatnya sama tidak baiknya dengan kasus pertama.

Kasus keempat agak aneh, karena kelihatannya si pemalsu ini punya dua maksud selain materi juga namanya ingin ikut naik daun, niat si pelaku dalam hal ini lebih busuk lagi.

Kasus selanjutnya, meniru gaya seniman terkenal semirip mungkin namun tetap ditandatanganinya sendiri, umumnya dilakukan oleh yang sangat kagum pada seniman tersebut. Untuk kasus ini menurut pendapat para seniman, selama si pelaku tersebut melakukannya dalam proses mencari jati diri, bukanlah pelanggaran, paling hanya sebatas seorang epigon, atau pengikut setia. Namun bila ditumpangi niat tidak baik alias numpang nama atau memanfaatkan ketenaran orang lain demi uang, yang disebut juga *passing off*. Untuk masalah ini, pada umumnya seniman berpendapat, bahwa hal tersebut dapat dikatakan ada indikasi kuat kearah merugikan pihak lain dan bisa dianggap melanggar etika



berkesenian, atau lebih jauhnya dapat dikatakan melanggar hukum, bila kecurigaan dapat dibuktikan.

Kasus terakhir, yaitu membuat karya tanpa tanda tangan sipencipta, terlihat ada indikasi kuat ke arah penipuan atau mendompleng nama seniman terkenal yang dijiplak tanda tangannya. Namun hal seperti itu terjadi umumnya dilingkungan seniman tradisional dan memang sangat kental dengan kebiasaan yang berlaku dilingkungan mereka. Hal ini disimpulkan dari pendapat para pelaku sendiri, yang mengandung dugaan kuat, bahwa kasus ini sangat diwarnai oleh budaya tradisi yang tidak mengenal pencantuman nama pencipta dalam karyanya. Bagi mereka berkesenian sama halnya dengan kegiatan pekerjaan lain dan peniruan karya adalah hal yang biasa atau lumrah, malah bila bermanfaat bagi kehidupan banyak orang itu adalah suatu amal baik. Mereka tidak khawatir tentang kerugian materi karena karyanya ditiru orang lain, mereka beranggapan rezeki sudah diatur Tuhan.

Dari semua kasus yang muncul, hampir semua kasus pemalsuan tersebut terungkap secara tidak sengaja, karena cara mereka menjual barang palsu tersebut dari mulut ke mulut atau *door to door* dan sangat terselubung. Tentu saja yang terungkap hanya sebagian kecil saja, ibarat gunung es, karena menurut laporan dari media masa dan para seniman yang pernah menjadi korban menyimpulkan bahwa pemalsuan karya seni di Indonesia sudah mengkhawatirkan. Menurut catatan terakhir,

pemalsuan lukisan sudah dalam taraf sangat parah karena mereka sudah berani terang-terangan dengan alasan karena memenuhi kebutuhan konsumen yang memang sengaja mencari lukisan palsu,. Jumlah karya palsu bukan satu dua saja, tapi sudah ribuan dan pemasarannya bahkan dapat menembus pusat lelang internasional. Sehingga disinyalir memang mereka mempunyai sindikat yang mengatur pemesanan dan penjualan yang teroganisir dengan rapi.

Namun pemalsuan lukisan tetap sulit terungkap, tingkat kesulitan mengungkap masalah ini adalah karena lukisan tidak seperti buku yang dibuat dalam jumlah banyak, lukisan hanya satu saja dibuatnya, walaupun terungkap adanya suatu pemalsuan, hanya karena suatu kebetulan. Untuk membandingkannya sulit karena kemungkinan yang asli sudah dikoleksi orang. Jadi hanya mengandalkan kejelian, kemahiran, dan kepakaran seorang ahli yang benar-benar mengetahui segalanya mengenai karya seniman yang dipalsu. Selain itu karena seniman yang dipalsu masih sezaman, jadi dari bahan saja sulit dilakukan pengetesan, karena bahan yang sama banyak tersedia dipasaran.

Namun hal lain yang sangat menyulitkan tertangkapnya pelaku pemalsuan adalah karena infrastruktur masyarakat seni yang lemah, sehingga tidak dapat mendeteksi dan menangkap atau mengadukan sebuah kasuspun ke pengadilan, karena umumnya si pelaku bermodal besar sehingga semua bisa beres dengan sejumlah uang.

Pemalsuan yang menimpa karya-karya lama atau karya seniman-seniman yang sudah lama meninggal, sulit untuk dilacak, karena ketiadaan alat untuk mendeteksi. Alat-alat seperti mikroskop, inframerah, dan sebagainya belum ada di Indonesia baik di lembaga resmi maupun swasta.

Masalah penting yang juga perlu perhatian untuk dipecahkan bersama, adalah sikap berkesenian tradisi yang berbeda dalam menyikapi masalah peniruan atau pemalsuan, karena mereka menganggapnya sebagai hal yang lumrah. Sehingga dengan demikian untuk memberikan pengertian tentang undang-undang yang perlindungan hukum yang terkandung dalam Hak Kekayaan Intelektual tentang hak cipta akan sulit berhasil, bila tidak dapat berubah sikap berpikir mereka dalam berkesenian. Cara berpikir seperti mereka tidak hanya ada dalam lingkungan masyarakat tradisi saja, tetapi terdapat juga dalam pikiran seniman akademis meskipun dengan alasan berbeda, yaitu bahwa seni adalah ekspresi yang keberhasilannya dapat dilihat dari besarnya pengaruh pada seniman lain atau generasi penerusnya. Pikiran-pikiran seperti ini tidak salah tapi perlu diluruskan agar dapat sejalan dengan Undang-undang Hak Cipta yang berlaku, yaitu dengan cara benar-benar memahami peraturan yang terkandung dalam Undang-undang Hak Cipta secara rinci. Hal tersebut dapat dipelajari sendiri dari buku-buku hukum

tentang HKI, menghadiri berbagai seminar tentang HKI, mengikuti pelatihan dan lain sebagainya.

Untuk mempercepat pemasyarakatan masalah HKI ini, masyarakat seni menyarankan berdirinya sebuah lembaga konsultan yang dapat menyelenggarakan berbagai seminar, pelatihan intensif bagi mereka. Lembaga tersebut sekaligus dapat pula menolong mereka untuk mengurus pendaftaran hak cipta atau mengurus kasus bila terjadi pelanggaran terhadap karya mereka, sehingga mereka akan tetap tidak kehilangan waktu untuk berkarya hanya karena mengurus kasus mereka yang tidak mereka ketahui jalur hukum dan pengurusannya. Oleh karena itu lembaga ini harus mempunyai sumber daya manusia yang komplit dari berbagai profesi yang terkait dengan masalah HKI.

Demikian identifikasi pelanggaran terhadap karya seni murni, dalam hal ini seni lukis sebagai studi kasus, yang menghasilkan gambaran umum dari masyarakat seni dan dapat dikatakan sebagai parameter pelanggaran terhadap hak cipta menurut anggapan mereka.

Selanjutnya tanggapan terhadap Undang-undang Hak Cipta bahwa mayoritas dari pelukis belum memahami, sehingga budaya mereka dalam melakukan perlindungan terhadap lukisannya lebih dilakukan secara tradisional, hal ini terlihat diantaranya :

- a. Filosofi dari Hak kekayaan intelektual adalah individual, dan monopolis, hal ini sangat berbeda dengan konsep bangsa Indonesia yang lebih bersifat komunal, dan utamanya kepada para pelukis, hampir tidak ada yang mendaftarkan hasil lukisannya ke kantor Hak Cipta Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektua, dan realitanya para pelukis lebih terbuka dalam mengungkapkan cara menuangkan lukisan, mengarsir dan mencampur bahan pewarna serta mengungkapkan yang terkait dalam melukis lebih terbuka, sedang dalam Undang-undang Hak Cipta hal ini akan merupakan tragedi karena itu merupakan kerahasiaan dan aset yang harus dilindungi. Pertimbangan para pelukis diantaranya bahwa melukis kecuali merupakan bakat dan keahlian dari seseorang, juga dalam penuangan ide menjadi bentuk yang berwujud lukisan itu antra pelukis yang satu dengan yang lain akan berbeda, lebih lebih mereka yang tidak mempunyai bakat dan keahlian dibidang lukis akan sulit untuk menirunya, sehingga para pelukis lebih terbuka dalam memberikan indormasi tentang lukisan.
- b. Dalam Undang-undang hak cipta dijelaskan bahwa perbanyakan adalah penambahan jumlah suatu ciptaan baik secara keseluruhan ataupun bagian yang sangat penting dengan menggunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk mengaluhwujudkan secara permanen atau temporer, persepsi mengalihwujudkan suatu

lukisan, ternyata setelah diadakan penelitian kepada para pelukis, dari wawancara yang dilakukan secara garis besar para pelukis berpendapat bahwa mengalihwujudkan lukisan bukan pelanggaran, adapun alasan para pelukis tersebut diantaranya :

- Goresan dan arsir serta penuangan coretan ide kedalam bentuk lukisan antara pelukis yang satu dengan lainnya akan berbeda, karena antara pelukis yang satu dengan lainnya tidak sama dan mempunyai ciri tersendiri.
- Hasil lukisan antara pelukis yang satu dengan lainnya sudah tentu akan berbeda walaupun obyek lukisannya sama, sebagai contoh para pelukis melukis candi Borobudur tentunya ada yang melukis terlihat dari atas ada yang dari samping atau dibuat secara utuh, sehingga akan mempunyai hasil yang berbeda.
- Dalam Undang-undang Hak Cipta dijelaskan bahwa yang dilindungi adalah ekspresi yang telah berwujud dan bukan merupakan ide, maka ide yang sudah berwujud jika dialih wujudkan merupakan pelanggaran, namun pelukis berpendapat bahwa mengalihwujudkan suatu lukisan sangat sulit untuk menentukan parameter sebagai pelanggaran, karena dari hasil penelitian ada beberapa pelukis berpendapat untuk mengkritik suatu lukisan itu

hampir 50 % lebih menampilkan lukisan original, artinya melukis ulang bentuk yang sudah ada.

Dari alasan terakhir tersebut memang dalam Undang-undang Hak Cipta tidak diberi batasan secara tegas, unsur-unsur pelanggaran secara spesifikasi, tidak seperti Undang-undang Hak Cipta Australia, misalnya pencipta boleh mengambil karya cipta pihak lain dengan mencantumkan asal dari karya cipta tersebut, juga karya cipta yang ditiru tidak boleh 10 %, dari sepuluh persennya pun tidak boleh yang intinya.

- c. Tanda tangan dalam lukisan merupakan wujud identitas suatu kepemilikan, dari hasil wawancara terhadap pelukis di Pasar Baru, Jakarta Pusat dan kampung Prapatan, Jakarta Selatan menjelaskan bahwa mereka melukis jika telah selesai kemudian ada pihak pembeli yang datang untuk menandatangani lukisan yang dibuat seolah olah lukisan itu yang membuat adalah si pembeli, maka para pelukis dengan senang hati untuk melepaskan lukisan itu untuk ditandatangani sekaligus dibeli, hal ini jika dikaitkan dengan perlindungan hukum yang dicita-citakan oleh Hak Cipta sangat kontradiksi, karena hak *moral right* pun ikut beralih kepada sipembeli, begitu juga hak *economic right* karena dengan penandatanganan oleh pembeli semua hak telah beralih.

- d. Sertifikat yang dikeluarkan oleh badan asosiasi pelukis, atau pendapat oleh Kurator lebih berbobot nilainya, jika dibandingkan dengan pendaftaran Hak Cipta di kantor Hak Cipta Direktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektual, dalam Undang-undang Hak cipta dijelaskan bahwa orang yang dianggap sebagai pencipta adalah yang namanya terdaftar dalam daftar umum Ciptaan di Kantor Hak Cipta, namun pasal ini ternyata tidak membawa minat para pelukis untuk melindungi dengan pendaftaran, mereka lebih mengedepankan kepada Asosiasi atau komunitas pelukis, atau institusi yang mereka sepakati, seperti dalam penelitian semacam Badan Standardisasi, untuk mengeluarkan sertifikat baik menerangkan keaslian maupun kualitas, dan para pelukispun mau membayar tinggi terhadap para kurator untuk menanggapi atas lukisan yang telah dihasilkan, ini menunjukkan bahwa peran asosiasi, komunitas, ataupun lembaga swasta dibidang Hak Cipta lebih diminati para pelukis untuk memberikan perlindungan dibanding Instansi pemerintah. Hal ini dikarenakan sifat perlindungan yang berbentuk sertifikasi oleh komunitas, tanggapan oleh para kurator akan lebih memberikan nilai komersial dan masyarakat seni lukis sudah mengakui keberadaannya sebagai hal yang berharga, disisi lain fungsi dari pendaftaran Hak Cipta lukisan semata-mata hanya untuk memudahkan pembuktian jika terjadi sengketa, karena



walaupun didaftar namun jika ada pihak lain yang membuktikan bahwa hak ciptanya lebih dulu dimiliki, maka pihak yang dapat membuktikan tersebut yang berwenang atas lukisan.

Perlindungan terhadap pelukis dapat dirasa adil dan membuat rasa aman tenteram bagi pelukis apabila terbentuk asosiasi dari pelukis bekerja sama dengan Universitas sebagai pengelola manajemennya dan para pelukis tetap aktif untuk berkreasi dan meningkatkan mutu kualitas lukisannya, sedang asosiasi melakukan pemasaran, pameran, publikasi, pengumuman dan menarik royalty dari penggandaan perbanyakan oleh pihak lain yang menginginkan, juga membagikan royalty kepada pelukis, kurator, asosiasi, Universitas atau badan lain yang terkait dan berhak.

Pelukis akan dapat aktif dan berkonsentrasi penuh untuk berkreasi, dan asosiasi pelukis dapat mengadakan koordinasi terhadap pelukis yang satu dengan lainnya untuk peningkatan kualitas dan kuantitas mutu perbaikan sebuah lukisan, dan asosiasi juga berkoordinasi dengan sub asosiasi untuk bidang pemasaran serta asosiasi dapat berfungsi melindungi pihak pelukis jika terjadi permasalahan yang timbul akibat adanya penggandaan dan perbanyakan serta kejahatan dibidang lukisan, khususnya bidang hukum.

#### **4. Menentukan Parameter Dalam Hal Terjadinya Kejahatan oleh Pelukis**

Untuk menentukan parameter kejahatan terhadap hak cipta seni rupa dari sudut hukum yang berlaku di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Hak Cipta 1997, yang menjadi parameter kejahatan adalah perbanyakan, pengumuman, mengalihwujudkan, pengambilan, pembuatan salinan, suatu lukisan.

Sebelum menentukan parameter kejahatan, hal yang tidak kalah pentingnya adalah menentukan kepemilikan hak suatu ciptaan atau siapa yang dianggap sebagai pencipta, hal ini dimaksudkan untuk menentukan kepemilikan suatu karya cipta atau karya lukis, antara lain sebagai berikut Pencipta adalah :

- a) Seseorang atau beberapa secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuannya, kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas, kepemilikannya yang berhak secara bersama-sama.
- b) Orang yang merancang suatu ciptaan tapi diwujudkan oleh orang lain dibawah pimpinan atau pengawasan orang yang merancang ciptaan tersebut, yang memiliki ciptaan pihak yang memimpin kecuali diperjanjikan lain.

- c) Orang yang membuat karya cipta dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, yang berhak atas lukisan adalah pihak yang memberi kerja atau yang memesan, kecuali diperjanjikan lain.

Seseorang dianggap sebagai pencipta apabila :

- a) Namanya terdaftar sebagai pencipta dalam daftar Umum Ciptaan dan pengumuman resmi tentang pendaftaran di Departemen Kehakiman.
- b) Nama disebut dalam ciptaan atau namanya diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan.

Suatu ciptaan terdiri dari beberapa bagian tersendiri yang diciptakan dua orang atau lebih, maka yang dianggap sebagai Pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau jika tidak ada orang itu, orang yang menghimpunnya, dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian ciptaannya.

Suatu ciptaan yang dirancang seseorang, diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain dibawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang maka penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan itu.

Suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, maka pihak yang untuk dan dalam dinasnya ciptaan itu di kerjakan adalah Pemegang Hak Cipta, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak, dengan tidak mengurangi hak si pembuat sebagai penciptanya apabila penggunaan ciptaan itu di perluas keluar hubungan dinas.

Suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaan nya, maka pihak yang membuat karya cipta itu sebagai Pencipta adala Pemegang Hak Cipta, kecuali apabila di perjanjian lain antara kedua pihak.

Suatu badan hukum mengumumkan bahwa ciptaan berasal daripadanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai Penciptanya, maka badan hukum tersebut dianggap sebagai Penciptanya, kecuali jika dibuktikan sebaliknya.

Pemegang Hak Cipta atas karya peninggalan sejarah, pra sejarah, paleo-antropologi, dan benda-benda budaya nasional lainnya. Hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, kareogarafi, tarian, kaligrafi dan karya seni lainnya dipelihara dan dilindungi oleh negara. Maka negara memegang Hak Cipta atas ciptaan tersebut dan terhadap luar negeri. Hak Cipta suatu karya demi kepentingan nasional dengan sepengetahuan pemegangnya dapat di jadikan mili Negara dengan Keputusan Presiden atas dasar pertimbangan Dewan Hak Cipta. Kepada Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud diberi imbalan penghargaan yang di tetapkan oleh Presiden. Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Suatu

ciptaan sama sekali tidak diketahui siap penciptanya, maka Negara memegang Hak Cipta tersebut kecuali terbukti sebaliknya.

Apabila suatu ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui penciptanya atau pada ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran penciptanya, maka penerbit memegang Hak Cipta atas ciptaan tersebut untuk kepentingan penciptanya.

Para pelukis ternyata untuk melindungi lukisan dari pemalsuan pihak lain atau memberikan ciri tertentu pada lukisan diantaranya dengan membubuhkan tanda tangan atau, paraf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lukisan milik Tohny Yusuf dipalsukan tanda tangannya dan dipamerkan oleh pelukis lain.

Pembuatan salinan atau duplikasi suatu lukisan ini banyak dilakukan oleh para pelaku tidak kejahatan dibidang seni lukis, dari hasil penelitian hampir sebagian besar dari kejahatan dibidang lukisan melakukannya, misalnya sama sama pelukis yang cukup terkenal seperti Lukisan Tisna Sanjaya, lukisannya disalin oleh sesama pelukis yang cukup terkenal juga yaitu Asmudjo yang melukis persis sama terhadap lukisan tersebut tapi ukurannya lebih kecil, dan kebanyakan pemalsuan lukisan di Indonesia ini lebih mudah untuk dideteksi, hal ini karena karya lukis yang dipalsu masih relatif muda usia dan populer.

Hak mengumumkan (*Performing Rights*) dan hak memperbanyak suatu lukisan secara tegas diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Hak

Cipta yang meliputi Pengumuman adalah Pembacaan, penyiaran atau penyebaran suatu ciptaan, dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat oleh orang lain.

Perbanyakan adalah menambah jumlah suatu ciptaan dengan pembuatan yang sama, hampir sama atau menyerupai ciptaan tersebut dengan mempergunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk mengalih wujudkan suatu ciptaan.

Menentukan parameter kejahatan yang lebih sulit adalah jika sudah menyangkut nilai seni yang abstrak, artinya yang mempunyai nilai seni tersebut yang mengetahui hanya orang-orang tertentu yang pernah mengenyam pendidikan formal, dan yang menyangkut teknis dalam suatu lukisan.

Parameter adanya kejahatan karya lukis yaitu apabila lukisan tersebut diperbanyak, digandakan, dialih wujudkan dan dipublikasikan serta diadakan perbanyakan dengan tujuan komersialisasi, memalsu termasuk tanpa tangan.

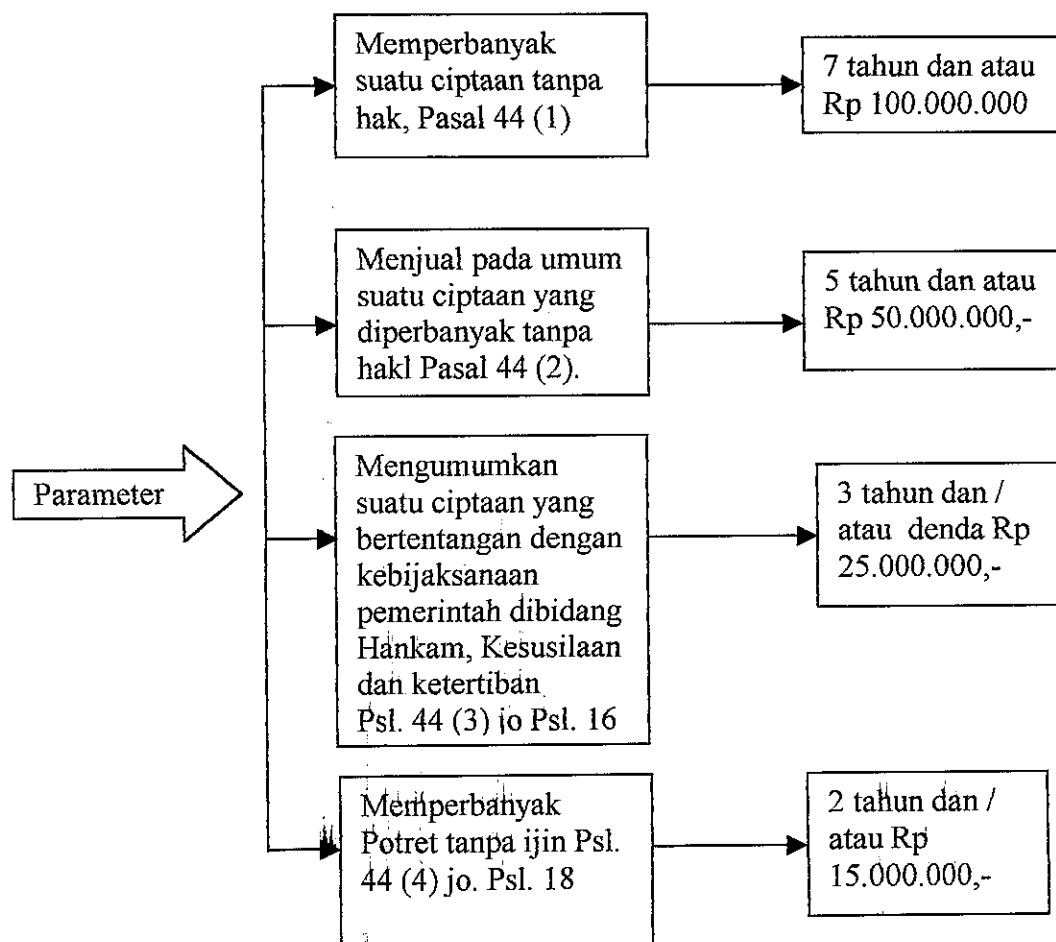
Secara spesifik untuk menentukan tolak ukur memang sulit untuk menentukan adanya kejahatan Senirupa, karena menyangkut hak yang sifatnya secara teknis diketahui oleh para pelukis sendiri, dan menyangkut berbagai permasalahan yang satu dan lainnya berbeda beda, sehingga lebih bersifat kasuistik.

Adapun Tolak ukur pelanggaran dibidang Hak Cipta khususnya Seni rupa yang diatur dalam Undang-undang Hak Cipta meliputi :

1. Ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang Ilmu Pengetahuan, Seni dan Sastra diataranya adalah Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni Patung, Kolase, seni terapan yang berupa seni kerajinan tangan (Pasal 11 ayat 1 huruf h Undang-undang nomor 12 tahun 1997 tentang Hak Cipta).
2. Mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi ijin untuk itu, tanpa ijin pemilik Hak Cipta.
3. Menyiarkan memamerkan mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta.
4. Mengalihwujudkan suatu ciptaan.
5. Mengumumkan, memperlihatkan dan mempertunjukkan suatu lukisan.
6. Menandatangani suatu ciptaan (seni rupa) bukan karya ciptanya.

Secara garis besarnya yang menjadi parameter tindak kejahatan dibidang Hak Cipta yang melindungi terhadap karya lukis dan pelukis, jika dihubungkan dengan sanksi penjatuhan pidana dan denda yang diatur dalam Undang-undang nomor 12 tahun 1997 tentang Hak Cipta, maka parameter terhadap kejahatan dapat diukur apabila seseorang memperbanyak, dan menjual serta mengumumkan pada umum suatu lukisan tanpa hak, adapun

secara garis besar parameter kejahatan dibidang Hak Cipta adalah sebagai berikut :



Parameter tindak kejahatan dibidang seni lukis secara garis besar apabila seseorang melakukan perbuatan dengan cara perbanyakan, pengumuman, dan mengalihwujudkan, pengambilan, pembuatan salinan, suatu lukisan, dengan tujuan komersial.



Sedang yang dikaitkan dengan sanksi baik pidana maupun perdata adalah memperbanyak, menjual dan mengumumkan suatu lukisan tanpa hak artinya tanpa ijin dari sipemilik lukisan tersebut.

Sehingga jika pelukis melakukan tindak kejahatan dengan mengalihwujudkan lukisan misalnya dari Patung menjadi lukisan, hal ini tidak diatur dalam Undang-undang untuk dijatuhi sanksi baik perdata maupun pidana.

Penuangan tanda tangan kedalam lukisan, pemberian sertifikat oleh institusi yang diakui keberadaannya oleh para pelukis, pemberian tanggapan atas suatu lukisan oleh kurator, hal ini tidak diatur dalam undang-undang namun jika terdapat pelukis yang melakukan kejahatan dengan memalsukan tanda tangan, memalsukan sertifikat dan memalsukan tanggapan kurator hal ini oleh pelukis dijadikan tolak ukur tindak kejahatan.

Hak cipta sebagai hak manual eksklusif terdiri dari dua macam hak yaitu hak ekonomi (*economic Right*), dan hak moral (*moral right*).<sup>118</sup> hak ekonomi tersebut berkembang dengan pemanfaatan hak secara komersial, suatu ciptaan memerlukan pengorbanan waktu, tenaga sehingga bagi penciptanya perlu diberikan imbalan yang sesuai, bahkan penjualan suatu lukisan akan jauh lebih mahal nilai ekonominya jika dibandingkan dengan profesinya, namun juga ada yang terjadi

---

<sup>118</sup> Sanusi Bintang, Hukum Hak Cipta, PT. Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 4.

sebaliknya, dan menurut perlindungan terhadap pelukis yang diatur dalam Undang-undang bahwa hak ekonomi boleh beralih namun hak moralnya tetap melekat pada pelukis, artinya jika suatu lukisan telah dibeli oleh seseorang, maka sipembeli tidak berhak untuk merubah, menambah dan atau mengganti atas lukisan tersebut. Sedang yang terjadi bahwa penambahan tanda tangan sebelum lukisan dibeli telah banyak dilakukan oleh pelukis itu sendiri kepada pembelinya. Sehingga harapan bahwa karya cipta lukis mempunyai hak ekonomi dan hak moral dalam realitanya sesuai dengan penelitian di Pasar Baru Jakarta bahwa para pelukis mengalihkan haknya secara keseluruhan baik hak ekonomi maupun hak moralnya.

Pelukis di galeri-galeri seperti di Taman Seni Jaya Ancol, Jakarta lebih maju dalam melindungi karya cipta lukisnya, karena pembeli tidak boleh menanda tangani sebuah lukisan yang dibuat oleh pelukis begitu juga pelukis yang ada di Mampang Prapatan, Jakarta.

Pelukis yang profesinya sebagai tukang akan lebih mudah untuk mengalihkan hak ekonomi dan moralnya kepada pembeli, sedang pelukis yang profesional dan pendidikan formalnya lebih tinggi dalam melindungi lukisannya tetap mempertahankan hak moralnya tetap berada pada sipelukis itu sendiri.

## **Bab IV**

### **Kesimpulan**

Dari data yang terkumpul baik yang didapat dari Teori-teori, peraturan perundang-undangan, obserwasi dan wawancara terhadap para pelukis dan komunitasnya serta instansi dan institusi Pemerintah dan swasta, dan dari hasil analisa dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

#### **1. Aturan Hukum Hak Cipta Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pelukis :**

Aturan hukum dibidang Hak Cipta lebih mengarah dan penekanannya pada penyelesaian perkara perdata, hal ini terlihat dari sanksi yang diberikan oleh Undang-undang bahwa penjatuhan pidana lebih ringan ringan, sedang penjatuhan denda sangat memberatkan bagi pelaku kejahatan.

Proses penyelesaian ditingkat penyidikan dan penuntutan yang berkiblat pidana, dan aturan hukum kurang memberikan tempat artinya proses penyelesaian untuk perkara pidana banyak dibatasi oleh kewenangan penegak hukum khususnya proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Hak Cipta.

Proses Penyelesaian Perkara ditingkat Pengadilan Niaga yang lebih terfokus pada kasus perdata, diberikan tempat yang berlebihan artinya aturan hukum Hak Cipta memberikan waktu yang sangat singkat dalam penyelesaian perkara Hak Cipta, khususnya pelanggaran terhadap pelukis, yaitu penyelesaian perkara perdata dalam proses HKI melalui penetapan

Sementara, dan proses yang sangat singkat tidak kurang dari 150 hari dalam proses penyelesaian perkara dari Pengadilan Tingkat Pertama sampai Mahkamah Agung, hal ini secara azas hukum Lex spesialis derogat lex generalis, dan superior derogat lex inferior, hal itu dibenarkan.

## **2. Perlindungan Hukum yang Dilakukan oleh Unsur Aparat Penegak Hukum :**

Unsur Aparat Penegak Hukum dibidang Hak Cipta meliputi Penyidik pegawai negeri Sipil, Polri, Jaksa dan Hakim serta Petugas Bea Cukai. Perlindungan hukum kepada para pelukis dan karya lukis dibidang hak Cipta yang diberikan oleh Penyidik Pegawai negeri Sipil dan penyidik Polri sangat kurang memuaskan, dikarenakan kewenangan sangat terbatas, dan keberadaan penyidik Pegawai negeri Sipil dibidang Hak Cipta belum terfokus sebagai profesi tunggal, artinya dalam menjalankan tugasnya masih dirangkap sebagai staf atau jabatan struktural, juga jumlahnya sangat terbatas, Peran kejaksaan semata mata melakukan dakwaan dan penuntutan bagi pelaku tindak pidana dibidang Hak Cipta, dan secara khusus tidak diatur dalam Undang-undang Hak Cipta, Hukum Hak Cipta lebih diwarnai dan dipengaruhi serta berasal dari hukum manca negara, yang tidak sesuai dengan sistem Hukum Indonesia.

Perlindungan hukum yang dilakukan oleh Jaksa semata mata melaksanakan tugas dakwaan dan penuntutan dalam perkara pidana, Sedang Hakim lebih berperan aktif dalam penetapan sementara.

**3. Pemahaman Pelukis di Daerah Jakarta kurang memberikan tempat bagi berlakunya Undang-undang Hak :**

Perbedaan mendasar antara pendapat pelukis terhadap aturan Hukum Hak Cipta adalah bahwa para pelukis lebih bersifat komunal, sedang Hak Cipta individualis dan monopolis.

Mengalihwujudkan suatu lukisan, menandatangani lukisan oleh pihak pembeli dan batasan pelanggaran hak Cipta, Pelukis lebih menyelesaikan melalui komunitasnya, atau institusi dibidang Lukisan dari pada melakukan perlindungan atau mendaftarkannya ke Kantor Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

**4. Menentukan Parameter Dalam Hal Terjadinya Kejahatan oleh Pelukis:**

Ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang Ilmu Pengetahuan, Seni dan Sastra, diataranya adalah Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni Patung, Kolase, seni terapan yang berupa seni kerajinan tangan.

Tolak ukur kejahatan dibidang hak cipta apabila mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi ijin untuk itu, tanpa ijin pemilik Hak Cipta, atau menyiarkan memamerkan mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta, mengalihwujudkan suatu ciptaan, mengumumkan, memperlihatkan dan mempertunjukkan suatu lukisan, dan menandatangani suatu ciptaan (seni rupa) bukan karya ciptanya.

## Daftar Pustaka

- Abdul Kadir Muhammad, ***Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Agus Sachri, Seni, ***Desain dan Teknonolgi (Analogi, Kritik, Opini dan Filosofi) Volume I***, Penerbit Pustaka, Bandung, 1998.
- Ahmad Sadeli, ***Identitas Seni dan Seni Bina Kebangsaan***, disampaikan dalam seminar Kerah Identitas Kebangsaan Dalam Seni Bina, Kuala Lumpur, 1981.
- Hipotesa Proses Kreatif*** Dalam Sachari, Agus, Seni, Desain dan Teknologi Pustaka Bandung, 1986.
- Bambang Kesowo, ***Pengantar Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia***, Jogjakarta, Bahan Penataran Hukum Dagang, Fakultas Hukum, UGM.
- Bernadus EF da Silva dkk, ***Kamus Besar Bahasa Indonesia***, Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan kebudayaan, 1990a
- Chandra Manan Mangan, Retno Sumekar, Setyowati, Dody S. Budiwaskito, Rudyama Sugandi, Ismet Yusputra, ***Pembudayaan HKI Dalam Lingkungan Menengah dan Kejuruan***, Program Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi Dalam Pembudayaan HKI disampaikan pada acara Simposium Nasional HKI 2000, Jakarta, 22 Nopember 2000.
- Cita Citrawinda Priapantja, Disertasi Dalam mempertahankan gelar Doktor, dengan judul ***Budaya Hukum Indonesia dalam Rangka Menghadapi Globalisasi, Studi Kasus Perlindungan Rahasia Dagang dibidang Farmasi***, Jakarta.

- C.J.T Simorangkir, ***Hak Cipta Lanjutan II***, Cetakan Pertama Jakarta, PT. Jambatan, 1979.
- CST. Kansil, ***Hak Milik Intelektual, (Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta)***, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- Daniel S. Lev. ***Lembaga Pendidikan dan Budaya Hukum di Indonesia***, 1995.
- Daniel S. Lev, ***Lembaga Peradilan dan Budaya Hukum di Indonesia***, yang ditulis dalam buku AG. Peters, ***Hukum dan Perkembangan Sosial ( Buku Sosiologi Hukum II )***, Pustaka Sinar Harapan, 1998.
- Dicky Rezady Munaf, *Keynote Address* disampaikan pada acara Simposium Nasional Hak Kekayaan Intelektual 200, ***Pembudayaan HKI di Lingkungan Pendidikan Menengah dan Kejuruan***, diselenggarakan oleh Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi bekerjasama dengan Departemen Pendidikan Nasional, dan Departemen Kehakiman dan HAM, Jakarta, 22 Nopember 2000.
- Djumhana dan Djubaidillah, ***Hak Milik Intelektual, Teori dan Prakteknya di Indonesia***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Gatot Supramono, ***Masalah Penangkapan, Penahanan dalam Tingkat Penyidikan Tindak Pidana Hak Cipta***, Pustaka Kartini, Selayar, 1989.
- Graburn H. Nelson, ***Ethnic And Tourist Arts, The Regent of University California***, 1976.
- Henry Sulistyo Budi, *Persetujuan Internasional dibidang Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta, 1997.
- Perlindungan Hak-hak yang berkaitan dengan Hak Cipta dan Permasalahannya***, disampaikan dalam Seminar, tanggal 27 Nopember 1997.

- Insan Budi Maulana, ***Kompilasi Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Merek dan terjemahan Konvensi-konvensi dibidang Hak Atas Kekayaan Intelektual ( HAKI )***, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Pelangi Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Anti Monopoli***, Penerbit Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2000.
- Insan Budi Maulana, Ridwan Khairandy, dan Nurjihat, ***Kapita Selekta HAKI***, Penerbit Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2000.
- JB. Lumenta, ***Perlindungan Hukum HKI di Indonesia***, disampaikan pada Acara Seminar Nasional dengan tema Kebijakan Pemerintah dibidang HKI di Indonesia, di Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi, 8 Nopember 2001.
- JM. Cavendis, A, ***Handbook of Copyright in British Publishing Practice***, Cetakan kedua London, Cassel, 1984.
- Joko Purwono, ***Metode Penelitian Hukum***, Penerbit UNS Pers, 1995.
- J. Taylor dalam Djumhana dan Djubaidillah, ***Hak Milik Intellektual Teori dan Prakteknya di Indonesia***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
- JTC. Simorangkir, ***Undang-undang Hak Cipta dengan Komentarnya***, Penerbit Jambatan, Jakarta, 1998.
- JCT. Simorangkir, ***Sekitar Hak Cipta***, Badan Pembinaan Hukum Nasional, PT. Bina Cipta, Bandung, 1975.
- Koentjaraningrat, ***Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan***, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.
- Lawrence M. Friedman, ***American Law ( New York – London WW. Norton Company, 1984 )***.



- Leden Marpaung, ***Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual***, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Mahadi, ***Hak Milik Imateriil***, penerbit Badan Pembinaan Hukum Naional, Bina Cipta, Jakarta, 1985.
- Mardalis, ***Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal***, Bumi Aksara, Jakarta, 1990.
- Marpaung. L. ***Tindak Pidana Terhadap Hak Kekayaan Intelektual***, PT. Sinar Grafika, Jakarta. 1995.
- Marni Emi. ***Proses Penyelesaian Sengketa HKI***, disampaikan pada Seminar Nasional HKI 2001, di Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi, 8 Nopember 2001.
- Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, ***Hak Milik Intelektual Sejarah Teori***, dan prakteknya di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Muladi, ***Hak Azasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana***, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997.
- Munawar Kholil, ***Sekilas Tentang Hukum Hak Cipta***, disampaikan pada pelatihan dan Pemanfaatan HKI bagi mahasiswa yang mempunyai Karya Inovasi, UNS, Juli 1999, Surakarta.
- M. Hutahuruk. ***Peraturan Hak Cipta Nasional***, penerbit Erlangga, Jakarta, 1982.
- Peters. AG, (Ed), ***Hukum dan Perkembangan Sosial (Buku Teks Sosiologi Hukum II)***, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1998.
- Potton ***Qualitative Data Analysis, A Source book of New Methods***, sebagaimana dikutip oleh Lexi J. Moleong dalam bukunya

- Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1995.
- Rosidi, Ajip. **Undang-undang Hak Cipta**, Pandangan Seorang Awam, Djambatan, Jakarta, 1984.
- Sadeli Ahmad, **Hipotesa Proses Kreatif** Dalam Sachari, Agus. Seni Desain dan Teknologi, Pustaka Bandung, 1986.
- Saidin, **Aspek Hukum Hak kekayaan Intelektual**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Sanusi Bintang, **Hukum Hak Cipta**, PT. Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Satjipto Rahardjo, **Pemanfaatan Sosial Bagi Pengetahuan Ilmu Hukum**, Alumni, Bandung, 1997.
- Hukum dan perubahan Sosial**, Alumni, Bandung, 1983.
- S. Kayatmo, **Problem pendaftaran dan Pengawasan Hak Atas Kekayaan Intelektual**, Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 1997.
- Soedarso. SP. **Sejarah Perkembangan Seni Rupa Modern**, Sakudayarsana, Yogyakarta, 1990.
- Soedjoko, **Peranan dan Sumbangan Seni Dalam Kebudayaan Indonesia**, 1979. dalam Sachari, Agus, Seni Desain dan Teknologi, Pustaka, Bandung, 1986.
- Soejatmiko, **Etika Pembebasan**, LP3ES, Jakarta, 1994.
- Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI, Pers, Jakarta, 1984.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif**, CV. Rajawali, Jakarta, 1985.

- Sophar Maru Hutagalung, ***Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya Dalam Pembangunan Akademika***, Presindo, Jakarta, 1996.
- Sri Redjeki Hartono, ***Hukum Bisnis Volume 5***, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1998.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, ***Hukum Perdata : Hukum Benda***, Liberty, Jogjakarta, 1981.
- Sunaryati Hartono, ***Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, BPHN, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1988.***
- Sunaryati Hartono, ***Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir abad ke 20***, Alumni Bandung, 1994.
- Sunaryati Hartono, ***Pembahasan Mengenai Indonesia dan Konvensi-konvensi Internasional tentang Hak Cipta, Seminar badan Pembinaan Hukum Nasional***, mengenai Hak Cipta, 1975.
- Sumarni Mien Rukmini, ***Parameter Pemalsuan Karya Seni Lukis Di Indonesia, Dihubungkan dengan Undang-undang Hak Cipta***, Bandung, 2000.
- Taryana Soenandar, ***Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara – negara Asean***, Sinar Grafika, Cetakan I, Jakarta, 1996.
- Todung Mulya Lubis, dan Buxbaum Richard. M, ***Peranan Hukum Dalam Perekonomian di Negara Berkembang***, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1986.
- Wolter Simanjuntak, ***Penegakan Hukum Dibidang Hak Cipta dan Desain Industri***, disampaikan dalam acara Pengembangan Kerjasama Teknis dengan Australia (IPR Advance), bagi Konsultan, Wartawan, dan pemeriksa.

WJS. Poertwadarminta, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1976.

WR. Cornish, **Intellectual Property**, Edisi ke-2, London : Swett and Maxwell, 1989.

#### **Peraturan Perundang-undangan :**

- ❑ Undang-undang Dasar 1945 beserta penjelasannya.
- ❑ Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.
- ❑ Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.
- ❑ Undang-undang nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Stablising The World Trade Organization ( Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), disahkan dan diundangkan pada tanggal 2 Nopember 1994 dalam Lembaga Negara R.I, tahun 1994, nomor 5.
- ❑ Undang-undang nomor 12 tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 6 tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan Undang undang nomor 7 tahun 1987 tentang Hak Cipta.
- ❑ Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.
- ❑ Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 29 tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
- ❑ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Tentang rahasia Dagang.
- ❑ Undang-undang Nomor : 31 Tentang Desain Industri.



- ❑ Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
- ❑ Undang-undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 13 tahun 1997 tentang Paten.
- ❑ Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek.
- ❑ Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 15 tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden nomor 24 tahun 1979, tentang pengesahan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Convention Establishing The World Intellectual Property Organization*.
- ❑ Keputusan Presiden nomor 18 tahun 1997 tentang Pengesahan *Berne Convention for the protection of literary and artistic works*.
- ❑ Keputusan Presiden nomor 19 tahun 1997 tentang Pengesahan *WIPO Copyright Treaty*.
- ❑ Persetujuan Internasional Tentang Aspek-aspek Dagang Dari Hak Atas kekayaan Intelektual (*Trade Related Aspec Of Intellectual Property Rights / TRIPs*)
- ❑ Pengaturan *neighboring Rights* dalam *WIPO Performance and Phonogram Treaty, Article 7 (WPPT 1996)*.
- ❑ *International Convention For The Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organization*, sering disebut *Roma Convention 1961* (konvensi Roma 1961), hingga kini belum ada perubahan.